

LAPORAN PENELITIAN

**KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA DI MASA TRANSISI PERPINDAHAN IBU KOTA
NUSANTARA**



Oleh:

Dr.Ivan Zairani Lisi, SH,S.Sos,M.Hum

Orin Gusta Andini,SH,MH

Ariesty Windiana Pamuncak,SH.MH

Nur Aripkah,SH.MH

Dela Safitriana

Reza Aspianur

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2022

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN

Judul Penelitian : Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Masa Transisi Perpindahan Ibu Kota Nusantara

Ketua Peneliti : Dr.Ivan Zairani Lisi, SH,S.Sos,M.Hum (Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)

Anggota Peneliti :

1. Orin Gusta Andini,SH,MH (Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)
2. Aristya Windiana P,SH.MH (Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)
3. Nur Aripkah,SH.MH (Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)
4. Dela Safitriana (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)
5. Reza Aspianur (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)

Jumlah Anggaran : Rp.19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah)

Samarinda, 5 Desember 2022

Mengetahui,

Dekan,

Ketua Tim Peneliti

Dr. Mahendra Putra Kurni,S.H.,M.H.

NIP. 198203072003121003

Dr.Ivan Zairani Lisi, SH,S.Sos,M.Hum

NIP.197501232003121002

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Halaman Pengesahan	2
Daftar Isi	3
BAB 1. PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Landasan Teori dan Kajian Literatur	5
E. Metode Penelitian	13
BAB II. PEMBAHASAN	17
A. Pengaruh Perpindahan Ikn Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Di Masa Transisi Selama Kurun Waktu 2018-2022	17
B. Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Masa Transisi Ibu Kota Nusantara	97
BAB III. PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	121
BAB IV. DAFTAR PUSTAKA	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota sejak tahun 1961, hingga UU yang terakhir yaitu UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, tata Kelola ibu kota negara tergantung dengan kondisi Jakarta. Bappenas telah melakukan kajian penting tentang Ibu Kota Negara DKI Jakarta sejak 2017, yang menyimpulkan bahwa kota DKI Jakarta sudah tidak dapat mengemban fungsi sebagai ibu kota negara dalam memberikan keamanan, keamanan, layak berkelanjutan¹. Alasannya karena penambahan penduduk yang sudah tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, kenyamanan hidup yang semakin menurun, dan ketidakmerataan persebaran pertumbuhan ekonomi antara Jakarta dengan daerah-daerah lainnya khususnya luar Jawa.. , Pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota baru akan dipindahkan dari DKI Jakarta, dan akan dibangun Ibu Kota Negara "baru" sebagai mega proyek di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Hal tersebut berdampak pada harga tanah di Kabupaten Penajam Paser Utara yang nantinya akan menjadi daerah pusat pemerintahan , tak lagi murah. Harga tanah terus melonjak tinggi, dan ternyata dimanfaatkan oleh mafia tanah untuk mengeruk uang. Mereka berusaha menguasai tanah-tanah strategis yang berkaitan dengan proyek nasional. Ini menjadi salah satu permasalahan serius saat ini, sehingga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bergabung dengan satgas tanah di Kementerian ATR/BPN bersama-sama mengantisipasi mafia tanah di IKN.

¹ Suharso Monoarfa, "Ibu kota negara (ikn)," *Bappenas*, May 2017, 2020, 159
<[https://ikn.go.id/en%0Ahttps://ikn.go.id/%0Ahttps://jdih.bappenas.go.id/data/sitelur-detail/Naskah+Akademik+RUU+IKN+20+Maret+2020_reduce_compressed_\(1\).pdf](https://ikn.go.id/en%0Ahttps://ikn.go.id/%0Ahttps://jdih.bappenas.go.id/data/sitelur-detail/Naskah+Akademik+RUU+IKN+20+Maret+2020_reduce_compressed_(1).pdf)>.

Keberadaan IKN akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang harapannya terwujud proses pengentasan kemiskinan karena pertumbuhan peluang kerja. Namun, situasi hukum dan ketertiban yang buruk dan kejahatan menciptakan keresahan dalam perekonomian. Kejahatan meningkatkan ketidakpastian dalam masyarakat (Herlambang, 2019). Seiring pertumbuhan ekonomi akan terjadi kesenjangan ekonomi, dan peningkatan jumlah penduduk baik dari ASN maupun masyarakat sekitar, maka tingkat kriminalitas akan ikut meningkat, sehingga perlu ditanggulangi dengan tepat. Oleh karena itu kriminalitas di IKN perlu mendapat pemantauan dan perhatian serius.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh perpindahan IKN terhadap peningkatan tindak pidana di masa transisi selama kurun waktu 2017-2022?
2. Bagaimana kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana di masa transisi Ibu Kota Negara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Mengetahui pengaruh perpindahan IKN terhadap peningkatan tindak pidana di masa transisi selama kurun waktu 2017-2022.
2. Untuk mengetahui kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana di masa transisi Ibu Kota Negara.

D. Landasan Teori dan Kajian Literatur

1. Kebijakan Kriminal (Criminal policy)

Pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.² Dimana difenisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai "*the rational organization of the control of crime by society*".³

Sedangkan G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa "*criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*".⁴ Selanjutnya juga G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain:

- 1) *Criminal Policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).
- 2) *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).^[1]
- 3) *Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).^[2]
- 4) *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).⁵ ^[3]

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan ^[4]bagian integral dari uapaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan

² Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit : Alumni, Bandung, 1981, Hal 38

³ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Penerbit : PT.Citra Aditya, Bandung, 2002, Hal 2

⁴ G.Peter Hoefnagels, The Other Slide of Criminology (An Invebdion of the concept of crime), Penerbit,Kluwer Deventer, Holland, 1969, H.57

⁵ Ibid, H.57-59

masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.

Usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*in uencing views of society on crime and punishment*).⁶

Dengan demikian politik kriminal disamping dapat dilakukan secara refresif melalui upaya non penal/*criminal law application*, dapat pula melalui sarana non penal/*prevention without punishment*. Melalui sarana non penal ini. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan "*extra legal system*" atau "*informal and traditional system*" yang ada dalam masyarakat. Apa yang dikemukakan oleh pernyataan dari Barda Nawawi Arief tersebut erat kaitannya dengan batas-batas kemampuan sarana hukum pidana (penal) dalam penanggulangan kejahatan.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan : ⁷

- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan; ^[1]_{ISEP}
- 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. ^[1]_{ISEP}

⁶ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Penerbit : PT.Citra Aditya, Bandung, 2002, Hal 45

⁷ Ibid, Hal 29

Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.⁸

Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak kriminal, maka perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut :⁹

- 1) Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
- 2) Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
- 3) Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
- 4) Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

⁸ Ibid, Hal 29

⁹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Penerbit : PT.Citra Aditya, Bandung, 2002, Hal 31

Pendekatan kebijakan tersebut diatas jelas merupakan pendekatan yang rasional karena karakteristik dari suatu politik kriminal yang rasional tidak lain daripada penerapan metode-metode yang rasional (*a rational total of the responses to crime*), dan suatu kebijakan yang rasional merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai yang senantiasa berlaku dan atau berkembang di masyarakat sehingga produk dari kebijakan tersebut mampu menggambarkan suasana ruh masyarakatnya.

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*" atau "*delict*". Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, serta patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁰

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut."¹¹ Adapun unsur-unsur perbuatan pidana adalah, sebagai berikut:¹²

- 1) Kelakuan dan akibat perbuatan
- 2) Hal ikhwal yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif.

¹⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaa Di Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010), hlm. 22..

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 59..

¹² *Ibid.*,

D.Simons menyatakan bahwa tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh hukum pidana dinyatakan sebagai tindakan pidana.¹³ Adapun unsur-unsur *strafbaarfeit* menurut Simons adalah:

- 1) Perbuatan yang dilakukan oleh manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat);
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan;
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Secara doktrinal dalam hukum pidana dikenal dengan adanya dua pandangan tentang perbuatan pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis melihat bahwa suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini memberikan gambaran dan pemahaman, bahwa perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*) sudah menjadi satu dalam pengertian tindak pidana.¹⁴ Adapun pandangan dualistis Apabila menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup didalamnya baik *criminal act* maupun *criminal responsibility*, menurut pandangan dualistis dalam tindak pidana hanya mencakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsure tindak pidana. Menurut pandangan dualistis, untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, tetapi disyaratkan juga adanya kesalahan atau pertanggungjawaban pidana.¹⁵

¹³ *Ibid.*, hlm. 62.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 60

¹⁵ *Ibid.*,

3. Ibu Kota Nusantara

Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.¹⁶

pemindahan ini dianggap penting karena beberapa alasan yaitu ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Pembangunan tersentralisasi di Jakarta dan pulau Jawa. Kondisi ini kurang support untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia yang sustainable, selain itu tidak termanfaatkannya potensi daerah secara optimal, serta Jakarta yang tidak cocok lagi sebagai IKN karena beban yang semakin berat, yaitu pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, kemacetan dan juga banjir.

pemindahan Ibu Kota Negara pernah diungkapkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957. Presiden pertama Indonesia saat itu memilih Palangkaraya sebagai IKN karena Palangkaraya berada di tengah kepulauan Indonesia dan memiliki wilayah yang luas. Presiden Soekarno juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu membangun IKN yang modern. Akan tetapi kemudian Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai IKN Indonesia dengan UU Nomor 10 tahun 1964 pada tanggal 22 Juni 1964.

Pada masa pemerintahan Presiden ke dua Republik Indonesia Soeharto sekitar tahun 1990-an, ada usulan pemindahan IKN ke Jonggol. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pembicaraan mengenai pemindahan IKN muncul kembali karena kemacetan yang parah di Ibu Kota dan banjir. Terdapat tiga opsi yang muncul pada saat itu yaitu tetap

¹⁶ Pasal 1 ayat 2 UU IKN 2022

mempertahankan Jakarta sebagai IKN dan pusat pemerintahan dengan melakukan pembenahan, Jakarta tetap menjadi IKN tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain, atau membangun IKN baru.

Pemindahan IKN, kemudian dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo. Pada tanggal 29 April 2019, Jokowi memutuskan untuk memindahkan IKN keluar pulau Jawa dan dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024. Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya pemindahan Ibu Kota Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2019, dan selanjutnya ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada tanggal 15 Februari 2022. Meskipun sudah ada UU Ibu Kota Negara, akan tetapi saat ini Indonesia masih ber-Ibu Kota di Jakarta, dan masih dalam masa transisi perpindahan ibukota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Ibu kota akan resmi berpindah dari Jakarta ke Nusantara dengan ditetapkannya Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN yang rencananya akan Diterbitkan pada 2024.¹⁷

Pada ibu kota negara Nusantara akan dipimpin oleh kepala otorita yang kedudukannya setingkat Menteri dan langsung bertanggung jawab ke presiden. Oleh karena itu, tidak akan ada pemilihan kepala otorita dalam pilkada setempat karena kepala otorita akan langsung ditunjuk oleh Presiden.¹⁸

Gagasan pemindahan ibu kota ini juga salah satu bentuk upaya memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota Negara serta bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan social.

¹⁷ Kompas. 'Keppres Pemindahan Ibu Kota Dari Jakarta Ke IKN Akan Diterbitkan Pada 2024'. <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/06/21134681/keppres-pemindahan-ibu-kota-dari-jakarta-ke-ikn-akan-diterbitkan-pada-2024>

¹⁸ Waluyo Erwanti, Fanisa Luthfia Putri, 'Catatan Kritis Pembentukan Undang- Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum', *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* |, 1.1 (2022), 44–56.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menelaah dan mengaji berbagai literatur yang berkenaan dengan topik penelitian. Menurut Sudikno Mertokusumo, penelitian kepustakaan dapat berdiri sendiri tanpa disertai atau dilengkapi dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum dapat semata-mata hanya mendasarkan pada penelitian kepustakaan saja (*penelitian hukum normatif*)¹⁹. Untuk itu, penelitian ini akan memfokuskan bahan analisisnya pada ketersediaan data sekunder. Namun demikian, ketersediaan data sekunder ini dipandang tidak cukup oleh peneliti. Menurut Sudikno Mertokusumo, penelitian hukum normatif untuk lengkapnya sering perlu didukung dengan penelitian lapangan²⁰.

1) Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah mengidentifikasi potensi tindak pidana di masa transisi ibu kota nusantara.

2) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer ini digunakan sebagai data pendukung bagi data sekunder, terutama untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Data primer ini bersumber dari keterangan, pandangan atau pendapat seseorang berdasarkan kompetensi atau keahliannya. Dengan demikian, data primer ini diperoleh dari wawancara atau diskusi yang sifatnya tidak terstruktur bersama responden dan narasumber yang kompeten terhadap rumusan masalah yang diteliti. Lokasi penelitiannya nantinya akan tersebar di beberapa tempat, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan:

¹⁹ Sudikno Mertokusumo (2007). *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*. Liberty : Yogyakarta. Hlm. 29
²⁰ *Ibid.* h. 30.

- 1) Samarinda
- 2) Penajam Paser Utara
- 3) Balikpapan
- 4) Kutai Kertanegara
- 5) Tenggarong

2. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah²¹ dalam penelitian ini meliputi :
 - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Bahan Hukum Sekunder diartikan sebagai sumber hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu, berupa buku-buku, disertasi, tesis, skripsi, jurnal dan makalah-makalah hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian. Bahan hukum sekunder ini berguna untuk

²¹ Burhan, Ashshofa. (2004). *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Keempat*. Jakarta: Rineka Cipta. h.103.

meningkatkan mutu dalam memahami hukum positif yang berlaku.²² Bahan-bahan juga didapatkan melalui pemberitaan media cetak maupun online, terkait kasus-kasus tindak pidana korupsi dibidang sumber daya alam.

- c. Bahan Hukum Tersier, diartikan sebagai sumber yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta Kamus istilah Inggris-Indonesia.

3. Data Primer

Data primer ini digunakan sebagai data pendukung bagi data sekunder, terutama untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Data primer ini bersumber dari keterangan, pandangan atau pendapat seseorang berdasarkan kompetensi atau keahliannya. Dengan demikian, data primer ini diperoleh dari wawancara atau diskusi yang sifatnya tidak terstruktur bersama responden dan narasumber yang kompeten terhadap rumusan masalah yang diteliti.

3) Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa bahan hukum melalui metode penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur pustaka, baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, media massa dan internet serta referensi lain yang relevan guna menjawab berbagai rumusan permasalahan.²³ Selain penelitian kepustakaan, guna mendukung bahan hukum yang telah dikumpulkan, peneliti juga akan mengumpulkan data lainnya melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

²² Sulistyowati, Irianto dan Shidarta. (2009). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indoensia. h. 128.

²³ Iqbal, Hasan. (2002). *Pokok-Pokok Mater Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. h.11

4) Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dideskripsikan sehingga menghasilkan gambaran atau simpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada.

BAB II

PEMBAHASAN

A. PENGARUH PERPINDAHAN IKN TERHADAP PENINGKATAN TINDAK PIDANA DI MASA TRANSISI SELAMA KURUN WAKTU 2018-2022

1. Pengaruh Perpindahan Ibu Kota Di Negara Malaysia Dan Kazakhstan

Perpindahan ibu kota negara telah dilakukan oleh beberapa negara, contohnya Ibu kota Jepang telah dipindahkan dari Asuka, Fujiwara, Nara, Kyoto, dan terakhir ke Edo, yang berubah nama menjadi Tokyo pada tahun 1868. Ibu kota Kanada telah dipindahkan, bolak-balik, antara Quebec dan Toronto, dan akhirnya dipindahkan ke Ottawa pada tahun 1857, hingga saat ini. Ibukota Thailand dipindahkan antara Sukothai, Ayutthaya, dan Thonburi, dan akhirnya dipindahkan ke Bangkok pada tahun 1782. Ibu kota AS dipindahkan dari antara Philadelphia, Baltimore, Lancaster, York, Princeton, New York, Annapolis, Trenton, dan akhirnya ke Washington pada tahun 1800 sampai sekarang.

Dalam perpindahan ibu kota perlu menawarkan kerangka kerja baru, mengidentifikasi enam strategi yang mendorong keputusan ini, yaitu pertimbangan ekonomi, politik, geografis, budaya dan keamanan.²⁴ Myanmar, Nigeria, dan Korea Selatan adalah beberapa negara yang berhasil direlokasi ibu kota mereka untuk alasan keamanan. Negara-negara tersebut memindahkan ibu kotanya karena berbagai alasan, salah satunya adalah adanya masalah keamanan, contohnya Korea Selatan memindahkan ibukotanya Seoul ke Sejong pada tahun 2004. Selanjutnya, Myanmar memindahkan ibu kotanya dari Rangoon ke Naypyidaw pada 2005, dan Nigeria memindahkan ibukotanya ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari serangan musuh yang mungkin muncul tiba-tiba di perairan.²⁵

²⁴ Rossman, Vadim. (2016). *Capital Cities: Varieties and Patterns of Development and Relocation*. London: Routledge

²⁵ Hakim, Lukmanul. Ali Maksum. (2021). *Capital Relocation from the Perspective of Transnational Organized Crime (TOC) Security at the Indonesia-Malaysia Border*. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*. <http://ijmmu.com> editor@ijmmu.com Volume 9, Issue 11 November, 2022 Pages: 214-224

Berikut tabel negara yang memindahkan ibu kotanya beserta alasan pemindahan²⁶

No.	Negara	Ibu Kota Lama	Ibu Kota Baru	Tahun	Alasan Pemindahan
1	Rusia	Saint Petersburg	Moskow	1918	Moskow lebih dekan dengan negara-negara Eropa
2	Turki	Istanbul	Ankara	1923	Memindahkan ibu kota negara karena di Istanbul penuh kemerosotan moral (dekadensi) dan korupsi setelah runtuhnya kekaisaran Ottoman
3	Brazil	Rio de Jenairo	Brasilia	1956	Padatnya penduduk dan kemacetan yang tinggi
4	Pakistan	Karachi	Islamabad	1961	Karachi, yang dulu pernah menjadi pusat perdagangan di Sungai Indus, sudah tak layak lagi sebagai ibu kota
5	Nigeria	Lagos	Abuja	1975	Untuk menghindari kepadatan penduduk. Pemindahan ke Abuja dikarenakan akses yang mudah, iklim yang mendukung dan ramah,

²⁶ Putra Kurnia, Mahendra. Rika Erawaty, Grizelda.(2022). *Implikasi Pemindahan Ibu Kota Negara Dari Perspektif Hukum Internasional*. <https://repository.unmul.ac.id>

					serta untuk menghindari tensi politik
6	Tanzania	Dar es Salaam	Dodoma	1980	Dodoma dipilih karena lokasinya yang strategis untuk membangun pusat perekonomian yang baru.
7	Sri Lanka	Colombo	Sri Jayawardene pura Kotte	1982	Colombo sudah terlalu penuh dan tak mampu menampung kantor pemerintahan
8	Jerman	Bonn	Berlin	1990	Penyatuan kembali Jerman Barat dan Jerman Timur
9	Kazakhstan	Almaty	Astana	1997	Pasca berakhirnya kekuasaan Uni Soviet
10	Malaysia	Kuala Lumpur	Putrajaya	1999	Kuala Lumpur dianggap terlalu padat
11	Myanmar	Yangon	Naypyidaw	2005	Ibu kota baru Myanmar lebih terpusat dan strategis
12	Korea Selatan	Seoul	Sejong City	2005	Pemindahan dilakukan untuk pembangunan pusat perekonomian baru dan

					pemerataan
--	--	--	--	--	------------

Tabel 1. Negara-negara Yang Pernah Melakukan Pemindahan Ibu Kota Negara

Penulis mengambil sample 2 (dua) negara yang telah melakukan pemindahan Ibu Kota Negaranya, sebagai analisis dan perbandingan, yaitu Negara Malaysia dan Negara Kazakhstan

a. Malaysia

Malaysia hanya mengalihkan sebagian fungsi administratifnya ke Putrajaya. Relokasi pusat administrasi menciptakan kesempatan yang lebih baik untuk memiliki pusat kota yang lebih terencana dilengkapi dengan teknologi modern dan infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pemerintah Kuala Lumpur ke Putrajaya. Relokasi Ibu Kota Negara juga didorong oleh motivasi untuk mendapatkan pengakuan global.

Alasan utama untuk memindahkan pusat administrasi dari Kuala Lumpur adalah untuk memastikan kualitas hidup perkotaan dan lingkungan untuk pusat administrasi baru, dimana memindahkan fungsi administratif Pemerintah dari yang sudah ada ibu kota yang padat tidak hanya membantu meringankan tekanan pada infrastrukturnya yang kewalahan tetapi juga mengatasi kekurangan besar tanah Pemerintah untuk memenuhi permintaan kantor yang meningkat. Sementara Kuala Lumpur tetap menjadi ibu kota keuangan dan komersial negara, Putrajaya menjadi pusat pemerintahan.

Penataan kota yang baik di ibukota baru Malaysia, menjadikan Putrajaya sangat aman. Angka kriminalitas sangat rendah. Bahkan nyaris nol. Warga bisa leluasa melakukan perjalanan hingga tengah malam dan dinikmati tanpa takut akan jadi korban tindak kejahatan. Hampir di setiap sudut kota sudah terpasang kamera pemantau (CCTV) yang jumlahnya mencapai 400 unit yang dipantau polisi selama 24jam.²⁷ Hal ini bertolak belakang dengan tingkat kriminalitas

²⁷ Yoanda, Paul. Mellani Eka Mahayana.(2022). *Putrajaya Sepi Tapi Aman, Bisa Ditiru IKN Nusantara*. <https://rm.id/baca-berita/internasional/131310/liputan-rakyat-merdeka-dari-malaysia-putrajaya-sepi-tapi-aman-bisa-ditiru-ikn-nusantara/4>

di ibukota lama Malaysia, yaitu Kuala Lumpur, dimana Kuala Lumpur masuk ke 3 besar Kota dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Asia Tenggara pada tahun 2022.²⁸

b. Kazakhstan

Menurut Kedutaan Besar Kazakhstan di Jakarta, alasan utama pemindahan ibu kota ke Nur-Sultan bukan karena jumlah penduduk di Almaty sudah sangat padat, namun karena letaknya yang dikelilingi pegunungan, membuat kota tidak bisa berkembang dan Lokasi Almaty yang dikelilingi pegunungan itu juga rentan diguncang gempa sehingga dapat membahayakan posisi ibu kota. Selain itu, ibu kota lama Kazakhstan terletak di bagian selatan yang menyulitkan proses administrasi pemerintahan.

Berdasarkan alasan-alasan itu, dipilihlah wilayah baru yang terletak di pusat negeri yang dianggap lebih strategis untuk menjalankan administrasi pemerintahan dan mempermudah komunikasi pemerintah pusat daerah serta memungkinkan ibu kota untuk terus berkembang. Terkait pengembangan kota, pemerintah Kazakhstan juga percaya pemerataan ekonomi lebih mudah dilakukan dengan pemindahan ibu kota karena adanya perpindahan tenaga kerja dari seluruh provinsi.

Akhirnya terpilih Astana (sebelumnya bernama Akmola dan kini Nur-Sultan) sebagai lokasi ibu kota baru yang kemudian disahkan Dewan Agung Kazakhstan pada 1994. Akmola saat itu memenuhi semua syarat sebagai lokasi ibu kota baru, antara lain letak yang strategis, relatif lebih tahan dari ancaman bencana alam, pasokan air dan makanan yang memadai, serta ketersediaan ruang yang memungkinkan pengembangan kota. Pemindahan dilakukan bertahap hingga secara garis besar rampung pada 2000. Sejak saat itu, secara bertahap seluruh badan pemerintahan pindah ke Akmola yang kemudian berubah nama menjadi Astana dan kini Nur-Sultan. Kemudian, pada Maret 2018, Nur-Sultan kali pertama masuk sebagai salah satu pusat keuangan dunia berdasarkan Global Financial Centers Index di posisi 88.

²⁸ Monavia, Ayu Rizaty. (2022). *10 Kota dengan Tingkat Kriminalitas Tertinggi di Asia Tenggara, Jakarta Urutan 8*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/10/10-kota-dengan-tingkat-kriminalitas-tertinggi-di-asia-tenggara-jakarta-urutan-8>

Kemudian naik ke ranking 51 pada 2019 dan menjadi yang tertinggi di kawasan Asia Tengah dan Eropa Timur²⁹.

Proses pemindahan ibu kota negara tentu membutuhkan langkah yang kuat dan alasan mendasar untuk efektivitas fungsinya. Menurut Bab II pasal 2 ayat (2) UUD 1945, menjelaskan Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. Tidak ada pasal dalam konstitusi yang menentukan bagaimana dan di mana ibu kota negara diatur. Karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan isinya amandemen tidak diatur secara eksplisit, ada tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam pengaturan, termasuk pemindahan ibu kota Negara³⁰. Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev mengatakan selama kurun waktu tahun 2020-2021, tingkat kejahatan di Kazakhstan turun 30%.³¹ Meskipun demikian, supremasi hukum terus digalakkan.

2. Tindak Pidana Yang Terjadi Di Kalimantan Timur Selama Kurun Waktu 2017-2022

a. Data Tindak Pidana Kalimantan Timur Tahun 2017

1) Data lapor gangguan kamtibmas Satker dan Satwil Tahun 2017 sebagai berikut :

NO	URAIAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KKR	BTG	PSR	BRU	BUL	NNK	KTM	MLN	KBR	RES KRI MUM	RS KO BA	POL AIR	KRI MS US	JML	
A.	KEJAHATAN KONVENSIONAL																			
01	TTHD KETERTIBAN UMUM	0	103	478	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583
02	MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORG/BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	SENGAJA MENIMBULKAN KEBAKARAN/ BANJIR (PEMBAKARAN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
04	KARENA ALPA MENIMBULKAN KEBAKARAN/MELETUS/BANJIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	MEMBERI SUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	10
07	PEMALSUAN TTD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

²⁹ Fitriyanti, Azizah. (2019). *Dari Almaty ke Nur-Sultan, ibu kota baru Kazakhstan yang jadi legasi*. <https://www.antaraneews.com/berita/987420/dari-almaty-ke-nur-sultan-ibu-kota-baru-kazakhstan-yang-jadi-legasi>

³⁰ Yahya, H. M. (2018). *Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera*. 14(01), 21–30. <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.kemerdekaan>

³¹ Karta Raharja, Ucu. (2021). *Presiden Kazakhstan: Rakyat Bebas Mengkritik Pemerintah*. <https://www.republika.co.id/berita/qos28u282/presiden-kazakhstan-rakyat-bebas-mengkritik-pemerintah>

08	PEMALSUAN SURAT	0	9	3	0	8	0	0	7	0	1	2	2	0	47	0	0	0	79
09	PERJINAHAN	0	4	9	0	1	0	2	0	0	5	0	8	0	1	0	0	0	30
10	PERKOSAAN	0	3	1	3	3	0	0	4	1	0	1	1	0	0	0	0	0	17
11	PERMAINAN JUDI	11	55	27	6	7	6	2	3	2	7	11	0	2	5	0	0	0	144
12	PENGHINAAN	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	8
13	PENCULIKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PERBUATAN YANG TDK. MENYENANGKAN	0	0	5	0	11	0	0	1	2	2	3	1	1	4	0	0	0	30
15	KEJ. THDP JIWA ORG/PMBUNUHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PENGANIAYAAN BERAT	13	261	124	2	0	13	0	16	0	26	2	6	8	0	0	0	0	471
17	MENGAKIBATKAN ORG MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
18	MENGAKIBATKAN ORANG LUKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PENCURIAN BIASA	18	121	85	28	110	2	32	6	21	5	40	0	24	31	0	0	0	523
20	PENCURIAN DG PEMBERATAN	9	232	226	55	61	45	31	44	52	57	9	0	17	1	0	5	0	844
21	PENCURIAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
22	PENCURIAN DGN KEKERASAN	4	15	48	24	12	8	8	2	12	3	2	1	0	0	0	0	0	139
23	PERAS/ANCAM	1	61	9	1	13	1	1	2	2	6	1	2	1	5	0	0	0	106
24	PENGGELAPAN	0	296	53	15	39	6	18	9	4	3	13	6	3	41	0	1	1	508
25	PENIPUAN/PERBUATAN CURANG	8	101	65	12	22	9	3	5	4	7	8	8	2	125	0	0	2	381
26	MENGHANCURKAN / MERUSAK BRG	0	25	14	2	14	0	1	6	0	3	3	2	2	0	0	0	0	72
27	MENERIMA SUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
28	PENADAHAN	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1	0	0	0	0	4
29.	MEMPEKERJAKAN ANAK DIBWH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	KEKERASAN DLM RMH TANGGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	PENYALAHGUNAA N SENPI/HANDAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
32.	KEJ.NARKOTIKA (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NNK	KTM	MLN	KBR	RES KRI MUM	RS KO BA	POL AIR	RES KRI MSUS	JML
33.	KEJ. PSIKOTROPIKA (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	TERORISME (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	PERAMPOKAN/PEMBAJAKAN (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	PERDAGANGAN MANUSIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	HKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	PENCUCIAN UANG/MONEY LAUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	KEJ. DUNIA MAYA CYBERCRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	KEJAHATAN PASAR MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	CURANMOR R2	14	383	271	41	102	20	67	24	25	16	37	14	22	10	0	0	0	1046
43.	CURANMOR R4	0	10	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
44.	CURAS SENPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
45.	CURAS SAJAM	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
46.	OBAT KERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	PEMILIKAN SENPI ILEGAL/HANDAK	0	0	1	0	2	1	0	4	1	1	0	1	0	1	0	1	0	13
48.	PENGEROYOKAN	1	98	79	7	25	9	6	8	2	3	8	0	6	2	0	0	0	254

49.	SAJAM	1	47	20	11	13	4	4	4	2	2	3	4	4	5	0	0	0	124
50.	UANG PALSU	1	0	1	0	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
51.	PEMBUNUHAN	0	7	6	1	2	1	3	4	1	0	5	1	1	3	0	0	0	35
52.	PORNOGRAFI	0	5	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	
53.	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.	PERBANKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55.	P O A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56.	PROD & DAGANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57.	SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58.	CURWAT TLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59.	CURI KAYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60.	PEMBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61.	KENAKALAN RMJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62.	KARA KONEKSITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63.	LAKA KERJA	1	0	1	0	4	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	10
64.	LAKA LAUT/AIR	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
65.	LAKA UDARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66.	ABORSI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
67.	MIRAS	0	1	0	0	20	0	0	21	0	4	0	0	1	1	0	1	0	49
68.	THDP NEG SHBT KEPALA SHBT & WKLNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69.	THDP KEWJBAN DAN HAK KENEGARAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

NO	URAIAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NNK	KTM	MLN	KBR	RES KRI MU	RS KO BA	POL AIR	RES KRI MS US	JML
70.	THDP ASAL USUL DAN PERKAWINAN	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4
71.	MERSK, GAR KESOPANAN/KESS LAAN DI MK UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	PENCURIAN DLM LINGKUNGAN KELUARGA	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
73.	MERUGIKAN PEMIUTANG/ORG YG BERHAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	MENGHANCURKAN ATAU MERUSAK BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	PENERBITAN DAN PERCETAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	LAKA LANTAS (TANPA KORBAN MANUSIA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	LAKA LANTAS KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	LAKA LANTAS	41	171	112	45	171	58	107	47	37	18	71	13	86	0	0	0	0	977
79.	LAKA LAUT KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80.	LAKA UDARA KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81.	LEDAKAN BOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82.	PENEMBAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83.	KEJAHATAN KONVENSIONAL LAINNYA	0	7	18	4	3	0	3	0	0	7	0	0	0	14	0	0	0	56
84.	PREMANISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85.	GUL POK ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86.	GUL POK RADIKAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87.	CABUL	0	31	34	3	0	2	10	2	1	15	24	0	0	2	0	0	0	124
88.	TKI ILLEGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6
89.	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90.	UNJUK RASA AMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91.	UNJUK RASA RAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92.	JUMLAH	125	2052	1712	264	647	190	298	223	169	209	248	75	181	310	0	9	3	6715

NO	URAIAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NNK	KTM	MLN	KBR	RES KRIM MUM	RSK OBA	POL AIR	RES KRIM SUS	JML
B	KEJ. TRANS NASIONAL																		
01	NARKOTIKA	52	408	276	260	252	81	72	107	234	177	122	180	67	0	192	6	0	2486
02	TERORISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	PEROMPAKAN/PE MBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	PERDAGANGAN MANUSIA/TRAFFIC KING IN PERSON	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	5
05	PENCUCIAN UANG / MONEY LOUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
06	KEJ DUNIA MAYA / CYBER CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	LUNDUP DAN PERDAGANGAN SENPI / ARM SMUGLING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	KEJ. EKONOMI LINTAS NEGARA / TRANS ECONOMY CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PSIKOTROPIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KEJ TRANS NASIONAL LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	52	408	276	262	253	81	72	107	235	177	122	180	67	1	192	6	6	2497

NO	URAIAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NNK	KTM	MLN	KBR	RES KRIM MUM	RSK KO BA	POL AIR	RES KRIM SUS	JML
C	KEJ THDP KEKAYAAN NEGARA																		
01	KORUPSI	1	2	1	1	0	2	0	3	1	4	3	0	0	0	0	0	6	24
02	ILLEGAL LOGGING	19	1	6	5	7	0	0	5	1	2	9	0	16	0	0	2	0	73
03	ILLEGAL FISHING	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	17	0	20
04	ILLEGAL MINING	0	1	0	1	5	0	0	1	3	0	0	2	0	0	0	2	0	15
05	LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
06	UU PANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
07	BBM ILLEGAL	4	2	3	1	8	7	6	11	0	0	3	0	1	0	0	4	1	51
08	UU PERKEBUNAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
09	IT	0	0	1	5	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	13	24
10	PERBANKAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
11	PERLINDUNGAN KONSUMEN	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
12	KARANTINA	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	1	0	8
13	UU PENYIARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
14	UU KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
15	PERTAMBANGAN	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0	10	0	0	1	0	0	6	24
16	UU KEPABEANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	PERDAGANGAN	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	2	6
18	PENYELUNDUPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
19	HAKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
20	BUDIDAYA TANAMAN	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
20	PEL WIL PERAIRAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
21	KEJAHATAN THDP.KEKAYAAN NEGARA LAINNYA	0	0	0	1	0	0	0	4	3	2	0	0	0	0	0	0	2	12
	J U M L A H	25	7	12	18	28	9	8	27	16	10	26	6	17	1	0	30	49	289

NO	URAIAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NNK	KTM	MLN	KBR	RES KRI MUM	RSK OBA	POL AIR	RES KRIM SUS	JML
D	KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTIJENSI																		
01	KONFLIK SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	SEPARATISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	THDP. KEAMANAN NEGARA/MAKAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	THDP MARTABAT KEDUDUKAN PRES/WAPRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	KONFLIK OKNUM TNI- POLRI/KONFLIK APARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	BENTROK MASSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	PEMOGOKAN BURUH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	UNJUK RASA ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PERKELAHIAN PELAJAR/MAHASIS WA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PERKELAHIAN TANDING SATU LAWAN SATU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTINJENSI LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NNK	KTM	MLN	KBR	RES KRI MUM	RSK OBA	POL AIR	RES KRIM SUS	JML
E	PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIAN(HAM)																		
01	PELANGGARAN HAM BERAT (GENOCIDE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	PEMBUNUHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	PEMUSNAHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	PENGUSIRAN ATAU PEMINDAHAN PENDUDUK SECARA PAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	PERAMPASAN KEMERDEKAAN/KE BEBASAN FISIK LAIN SECARA SEWENANG- WENANG YG MELANGGAR KETENTUAN POKOK HUKUM INTERNASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	PENYIKSAAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	PERKOSAAN,PERB UDAKAN SEKSUAL,PELACU RAN SECARA PAKSA, STERILISASI SECARA PAKSA DLM. BENTUK KEKERASAN SEKSUAL YG SETARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08	PENGANIYAA N THDP SUAT U KELOMPOK TERTENTU YG DIDASARI PERSAMAAN PAHAM POLITIK,RAS,KEBA NGSAAN,ETNIS,BU DAYA,AGAMA,JNS KELAMIN/ALASAN LAIN YG TLH DIAKUI SECARA YUNIVERSAL SBG HAL YG DILARANG MENURU HUKUM INTERNASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KEJAHATAN APARTHEID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	TORTURE (PENGANIYAA N OLEH APARAT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PELANGGARAN DLM HAL PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KEKERASAN DLM RUMAH TANGGA	1	75	18	12	18	5	3	3	2	3	1	0	0	3	0	0	0	144
14	PELANGGARAN HAM THDP ANAK	6	72	17	24	44	20	9	24	18	0	2	0	16	6	0	0	0	258
15	PELANGGARAN HAM LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	7	147	35	36	62	25	12	27	20	3	3	0	16	9	0	0	0	402
NO	URAIAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NNK	KTM	MLN	KBR	RES KRI MUM	RSK OBA	POL AIR	RES KRIM SUS	JML
F	PELANGGARAN HUKUM NON.PIDANA																		
1	BEJALAN DI ATAS JALAN UMUM ATAU TROTOAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEMINTA-MINTA DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BANGUNAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RUMAH MAKAN/RESTORA N TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TEMPAT HIBURAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	AGRARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PELANGGARAN HUKUM NON PIDANA LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NNK	KTM	MLN	KBR	RES KRI MUM	RSK OBA	POL AIR	RES KRIM SUS	JML
G	PELANGGARAN HUKUM PIDANA																		
1	MENGGANGGU KETENTRAMAN DGN. MEMBERIKAN TERIAKAN ISYARAT PALSU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MENGGANGGU RAPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3	MEMBUAT GADUH PERTEMUAN AGAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	TENTANG MERINTANGI JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEMBUAT GADUH DI SIDANG PENGADILAN NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MERUSAK SURAT MAKLUMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KEALPAAN HINGGA BARANG SITAAN HILANG (RUSAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	KEALPAAN YG. MENIMBULKAN RUSAKNYA MATERAI(SEGEL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PENGANIYAAAN THDP BINATANG SENGJA MEMBUAT SAKIT,CACAT, MERUSAK KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	MEMBAWA HEWAN DGN PAS LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	PENGHINAAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PENGHINAAN DGN TULISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KARENA SALAHNYA ORANG MENJADI TERTAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PENGANIYAAAN RINGAN	2	28	45	27	62	1	17	0	16	0	18	7	13	3	0	0	0	239
15	PENCURIAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NNK	KTM	MLN	KBR	RES KRI MUM	RSK OBA	POL AIR	RES KRIM SUS	JML
16	PENGGELAPAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	PENIPUAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	PENIPUAN THDP PEMBELI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PENGRUSAKAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	KARENA SALAHNYA MERUSAK PEKERJAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KENAKALAN THDP ORANG ATAU BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	MENINGGALKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MENJAGA ORANG GILA/ANAK-ANAK SEHINGGA MEMBAHAYAKAN ORANG GILA DAN ANAK TSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	MABUK DI TEMPAT UMUM SEHINGGA MENGGANGGU KETERTIBAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	DGN MELAWAN HAK MERINTANGI KEMREDEKAAN BERGERAK DI JALAN UMUM(MERINTANGI KAWANNYA UNTUK DIAJAK MOGOK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25	PERBUATAN YG DPT MERUGIKAN,MENY USAHKAN DAN MENDATANGKAN BAHAYA LALIN DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	TANPA IJIN DARI POLRI MEMASANG PERANGKAP BINATANG BUAS YANG DPT MEMBAHAYAKAN ORANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	TANPA IJIN POLRI MEMBAKAR GEDUNG ATAU RUMAH SENDIRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	MAMASANG API DI TEPI JALAN UMUM/DEKAT RUMAH YANG DPT MENDATANGKAN BAHAYA KEBAKARAN/KECE LAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	MENJUAL, MENAWARKAN MAKANAN ATAU MINUMAN YANG SUDAH RUSAK SEHINGGA DPT MERUSAK KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	MEMBUAT RIUH/INGAR PADA WAKTU MALAM MEMBUAT TIDUR TERGANGGU, MEM BUAT RIUH WAKTU ADA IBADAH/SEDANG PENGADILAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NNK	KTM	MLN	KBR	RES KRI MUM	RSK OBA	POL AIR	RES KRIM SUS	JML
31	MINTA-MINTA DI TEMPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	GELANDANGAN / TDK MEMPUNYAI MATA PENCAHARIAN MENGEMBARA KE MANA-MANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	TDK BERHAK MEMAKAI GELAR BANGSAWAN BINTANG ATAU TANDA KEHORMATAN NEGERA RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	DI TEMPAT UMUM TIDAK BERHAK MEMAKAI PAKAIAN PEGAWAI NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	TANPA IJIN POLRI(PEGAWAI NEGERI YG BERHAK), MENGADAKAN PESTA UMUM DAN PAWAI DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	TDK MENURUT PERINTAH PETUNJUK POLRI PADA WAKTU ADA PESTA/ARAK- ARAKAN DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37	SEBAGAI MATA PENCAHARIAN MENJALANKAN PEKERJAAN DOKTER GIGI DENGAN TIDAK MEMPUNYAI SURAT IJIN DAN DALAM KEADAAN YANG TIDAK MEMAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	LALAI TIDAK MEMBERITAHUKAN KEPADA KEPALA DESA ATAS KEPINDAHANNYA. LALAI MEMBERITAHU KPD KEPALA DESA STLH 14 HARI TINGGAL DI DAERAH TSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	LOSMEN, HOTEL PENGINAPAN YG PEMILIKNYA : (A) TDK MENGADAKAN BUKU TAMU (B) LALAI TDK MELAPORKAN/ME MPERLIHATKAN BUKU TAMU KEPADA POLRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	TDK DATANG SETELAH DIPANGGIL MENURUT UNDANG-UNDANG, UTK MENJADI SAKSI, AHLI / JURU BAHASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NNK	KTM	MLN	KBR	RES KRI MUM	RSK OBA	POL AIR	RES KRIM SUS	JML
41	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN YG DIMINTA KUASA HUKUM (CQ.POLRI) THDP BAHAYA BAGI KEAMANAN UMUM/BARANG / ORG SEDANG BERBUAT KEJAHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN THDP ORANG DI DLM KEADAAN BAHAYA MAUT, SEDANGKAN PERTOLONGAN TERSEBUT TDK MEMBAHAYAKAN DIRINYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	DIMUKA UMUM : MENYANYIKAN LAGU-LAGU, PIDATO, MENGADAKAN GAMBAR/TULISAN YG MELANGGAR KESOPANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	NYATA MABUK/KENTARA MABUK DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	MEMAKAI BINATANG UNTUK PEKERJAAN YG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	TERLAMPAU BERAT, MEMAKAI BINATANG YG CACAT, PINCANG, LUKA, HAMIL UTK PEKERJAAN SESUATU DGN KEADAANNYA																		
46	MENJUAL, MENAWARKAN, MEMBAGIKAN, MENYERAHKAN BENDA JIMAT/PENANGKAL DENGAN DALIH BENDA TRSB ADA KESAKTIANNYA. MENGAJARKAN ILMU/KEPANDAIAAN SHG MENIMBULKAN KEPERCAYAAN TERHINDAR DARI BAHAYA APABILA MELAKUKAN TINDAK PIDANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	MEMBIARKAN TERNAKNYA YG BERSAYAP BERJALAN DI TANAH YG SUDAH DITABURI/DITANAMI DENGAN MELAWAN HAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	DGN TIADA BERHAK MEMBIARKAN TERNAKNYA BERJALAN DI TANAH YG SUDAH DITABURI/DITANAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NNK	KTM	MLN	KBR	RES KRI MUM	RSK OBA	POL AIR	RES KRIM SUS	JML
49	MENINGGALKAN ORANG YG PERLU DITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	MEMBUKA RAHASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	PELAYARAN DAN PENERBANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	TTG KAM UMUM BG ORG.BRG DAN KES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	TTG KETERTIBAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	TTG PENGUASA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	TTG ASAL USUL DAN PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	TTG ORG YG PERLU DITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	TTG KESUSILAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	TTG TANAH/TANAMAN/ PEKARANGAN	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	2	9	0	0	0	17
59	JABATAN	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	19
60	PELAYARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
JUMLAH		2	29	60	29	62	2	17	0	16	0	18	8	15	17	0	1	0	276

NO	URAIAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NNK	KTM	MLN	KBR	RES KRI MUM	RSK OBA	POL AIR	RES KRIM SUS	JML
H	GANGGUAN THDP. ORANG																		
1	PENEMUAN MAYAT	5	0	6	3	1	0	0	7	3	3	2	0	1	0	0	0	0	31
2	BUNUH DIRI	1	0	0	1	2	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	8
3	TEMU BAYI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEMBUNYIKAN AUDIO BERLEBIHAN/KERAS / BISING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	GANGGUAN THDP ORANG LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		6	0	7	4	3	0	1	8	3	5	2	0	1	0	0	0	0	40

NO	URAIAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NNK	KTM	MLN	KBR	RES KRI MUM	RSK OBA	POL AIR	RES KRIM SUS	JML
I	GANGGUAN THDP. BARANG																		
1	KEBAKARAN	9	37	12	0	2	1	0	4	5	0	11	1	1	0	0	0	0	83
2	KEHILANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	GANGGUAN THDP BARANG LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TANAH LONGSOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		9	37	12	0	2	1	0	4	5	0	11	1	1	0	0	0	0	83

NO	URAIAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NNK	KTM	MLN	KBR	RES KRI MUM	RSK OBA	POL AIR	RES KRIM SUS	JML
J	GANGGUAN THDP HEWAN																		
1	MEMBUNUH HEWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NNK	KTM	MLN	KBR	RES KRI MUM	RSK OBA	POL AIR	RES KRIM SUS	JML
K	BENCANA																		
1	TANAH LONGSOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ANGIN PUTING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) Data penyelesaian gangguan kamtibmas Saker / Satwil Tahun 2017 sebagai berikut :

NO	URAIAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NNK	KTM	MLN	KBR	RES KRI MUM	RS KO BA	POL AIR	RES KRIS US	JML
A. KEJAHATAN KONVENSIONAL																			
01	TTHD KETERTIBAN UMUM	0	98	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576
02	MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORG/BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	SENGAJA MENIMBULKAN KEBAKARAN/ BANJIR (PEMBAKARAN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0	6
04	KARENA ALPA MENIMBULKAN KEBAKARAN/MELETUS/BANJIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	MEMBERI SUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	SUMPAAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	9
07	PEMALSUAN TTD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	PEMALSUAN SURAT	0	5	5	0	4	0	0	0	0	0	1	2	0	23	0	0	0	40
09	PERJINAHAN	0	3	2	0	1	0	2	0	1	4	0	7	0	1	0	0	0	21
10	PERKOSAAN	0	2	0	0	3	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	9
11	PERMAINAN JUDI	10	55	30	0	7	6	2	2	3	13	7	0	3	5	0	0	0	143
12	PENGHINAAN	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	8
13	PENCULIKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PERBUATAN YANG TDK. MENYENANGKAN	1	0	0	0	7	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	12
15	KEJ. THDP JIWA ORG/PMBUNUHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PENGANIAYAAN BERAT	8	197	88	0	0	13	0	11	0	18	0	7	7	0	0	0	0	349
17	MENGAKIBATKAN ORG MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
18	MENGAKIBATKAN ORANG LUKA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
19	PENCURIAN BIASA	12	79	72	4	68	2	15	3	6	4	26	6	17	21	0	0	0	335
20	PENCURIAN DG PEMBERATAN	4	136	97	0	35	36	13	39	35	32	3	3	9	2	0	5	0	449
21	PENCURIAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
22	PENCURIAN DGN KEKERASAN	2	14	15	6	5	8	4	2	9	1	1	1	0	0	0	0	0	68
23	PERAS/ANCAM	1	44	12	0	12	1	1	2	1	5	1	1	1	3	0	0	0	85
24	PENGGELAPAN	0	148	32	1	28	5	9	3	3	1	10	4	2	26	0	1	1	274
25	PENIPUAN/PERBUATAN CURANG	8	67	27	0	12	6	2	3	1	2	5	3	2	41	0	0	1	180
26	MENGHANCURKAN / MERUSAK BRG	0	14	13	1	8	0	0	6	0	0	0	1	1	0	0	0	0	44
27	MENERIMA SUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
28	PENADAHAN	3	22	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	32
29.	MEMPEKERJAKAN ANAK DIBWH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	KEKERASAN DLM RMH TANGGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	PENYALAHGUNAA N SENPI/HANDAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
32.	KEJ.NARKOTIKA (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	KEJ. PSIKOTROPIKA (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	TERORISME (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO	URAIAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NNK	KTM	MLN	KBR	RES KR IMU M	RS KO BA	POL AIR	RES KRIS MS US	JML
35.	PERAMPOKAN/PEMBAJAKAN (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36.	PERDAGANGAN MANUSIA /TRAFFICKING IN PERSON (DLM.NEG/LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	HKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	PENCUCIAN UANG/MONEY LAUNDRY (DLM.NEG/LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	KEJ. DUNIA MAYA CYBERCRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	KEJAHATAN PASAR MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	CURANMOR R2	7	212	78	6	36	14	31	17	3	14	32	9	13	16	0	0	0	488
43.	CURANMOR R4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
44.	CURAS SENPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
45.	CURAS SAJAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	OBAT KERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	PEMILIKAN SENPI ILEGAL/HANDAK	0	0	0	0	0	1	0	4	1	1	0	1	0	0	0	1	0	9
48.	PENGEROYOKAN	1	69	50	3	22	8	6	6	2	0	6	0	4	3	0	0	0	180
49.	SAJAM	1	46	25	0	13	4	4	4	1	1	3	5	3	5	0	0	0	115
50.	UANG PALSU	1	0	3	0	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
51.	PEMBUNUHAN	0	8	5	0	0	1	4	3	1	0	4	0	2	4	0	0	0	32
52.	PORNOGRAFI	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6
53.	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	PERBANKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	P O A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	PROD & DAGANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	CURWAT TLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	CURI KAYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	PEMBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	KENAKALAN RMJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	KARA KONEKSITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	LAKA KERJA	1	0	1	0	4	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	11
64.	LAKA LAUT/AIR	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
65.	LAKA UDARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	ABORSI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
67.	MIRAS	0	1	0	0	20	0	0	21	0	4	0	0	0	1	0	1	0	48
68.	THDP NEG SHBT KEPALA SHBT & WKLNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	THDP KEWJBAN DAN HAK KENEGARAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	THDP ASAL USUL DAN PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
71.	MERSK, GAR KESOPANAN/KESS LAAN DI MK UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NNK	KTM	MLN	KBR	RES KR IMU M	RS KO BA	POL AIR	RES KRIMSUS	JML
72.	PENCURIAN DLM LINGKUNGAN KELUARGA	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
73.	MERUGIKAN PEMIUTANG/ORG YG BERHAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	MENGHANCURKAN ATAU MERUSAK BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	PENERBITAN DAN PERCETAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	LAKA LANTAS (TANPA KORBAN MANUSIA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	LAKA LANTAS KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	LAKA LANTAS	43	118	112	48	146	70	73	34	9	6	73	13	88	0	0	0	0	833
79.	LAKA LAUT KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80.	LAKA UDARA KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81.	LEDAKAN BOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82.	PENEMBAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83.	KEJAHATAN KONVENSIONAL LAINNYA	0	3	16	2	3	0	0	0	0	7	0	0	0	9	0	0	0	40
84.	PREMANISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85.	GUL POK ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86.	GUL POK RADIKAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87.	CABUL	0	35	20	0	0	2	8	0	0	0	27	2	0	1	0	0	0	95
88.	TKI ILLEGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6
89.	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90.	UNJUK RASA AMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91.	UNJUK RASA RAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92.	JUMLAH	103	1392	1189	71	437	182	174	163	78	128	205	73	154	177	0	9	2	4537

NO	URAIAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NNK	KTM	MLN	KBR	RES KRIM MUM	RSK OBA	POL AIR	RES KRIMSUS	JML
B	KEJ. TRANS NASIONAL																		
01	NARKOTIKA	39	408	231	137	252	81	73	84	261	172	122	180	57	0	161	3	0	2261
02	TERORISME	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
03	PEROMPIKAN/PE MBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	PERDAGANGAN MANUSIA/TRAFFIC KING IN PERSON	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	3
05	PENCUCIAN UANG / MONEY LAUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
06	KEJ DUNIA MAYA / CYBER CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	LUNDUP DAN PERDAGANGAN SENPI / ARM SMUGLING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	KEJ. EKONOMI LINTAS NEGARA / TRANS ECONOMY CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PSIKOTROPIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KEJ TRANS NASIONAL LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	39	409	231	137	252	81	73	84	262	172	122	180	57	2	161	3	5	2270

NO	URAIAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NNK	KTM	MLN	KBR	RES KR IMU M	RS KO BA	POL AIR	RES KRI MSU S	JML
C	KEJ THDP KEKAYAAN NEGARA																		
01	KORUPSI	1	2	1	0	0	2	0	1	0	2	4	0	1	0	0	0	9	23
02	ILLEGAL LOGGING	16	1	6	0	7	0	0	4	3	2	3	0	14	0	0	2	0	58
03	ILLEGAL FISHING	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	17	0	21
04	ILLEGAL MINING	0	1	0	0	5	0	0	1	18	0	0	2	0	0	0	0	3	30
05	LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
06	KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
07	BBM ILLEGAL	6	2	3	0	8	7	6	2	0	0	2	0	1	0	0	4	1	42
08	UU PERKEBUNAN	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
09	IT	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8
10	PERBANKAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4
11	PERLINDUNGAN KONSUMEN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12	KARANTINA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	4
13	UU PANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	4
14	PENYIARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
15	PERTAMBANGAN	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	11
16	UU KEPABEANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	UU PERINDUSTRIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	PENYELUNDUPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
19	HAKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
20	PALSU PRODUK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	BUDIDAYA TANAMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8	9
22	KEJAHATAN THDP.KEKAYAAN NEGARA LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	2	0	0	0	0	2	9
JUMLAH		24	6	13	0	28	9	9	12	28	5	14	6	16	1	0	28	43	242

NO	URAIAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NNK	KTM	MLN	KBR	RES KRI MUM	RSK OBA	POL AIR	RES KRI MSU S	JML
D	KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTIJENSI																		
01	KONFLIK SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	SEPARATISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	THDP. KEAMANAN NEGARA/MAKAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	THDP MARTABAT KEDUDUKAN PRES/WAPRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	KONFLIK OKNUM TNI-POLRI/KONFLIK APARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	BENTROK MASSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	PEMOGOKAN BURUH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	UNJUK RASA ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PERKELAHIAN PELAJAR/MAHASISWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PERKELAHIAN TANDING SATU LAWAN SATU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTINJENSI LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NNK	KTM	MLN	KBR	RES KRI MUM	RSK OBA	POL AIR	RES KRI MSU S	JML
E	PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA(HAM)																		
01	PELANGGARAN HAM BERAT (GENOCIDE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	PEMBUNUHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	PEMUSNAHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	PENGUSIRAN ATAU PEMINDAHAN PENDUDUK SECARA PAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	PERAMPASAN KEMERDEKAAN/KE BEBASAN FISIK LAIN SECARA SEWENANG-WENANG YG MELANGGAR KETENTUAN POKOK HUKUM INTERNASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	PENYIKSAAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	PERKOSAAN,PERBUDAKAN SEKSUAL,PELACURAN SECARA PAKSA,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	PENGANIYAAAN THDP SUATU POK TERTENTU YG DIDASARI PERSAMAAN PAHAM POLITIK,RAS,KEBANNGSAAN,ETNIS,BU DAYA,AGAMA,JNS KELAMIN/ALASAN LAIN YG TLH DIAKUI SECARA YUNIVERSAL SBG HAL YG DILARANG MENURU HUKUM INTERNASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KEJAHATAN APARTHEID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	TORTURE (PENGANIYAAAN OLEH APARAT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PELANGGARAN DLM HAL PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KEKERASAN DLM RUMAH TANGGA	1	60	6	1	17	5	3	2	0	4	0	0	2	3	0	0	0	104
14	PELANGGARAN HAM THDP ANAK	7	52	4	1	37	19	9	20	17	0	0	0	9	5	0	0	0	180
15	PELANGGARAN HAM LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		8	112	10	2	54	24	12	22	17	4	0	0	11	8	0	0	0	284

NO	URAIAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NNK	KTM	MLN	KBR	RES KRI MUM	RSK OBA	POL AIR	RES KRI MSU S	JML
F	PELANGGARAN HUKUM NON.PIDANA																		
1	BEJLAN DI ATAS JALAN UMUM ATAU TROTOAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEMINTA-MINTA DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BANGUNAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RUMAH MAKAN/RESTORAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TEMPAT HIBURAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	AGRARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PELANGGARAN HUKUM NON PIDANA LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NNK	KTM	MLN	KBR	RES KRI MUM	RSK OBA	POL AIR	RES KRI MSU S	JML
G	PELANGGARAN HUKUM PIDANA																		
1	MENGANGGU KETENTRAMAN DGN. MEMBERIKAN TERIAKAN ISYARAT PALSU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MENGANGGU RAPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MEMBUAT GADUH PERTEMUAN AGAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	TENTANG MERINTANGI JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEMBUAT GADUH DI SIDANG PN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MERUSAK SURAT MAKLUMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KEALPAAN HINGGA BARANG SITAAN HILANG (RUSAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	KEALPAAN YG. MENIMBULKAN RUSAKNYA MATERAI(SEGEL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PENGANIYAAAN THDP BINATANG SENGAJA MEMBUAT SAKIT,CACAT, MERUSAK KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	MEMBAWA HEWAN DGN PAS LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	PENGHINAAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PENGHINAAN DGN TULISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KARENA SALAHNYA ORG MENJADI ERTAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PENGANIYAAAN RINGAN	4	13	23	3	55	1	15	0	9	0	14	0	8	6	0	0	0	151
15	PENCURIAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16	PENGGELAPAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	PENIPUAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NO	URAIAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NNK	KTM	MLN	KBR	RES KRI MUM	RSK OBA	POL AIR	RES KRIM SUS	JML
18	PENIPUAN THDP PEMBELI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	PENGRUSAKAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	KARENA SALAHNYA MERUSAK PEKERJAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	KENAKALAN THDP ORANG ATAU BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	MENINGGALKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MENJAGA ORANG GILA/ANAK-ANAK SEHINGGA MEMBAHAYAKAN ORANG GILA DAN ANAK TSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	MABUK DI TEMPAT UMUM SEHINGGA MENGGANGGU KETERTIBAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	DGN MELAWAN HAK MERINTANGI KEMREDEKAAN BERGERAK DI JALAN UMUM(MERINTANGI KAWANNYA UNTUK DIAJAK MOGOK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	PERBUATAN YG DPT MERUGIKAN,MENY USAHKAN DAN MENDATANGKAN BAHAYA LALIN DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	TANPA IJIN DARI POLRI MEMASANG PERANGKAP BINATANG BUAS YANG DPT MEMBAHAYAKAN ORANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	TANPA IJIN POLRI MEMBAKAR GEDUNG ATAU RUMAH SENDIRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	MAMASANG API DI TEPI JALAN UMUM/DEKAT RUMAH YANG DPT MENDATANGKAN BAHAYA KEBAKARAN/KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	MENJUAL, MENAWARKAN MAKANAN ATAU MINUMAN YANG SUDAH RUSAK SEHINGGA DPT MERUSAK KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	MEMBUAT RIUH PADA WAKTU MALAM /WAKTU ADA IBADAH/SEDANG PENGADILAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	MINTA-MINTA DI TEMPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	GELANDANGAN / TDK MEMPUNYAI MATA PENCAHARIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

MENGEMBARA KE MANA-MANA																			
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NO	URAIAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NNK	KTM	MLN	KBR	RES KRI MUM	RSK OBA	POL AIR	RES KRIM SUS	JML
33	TDK BERHAK MEMAKAI GELAR BANGSAWAN BINTANG ATAU TANDA KEHORMATAN NEGERA RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	DI TEMPAT UMUM TIDAK BERHAK MEMAKAI PAKAIAN PEGAWAI NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	TANPA IJIN POLRI (PEGAWAI NEGERI YG BERHAK), MENGADAKAN PESTA UMUM DAN PAWAI DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	TDK MENURUT PERINTAH PETUNJUK POLRI PADA WAKTU ADA PESTA/ARAK-ARAKAN DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	SEBAGAI MATA PENCAHARIAN MENJALANKAN PEKERJAAN DOKTER GIGI DENGAN TIDAK MEMPUNYAI SURAT IJIN DAN DALAM KEADAAN YANG TIDAK MEMAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	LALAI TIDAK MEMBERITAHUKAN KEPADA KEPALA DESA ATAS KEPINDAHANNYA . LALAI MEMBERITAHU KPD KEPALA DESA STLH 14 HARI TINGGAL DI DAERAH TSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	LOSMEN, HOTEL PENGINAPAN YG PEMILIKNYA : (A) TDK MENGADAKAN BUKU TAMU (B) LALAI TDK MELAPORKAN/MEMPERLIHATKAN BUKU TAMU KEPADA POLRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	TDK DATANG SETELAH DIPANGGIL MENURUT UNDANG-UNDANG, UTK MENJADI SAKSI, AHLI / JURU BAHASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

41	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN YG DIMINTA KUASA HUKUM (0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN THDP ORANG DI DLM KEADAAN BAHAYA MAUT, SEDANGKAN PERTOLONGAN TERSEBUT TDK MEMBAHAYAKAN DIRINYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NNK	KTM	MLN	KBR	RES KRI MU M	RSK OBA	POL AIR	RES KRIM SUS	JML
43	DIMUKA UMUM : MENYANYIKAN LAGU-LAGU, PIDATO, MENGADAKAN GAMBAR/TULISAN YG MELANGGAR KESOPANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	NYATA MABUK/KENTARA MABUK DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	MEMAKAI BINATANG UNTUK PEKERJAAN YG TERLAMPAU BERAT, MEMAKAI BINATANG YG CACAT, PINCANG, LUKA, HAMIL UTK PEKERJAAN SESUATU DGN KEADAANNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	MENJUAL, MENAWARKAN, MEMBAGIKAN, MENYERAHKAN BENDA JIMAT DENGAN DALIH BENDA TRSB ADA KESAKTIANNYA. MENGAJARKAN ILMU/KEPANDAIAAN SHG MENIMBULKAN KEPERCAYAAN TERHINDAR DARI BAHAYA APABILA MELAKUKAN TINDAK PIDANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	MEMBIARKAN TERNAKNYA YG BERSAYAP BERJALAN DI TANAH YG SUDAH DITABURI DGN MELAWAN HAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	DGN TIADA BERHAK MEMBIARKAN TERNAKNYA BERJALAN DITANAH YG SUDAH DITANAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	MENINGGALKAN ORANG YG PERLU DITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	MEMBUKA RAHASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	PELAYARAN DAN PENERBANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

52	TTG KAM UMUM BG ORG.BRG DAN KES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	TTG KETERTIBAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	TTG PENGUASA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	TTG ASAL USUL DAN PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	TTG ORG YG PERLUDITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	TTG KESUSILAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	TTG TANAH/TANAMAN/ PEKARANGAN	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	22
59	JABATAN	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	22
60	PELAYARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		4	16	43	3	57	1	15	0	9	0	14	0	8	25	0	0	0	195
NO	URAIAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NNK	KTM	MLN	KBR	RES KRI MUM	RSK OBA	POL AIR	RESK RIMS US	JML
H	GANGGUAN THDP. ORANG																		
1	PENEMUAN MAYAT	5	0	2	1	0	0	2	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	14
2	BUNUH DIRI	1	0	0	0	2	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6
3	TEMU BAYI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	GANGGUAN THDP ORANG LAINNYA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		6	0	2	1	3	0	3	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	21

NO	URAIAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NNK	KTM	MLN	KBR	RES KRI MUM	RS KO BA	POL AIR	RES KRIM SUS	JML
I	GANGGUAN THDP. BARANG																		
1	KEBAKARAN	9	37	1	0	1	0	5	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	61
2	KEHILANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TAHAH LONGSOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		9	37	1	0	1	0	5	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	61

c. 10 Kasus tertinggi Tahun 2017

NO	KASUS	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TREND
		L	S	% SELRA	L	S	% SELRA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NARKOBA	2902	2438	84 %	2486	2261	90 %	T 416 (14 %)
2	CURANMOR	1372	686	50 %	1068	491	45 %	T 304 (22 %)
3	CURAT	1075	526	48 %	844	449	53 %	T 231 (21 %)
4	CURBIS	638	336	52 %	523	335	64 %	T 115 (18 %)
5	PENGGELAPAN	653	366	56 %	508	274	53 %	T 145 (22 %)
6	ANIAYA BERAT	578	463	80 %	471	349	74 %	T 107 (18 %)
7	PENIPUAN	370	226	61 %	381	180	47 %	N 11 (29 %)
8	PENGEROYOKAN	286	178	62 %	254	180	70 %	T 32 (11 %)
9	ANIRING	243	192	79 %	239	151	63 %	T 4 (16 %)
10	CURAS	111	71	63 %	139	68	48 %	N 28 (25 %)
JUMLAH		8228	5482	66 %	6913	4738	68 %	T 1315 (15 %)

b. Data Tindak Pidana Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2018

1) Data lapor gangguan kamtibmas Satker dan Satwil tahun 2018 sebagai berikut :

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
A. KEJAHATAN KONVENSIONAL															
01	TTHD KETERTIBAN UMUM	59	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465
02	MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORG/BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	SENGAJA MENIMBULKAN KEBAKARAN/ BANJIR (PEMBAKARAN)	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
04	KARENA ALPA MENIMBULKAN KEBAKARAN/MELETUS/BANJIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	MEMBERI SUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3
07	PEMALSUAN TTD	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	6
08	PEMALSUAN SURAT	5	2	1	0	0	4	2	0	0	39	0	0	2	55
09	PERJINAHAN	7	6	1	1	0	3	0	0	0	2	0	0	0	20
10	PERKOSAAN	0	1	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	7
11	PERMAINAN JUDI	23	17	5	10	4	10	1	5	12	10	0	0	0	97
12	PENGHINAAN	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	8
13	PENCULIKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PERBUATAN YANG TDK. MENYENANGKAN	0	3	2	0	0	0	2	0	0	6	0	0	0	13
15	KEJ. THDP Jiwa ORG/PMBUNUHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PENGANIAYAAN BERAT	170	109	0	5	0	1	2	9	0	0	0	0	0	296
17	MENGAKIBATKAN ORG MATI	0	1	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	5
18	MENGAKIBATKAN ORANG LUKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PENCURIAN BIASA	97	92	40	7	17	4	26	13	17	20	0	0	0	333
20	PENCURIAN DG PEMBERATAN	192	255	14	25	24	28	12	2	16	0	0	4	0	572
21	PENCURIAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	PENCURIAN DGN KEKERASAN	16	42	5	2	5	3	1	0	2	0	0	0	0	76
23	PERAS/ANCAM	33	20	3	2	0	2	0	1	0	5	0	0	0	66
24	PENGGELAPAN	163	59	18	4	15	3	18	6	12	32	0	1	0	331
25	PENIPUAN/PERBUATAN CURANG	97	57	12	9	2	10	3	1	0	101	0	0	6	298
26	MENGHANCURKAN / MERUSAK BRG	9	15	9	1	0	2	3	0	5	5	0	0	0	49
27	MENERIMA SUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	PENADAHAN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
93.	MEMPEKERJAKAN ANAK DIBWH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94.	KEKERASAN DLM RMH TANGGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95.	PENYALAHGUNAAN SENPI/HANDAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96.	KEJ.NARKOTIKA (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97.	KEJ. PSIKOTROPIKA (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98.	TERORISME (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99.	PERAMPOKAN/PEMBAJAKAN (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.	PERDAGANGAN MANUSIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.	PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102.	HKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103.	PENCUCIAN UANG/MONEY LAUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.	KEJ. DUNIA MAYA CYBERCRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105.	KEJAHATAN PASAR MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106.	CURANMOR R2	217	141	0	2	26	18	15	4	4	26	0	0	0	453
107.	CURANMOR R4	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
108.	CURAS SENPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109.	CURAS SAJAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110.	OBAT KERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111.	PEMILIKAN SENPI ILEGAL/HANDAK	0	0	1	0	0	3	2	0	3	0	0	0	0	9
112.	PENGEROYOKAN	63	49	12	3	3	6	11	3	6	1	0	0	0	157
113.	SAJAM	30	31	7	3	4	18	9	2	2	5	0	0	0	111
114.	UANG PALSU	0	2	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7
115.	PEMBUNUHAN	5	7	0	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	19

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
116.	PORNOGRAFI	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
117.	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118.	PERBANKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119.	P O A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120.	PROD & DAGANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121.	SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122.	CURWAT TLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123.	CURI KAYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124.	PEMBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125.	KENAKALAN RMJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126.	KARA KONEKSITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127.	LAKA KERJA	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	1	0	6
128.	LAKA LAUT/AIR	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3
129.	LAKA UDARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130.	ABORSI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
131.	MIRAS	0	0	29	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	34
132.	THDP NEG SHBT KEPALA SHBT & WKLN YA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133.	THDP KEWJIBAN DAN HAK KENEGARAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.	THDP ASAL USUL DAN PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135.	MERSK, GAR KESOPANAN/KESSLAAN DI MK UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136.	PENCURIAN DLM LINGKUNGAN KELUARGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137.	MERUGIKAN PEMIUTANG/ORG YG BERHAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138.	MENGHANCURKAN ATAU MERUSAK BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139.	PENERBITAN DAN PERCETAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140.	LAKA LANTAS (TANPA KORBAN MANUSIA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141.	LAKA LANTAS KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142.	LAKA LANTAS	143	124	117	62	68	80	39	41	49	0	0	0	0	723
143.	LAKA LAUT KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144.	LAKA UDARA KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145.	LEDAKAN BOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146.	PENEMBAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147.	KEJKONVENSIONAL LAINNYA	12	12	0	1	4	1	1	0	3	4	0	0	0	37
148.	PREMANISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149.	GUL POK ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150.	PENISTAAN AGAMA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
151.	CABUL	20	38	0	0	2	0	17	0	0	0	0	0	0	77
152.	TKI ILLEGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153.	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154.	UNJUK RASA AMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155.	UNJUK RASA RAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	1375	1503	283	142	182	201	170	92	134	265	0	6	8	4361
	B. KEJAHATAN TRANS NASIONAL														
01	NARKOTIKA	236	336	231	92	87	130	114	81	54	0	216	5	0	1582
02	TERORISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	PEROMPAKAN/PEMBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
04	PERDAGANGAN MANUSIA/TRAFFICKING PERSON	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
05	PENCUCIAN UANG / MONEY LAUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
06	KEJ DUNIA MAYA / CYBER CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	LUNDUP DAN PERDAGANGAN SENPI / ARM SMUGLING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	KEJ. EKONOMI LINTAS NEGARA / TRANS ECONOMY CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PSIKOTROPIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KEJ TRANS NASIONAL LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	236	336	233	92	87	130	114	81	54	0	216	5	3	1587

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RES KRI MUM	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIM SUS	JML
	C. KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA														
01	KORUPSI	2	3	5	2	1	2	1	3	1	0	0	0	10	30
02	ILLEGAL LOGGING	0	7	0	0	4	7	9	5	1	0	0	1	0	34
03	ILLEGAL FISHING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7
04	ILLEGAL MINING	4	0	6	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	13
05	LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	8
06	UU PANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
07	BBM ILLEGAL	0	0	6	0	2	7	0	2	0	0	0	1	0	18
08	UU PERKEBUNAN	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
09	IT	5	3	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	5	17
10	PERBANKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
11	P. KONSUMEN	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4
12	KARANTINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	UU PENYIARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	UU KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	PERTAMBANGAN	1	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	8	14
16	UU AGRARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	PERDAGANGAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18	PENYELUNDUPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
19	HAKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	BUDIDAYA TANAMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
20	PEL WIL PERAIRAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KEJAHATAN THDP.KEKAYAAN NEGARA LAINNYA	1	0	1	0	0	5	3	0	0	0	0	0	8	19
	JUMLAH	15	14	20	2	7	22	19	12	5	0	0	12	50	178
	D. KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTIJENSI														
1	KONFLIK SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SEPARATISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	THDP. KEAMANAN NEGARA/MAKAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	THDP MARTABAT KEDUDUKAN PRES/WAPRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KONFLIK OKNUM TNI-POLRI/KONFLIK APARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BENTROK MASSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PEMOGOKAN BURUH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	UNJUK RASA ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PERKELAHIAN PELAJAR/MAHASISWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PERKELAHIAN TANDING SATU LAWAN SATU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTIJENSI LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIAN(HAM)														
01	PELANGGARAN HAM BERAT (GENOCIDE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	PEMBUNUHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	PEMUSNAHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	PENGUSIRAN ATAU PEMINDAHAN PENDUDUK SECARA PAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05	PERAMPASAN KEMERDEKAAN/KEBEBASAN FISIK LAIN SECARA SEWENANG-WENANG YG MELANGGAR KETENTUAN POKOK HUKUM INTERNASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	PENYIKSAAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	PERKOSAAN,PERBUDAKAN SEKSUAL,PELACURAN SECARA PAKSA, STERILISASI SECARA PAKSA DLM. BENTUK KEKERASAN SEKSUAL YG SETARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	PENGANIYAAAN THDP SUATU KELOMPOK TERTENTU YG DIDASARI PERSAMAAN PAHAM POLITIK,RAS,KEBANGSAAN,ETNIS,BU DAYA,AGAMA,JNS KELAMIN/ALASAN LAIN YG TLH DIAKUI SECARA YUNIVERSAL SBG HAL YG DILARANG MENURU HUKUM INTERNASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KEJAHATAN APARTHEID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	TORTURE (PENGANIYAAAN OLEH APARAT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RES KRI MUM	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIM SUS	JML
12	PELANGGARAN DLM HAL PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KEKERASAN DLM RUMAH TANGGA	61	31	3	4	4	1	1	1	1	2	0	0	0	109
14	PELANGGARAN HAM THDP ANAK	61	18	34	13	7	25	1	13	11	6	0	0	0	189
15	PELANGGARAN HAM LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	122	49	37	17	11	26	2	14	12	8	0	0	0	298

F. PELANGGARAN HUKUM NON.PIDANA

1	BEJLAN DI ATAS JALAN UMUM ATAU TROTOAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEMINTA-MINTA DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BANGUNAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RUMAH MAKAN/RESTORAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TEMPAT HIBURAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	AGRARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PELANGGARAN HUKUM NON PIDANA LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

G. PELANGGARAN HUKUM PIDANA

1	MENGANGGU KETENTRAMAN DGN. MEMBERIKAN TERIAKAN ISYARAT PALSU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MENGANGGU RAPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MEMBUAT GADUH PERTEMUAN AGAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	TENTANG MERINTANGI JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEMBUAT GADUH DI SIDANG PENGADILAN NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MERUSAK SURAT MAKLUMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KEALPAAN HINGGA BARANG SITAAN HILANG (RUSAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	KEALPAAN YG. MENIMBULKAN RUSAKNYA MATERAI(SEGEL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PENGANIYAAAN THDP BINATANG SENGAJA MEMBUAT SAKIT,CACAT, MERUSAK KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	MEMBAWA HEWAN DGN PAS LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	PENGHINAAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PENGHINAAN DGN TULISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KARENA SALAHNYA ORANG MENJADI TERTAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PENGANIYAAAN RINGAN	14	34	31	0	12	20	23	3	9	2	0	0	0	148
15	PENCURIAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PENGGELAPAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	PENIPUAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	PENIPUAN THDP PEMBELI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19	PENGRUSAKAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	KARENA SALAHNYA MERUSAK PEKERJAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KENAKALAN THDP ORANG ATAU BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	MENINGGALKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MENJAGA ORANG GILA/ANAK-ANAK SEHINGGA MEMBAHAYAKAN ORANG GILA DAN ANAK TSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	MABUK DI TEMPAT UMUM SEHINGGA MENGGANGGU KETERTIBAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	DGN MELAWAN HAK MERINTANGI KEMREDEKAAN BERGERAK DI JALAN UMUM(MERINTANGI KAWANNYA UNTUK DIAJAK MOGOK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	PERBUATAN YG DPT MERUGIKAN,MENYUSAHKAN DAN MENDATANGKAN BAHAYA LALIN DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	TANPA IJIN DARI POLRI MEMASANG PERANGKAP BINATANG BUAS YANG DPT MEMBAHAYAKAN ORANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	TANPA IJIN POLRI MEMBAKAR GEDUNG ATAU RUMAH SENDIRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	MAMASANG API DI TEPI JALAN UMUM/DEKAT RUMAH YANG DPT MENDATANGKAN BAHAYA KEBAKARAN/KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	MENJUAL, MENAWARKAN MAKANAN ATAU MINUMAN YANG SUDAH RUSAK SEHINGGA DPT MERUSAK KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RES KRI MUM	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIM SUS	JML
30	MEMBUAT RIUH/INGAR PADA WAKTU MALAM MEMBUAT TIDUR TERGANGGU, MEMBUAT RIUH WAKTU ADA IBADAH/SEDANG PENGADILAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	MINTA-MINTA DI TEMPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	GELANDANGAN / TDK MEMPUNYAI MATA PENCAHARIAN MENGEMBARA KE MANA-MANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	TDK BERHAK MEMAKAI GELAR BANGSAWAN BINTANG ATAU TANDA KEHORMATAN NEGERA RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	DI TEMPAT UMUM TIDAK BERHAK MEMAKAI PAKAIAN PEGAWAI NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	TANPA IJIN POLRI(PEGAWAI NEGERI YG BERHAK), MENGADAKAN PESTA UMUM DAN PAWAI DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	TDK MENURUT PERINTAH PETUNJUK POLRI PADA WAKTU ADA PESTA/ARAK-ARAKAN DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	SEBAGAI MATA PENCAHARIAN MENJALANKAN PEKERJAAN DOKTER GIGI DENGAN TIDAK MEMPUNYAI SURAT IJIN DAN DALAM KEADAAN YANG TIDAK MEMAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	LALAI TIDAK MEMBERITAHUKAN KEPADA KEPALA DESA ATAS KEPINDAHANNYA. LALAI MEMBERITAHU KPD KEPALA DESA STLH 14 HARI TINGGAL DI DAERAH TSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	LOSMEN, HOTEL PENGINAPAN YG PEMILIKNYA : (A) TDK MENGADAKAN BUKU TAMU (B) LALAI TDK MELAPORKAN/MEMPERLIHATKAN BUKU TAMU KEPADA POLRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	TDK DATANG SETELAH DIPANGGIL MENURUT UNDANG-UNDANG, UTK MENJADI SAKSI, AHLI / JURU BAHASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN YG DIMINTA KUASA HUKUM (CQ.POLRI) THDP BAHAYA BAGI KEAMANAN UMUM/BARANG / ORG SEDANG BERBUAT KEJAHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

42	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN THDP ORANG DI DLM KEADAAN BAHAYA MAUT, SEDANGKAN PERTOLONGAN TERSEBUT TDK MEMBAHAYAKAN DIRINYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	DIMUKA UMUM : MENYANYIKAN LAGU-LAGU, PIDATO, MENGADAKAN GAMBAR/TULISAN YG MELANGGAR KESOPANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	NYATA MABUK/KENTARA MABUK DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	MEMAKAI BINATANG UNTUK PEKERJAAN YG TERLAMPAU BERAT, MEMAKAI BINATANG YG CACAT, PINCANG, LUKA, HAMIL UTK PEKERJAAN SESUATU DGN KEADAANNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	MENJUAL, MENAWARKAN, MEMBAGIKAN, MENYERAHKAN BENDA JIMAT/PENANGKAL DENGAN DALIH BENDA TRSB ADA KESAKTIANNYA. MENGAJARKAN ILMU/KEPANDAIAAN SHG MENIMBULKAN KEPERCAYAAN TERHINDAR DARI BAHAYA APABILA MELAKUKAN TINDAK PIDANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	MEMBIARKAN TERNAKNYA YG BERSAYAP BERJALAN DI TANAH YG SUDAH DITABURI/DITANAMI DENGAN MELAWAN HAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	DGN TIADA BERHAK MEMBIARKAN TERNAKNYA BERJALAN DITANAH YG SUDAH DITABURI/DITANAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	MENINGGALKAN ORANG YG PERLU DITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	MEMBUKA RAHASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	PELAYARAN DAN PENERBANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	TTG KAM UMUM BG ORG.BRG DAN KES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	TTG KETERTIBAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	TTG PENGUSAHA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	TTG ASAL USUL DAN PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RES KRI MUM	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIM SUS	JML
56	TTG ORG YG PERLUDITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	TTG KESUSILAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	TTG TANAH/TANAMAN/PEKARANGAN	2	0	0	0	0	0	2	0	0	21	0	0	0	25
59	JABATAN	0	26	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	30
60	PELAYARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
	JUMLAH	16	60	31	0	12	20	25	3	9	27	0	2	1	206
	H. GANGGUAN THDP. ORANG														
1	PENEMUAN MAYAT	0	5	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	9
2	BUNUH DIRI	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3	TEMU BAYI	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEMBUNYIKAN AUDIO BERLEBIHAN/KERAS / BISING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	GANGGUAN THDP ORANG LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	5	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	11
	GANGGUAN THDP. BARANG														
1	KEBAKARAN	43	9	0	0	0	0	15	1	6	0	0	0	0	74
2	KEHILANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	GANGGUAN THDP BARANG LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TANAH LONGSOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	43	9	0	0	0	0	15	1	6	0	0	0	0	74
	I. GANGGUAN THDPHEWAN														
1	MEMBUNUH HEWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	J. BENCANA														
1	TANAH LONGSOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ANGIN PUTING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2) Data penyelesaian gangguan kamtibmas Satker / Satwil tahun 2018 sebagai berikut :

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
K. KEJAHATAN KONVENSIONAL															
01	TTHD KETERTIBAN UMUM	53	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459
02	MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORG/BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	SENGAJA MENIMBULKAN KEBAKARAN/ BANJIR (PEMBAKARAN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	KARENA ALPA MENIMBULKAN KEBAKARAN/MELETUS/BANJIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	MEMBERI SUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	SUMPAAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
07	PEMALSUAN TTD	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3
08	PEMALSUAN SURAT	2	1	1	0	0	3	2	0	0	23	0	0	0	32
09	PERJINAHAN	6	2	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	13
10	PERKOSAAN	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4
11	PERMAINAN JUDI	23	21	5	10	4	7	5	5	15	10	0	0	0	105
12	PENGHINAAN	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
13	PENCULIKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PERBUATAN YANG TDK. MENYENANGKAN	0	0	2	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	8
15	KEJ. THDP JIWA ORG/PMBUNUHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PENGANIAYAAN BERAT	119	79	0	5	0	1	1	4	0	0	0	0	0	209
17	MENGAKIBATKAN ORG MATI	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4
18	MENGAKIBATKAN ORANG LUKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PENCURIAN BIASA	57	86	34	7	6	3	29	10	16	28	0	0	0	276
20	PENCURIAN DG PEMBERATAN	152	123	12	25	16	25	9	1	16	1	0	4	0	384
21	PENCURIAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	PENCURIAN DGN KEKERASAN	11	17	5	2	3	3	1	0	3	1	0	0	0	46
23	PERAS/ANCAM	21	12	2	2	0	1	0	1	0	3	0	0	0	42
24	PENGGELAPAN	105	33	14	4	10	2	10	5	2	34	0	1	0	220
25	PENIPUAN/PERBUATAN CURANG	49	15	8	9	2	8	2	1		85	0	0	7	186
26	MENGHANCURKAN / MERUSAK BRG	4	5	8	1	0	1	0	0	5	2	0	0	0	26
27	MENERIMA SUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	PENADAHAN	13	8	1	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	27
29.	MEMPEKERJAKAN ANAK DIBWH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	KEKERASAN DLM RMH TANGGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	PENYALAHGUNAAN SENPI/HANDAK	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
32.	KEJ.NARKOTIKA (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	KEJ. PSIKOTROPIKA (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	TERORISME (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	PERAMPOKAN/PEMBAJAKAN (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	PERDAGANGAN MANUSIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	HKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	PENCUCIAN UANG/MONEY LAUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	KEJ. DUNIA MAYA CYBERCRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	KEJAHATAN PASAR MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	CURANMOR R2	127	52	0	2	11	18	14	4	3	27	0	0	0	258
43.	CURANMOR R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	CURAS SENPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	CURAS SAJAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	OBAT KERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	PEMILIKAN SENPI ILEGAL/HANDAK	0	0	1	0	0	3	1	0	3	3	0	0	0	11
48.	PENGEROYOKAN	41	32	9	3	2	5	13	2	6	1	0	0	0	114
49.	SAJAM	30	28	7	3	4	14	3	2	2	5	0	0	0	98
50.	UANG PALSU	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
51.	PEMBUNUHAN	4	11	0	0	3	0	4	1	0	0	0	0	0	23
52.	PORNOGRAFI	3	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8
53.	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	PERBANKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	P O A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	PROD & DAGANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	CURWAT TLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	CURI KAYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	PEMBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	KENAKALAN RMJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	KARA KONEKSITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	LAKA KERJA	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	4
64.	LAKA LAUT/AIR	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
65.	LAKA UDARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	ABORSI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
67.	MIRAS	0	0	29	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30
68.	THDP NEG SHBT KEPALA SHBT & WKLN YA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	THDP KEWJBAN DAN HAK KENEGARAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	THDP ASAL USUL DAN PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	MERSK, GAR KESOPANAN/KESSLAAN DI MK UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	PENCURIAN DLM LINGKUNGAN KELUARGA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
73.	MERUGIKAN PEMIUTANG/ORG YG BERHAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	MENGHANCURKAN ATAU MERUSAK BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	PENERBITAN DAN PERCETAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	LAKA LANTAS (TANPA KORBAN MANUSIA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	LAKA LANTAS KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	LAKA LANTAS	231	106	118	64	93	51	42	39	50	0	0	0	0	794
79.	LAKA LAUT KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80.	LAKA UDARA KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81.	LEDAKAN BOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82.	PENEMBAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83.	KEJKONVENSIONAL LAINNYA	5	19	0	0	1	0	0	0	1	6	0	0	0	32
84.	PREMANISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85.	GUL POK ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86.	PENISTAAN AGAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87.	CABUL	23	23	0	0	2	0	13	0	0	2	0	0	0	63
88.	TKI ILLEGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89.	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90.	UNJUK RASA AMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91.	UNJUK RASA RAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	1082	1086	262	142	159	151	153	77	127	243	0	6	7	3495
	L. KEJAHATAN TRANS NASIONAL														
01	NARKOTIKA	265	290	230	75	73	98	85	78	42	0	170	5	0	1411
02	TERORISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	PEROMPIKAN/PEMBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	PERDAGANGAN MANUSIA/TRAFFICKING IN PERSON	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
05	PENCUCIAN UANG / MONEY LOUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	KEJ DUNIA MAYA / CYBER CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
07	LUNDUP DAN PERDAGANGAN SENPI / ARM SMUGLING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	KEJ. EKONOMI LINTAS NEGARA / TRANS ECONOMY CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PSIKOTROPIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KEJ TRANS NASIONAL LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	265	290	231	75	73	98	85	78	42	0	170	5	0	1412
M. KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA															
01	KORUPSI	1	2	5	2	1	1	3	1	0	0	0	0	8	24
02	ILLEGAL LOGGING	0	6	0	0	4	3	6	5	4	0	0	1	0	29
03	ILLEGAL FISHING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7
04	ILLEGAL MINING	3	0	6	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	13
05	LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
06	UU PANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
07	BBM ILLEGAL	0	0	6	0	2	7	2	3	0	0	0	1	0	21
08	UU PERKEBUNAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
09	IT	4	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	11
10	PERBANKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
11	P. KONSUMEN	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
12	KARANTINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	UU PENYIARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	UU KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	PERTAMBANGAN	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	4	9
16	UU AGRARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	PERDAGANGAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18	PENYELUNDUPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
19	HAKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	BUDIDAYA TANAMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	PEL WIL PERAIRAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KEJAHATAN THDP.KEKAYAAN NEGARA LAINNYA	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	5	10
	JUMLAH	10	11	20	2	7	14	16	10	8	0	0	12	25	135
N. KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTIJENSI															
1	KONFLIK SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SEPARATISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	THDP. KEAMANAN NEGARA/MAKAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	THDP MARTABAT KEDUDUKAN PRES/WAPRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KONFLIK OKNUM TNI-POLRI/KONFLIK APARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BENTROK MASSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PEMOGOKAN BURUH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	UNJUK RASA ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PERKELAHIAN PELAJAR/MAHASISWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PERKELAHIAN TANDING SATU LAWAN SATU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTINJENSI LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIAN(HAM)															
01	PELANGGARAN HAM BERAT (GENOCIDE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	PEMBUNUHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	PEMUSNAHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	PENGUSIRAN ATAU PEMINDAHAN PENDUDUK SECARA PAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	PERAMPASAN KEMERDEKAAN/KEBEBASAN FISIK LAIN SECARA SEWENANG-WENANG YG MELANGGAR KETENTUAN POKOK HUKUM INTERNASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	PENYIKSAAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	PERKOSAAN,PERBUDAKAN SEKSUAL,PELACURAN SECARA PAKSA, STERILISASI SECARA PAKSA DLM. BENTUK KEKERASAN SEKSUAL YG SETARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	PENGANIYAAN THDP SUATU KELOMPOK TERTENTU YG DIDASARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
	PERSAMAAN PAHAM POLITIK,RAS,KEBANGSAAN,ETNIS,BU DAYA,AGAMA,JNS KELAMIN/ALASAN LAIN YG TLH DIAKUI SECARA YUNIVERSAL SBG HAL YG DILARANG MENURU HUKUM INTERNASIONAL														
09	PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KEJAHATAN APARTHEID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	TORTURE (PENGANIYAAAN OLEH APARAT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PELANGGARAN DLM HAL PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KEKERASAN DLM RUMAH TANGGA	41	5	3	4	4	1	1	1	0	2	0	0	0	62
14	PELANGGARAN HAM THDP ANAK	40	5	32	11	7	18	0	12	10	5	0	0	0	140
15	PELANGGARAN HAM LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	81	10	35	15	11	19	1	13	10	7	0	0	0	202

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
	P. PELANGGARAN HUKUM NON.PIDANA														
1	BEJALAN DI ATAS JALAN UMUM ATAU TROTOAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEMINTA-MINTA DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BANGUNAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RUMAH MAKAN/RESTORAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TEMPAT HIBURAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	AGRARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PELANGGARAN HUKUM NON PIDANA LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Q. PELANGGARAN HUKUM PIDANA														
1	MENGGANGGU KETENTRAMAN DGN. MEMBERIKAN TERIAKAN ISYARAT PALSU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MENGGANGGU RAPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MEMBUAT GADUH PERTEMUAN AGAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	TENTANG MERINTANGI JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEMBUAT GADUH DI SIDANG PENGADILAN NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MERUSAK SURAT MAKLUMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KEALPAAN HINGGA BARANG SITAAN HILANG (RUSAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	KEALPAAN YG. MENIMBULKAN RUSAKNYA MATERAI(SEGEL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PENGANIYAAAN THDP BINATANG SENGAJA MEMBUAT SAKIT,CACAT, MERUSAK KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	MEMBAWA HEWAN DGN PAS LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	PENGHINAAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PENGHINAAN DGN TULISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KARENA SALAHNYA ORANG MENJADI TERTAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PENGANIYAAAN RINGAN	11	30	31	0	8	18	12	2	8	2	0	0	0	122
15	PENCURIAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PENGGELAPAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	PENIPUAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	PENIPUAN THDP PEMBELI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PENGRUSAKAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	KARENA SALAHNYA MERUSAK PEKERJAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KENAKALAN THDP ORANG ATAU BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	MENINGGALKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MENJAGA ORANG GILA/ANAK- ANAK SEHINGGA MEMBAHAYAKAN ORANG GILA DAN ANAK TSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
23	MABUK DI TEMPAT UMUM SEHINGGA MENGGANGGU KETERTIBAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	DGN MELAWAN HAK MERINTANGI KEMREDEKAAN BERGERAK DI JALAN UMUM(MERINTANGI KAWANNYA UNTUK DIAJAK MOGOK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	PERBUATAN YG DPT MERUGIKAN,MENYUSAHKAN DAN MENDATANGKAN BAHAYA LALIN DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	TANPA IJIN DARI POLRI MEMASANG PERANGKAP BINATANG BUAS YANG DPT MEMBAHAYAKAN ORANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	TANPA IJIN POLRI MEMBAKAR GEDUNG ATAU RUMAH SENDIRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	MAMASANG API DI TEPI JALAN UMUM/DEKAT RUMAH YANG DPT MENDATANGKAN BAHAYA KEBAKARAN/KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	MENJUAL, MENAWARKAN MAKANAN ATAU MINUMAN YANG SUDAH RUSAK SEHINGGA DPT MERUSAK KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	MEMBUAT RIUH/INGAR PADA WAKTU MALAM MEMBUAT TIDUR TERGANGGU, MEMBUAT RIUH WAKTU ADA IBADAH/SEDANG PENGADILAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	MINTA-MINTA DI TEMPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	GELANDANGAN / TDK MEMPUNYAI MATA PENCAHARIAN MENGEMBARA KE MANA-MANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	TDK BERHAK MEMAKAI GELAR BANGSAWAN BINTANG ATAU TANDA KEHORMATAN NEGERA RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	DI TEMPAT UMUM TIDAK BERHAK MEMAKAI PAKAIAN PEGAWAI NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	TANPA IJIN POLRI(PEGAWAI NEGERI YG BERHAK), MENGADAKAN PESTA UMUM DAN PAWAI DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	TDK MENURUT PERINTAH PETUNJUK POLRI PADA WAKTU ADA PESTA/ARAK-ARAKAN DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	SEBAGAI MATA PENCAHARIAN MENJALANKAN PEKERJAAN DOKTER GIGI DENGAN TIDAK MEMPUNYAI SURAT IJIN DAN DALAM KEADAAN YANG TIDAK MEMAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	LALAI TIDAK MEMBERITAHUKAN KEPADA KEPALA DESA ATAS KEPINDAHANNYA. LALAI MEMBERITAHU KPD KEPALA DESA STLH 14 HARI TINGGAL DI DAERAH TSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	LOSMEN, HOTEL PENGINAPAN YG PEMILIKNYA : (A) TDK MENGADAKAN BUKU TAMU (B) LALAI TDK MELAPORKAN/MEMPERLIHATKAN BUKU TAMU KEPADA POLRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	TDK DATANG SETELAH DIPANGGIL MENURUT UNDANG-UNDANG, UTK MENJADI SAKSI, AHLI / JURU BAHASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN YG DIMINTA KUASA HUKUM (CQ.POLRI) THDP BAHAYA BAGI KEAMANAN UMUM/BARANG / ORG SEDANG BERBUAT KEJAHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN THDP ORANG DI DLM KEADAAN BAHAYA MAUT, SEDANGKAN PERTOLONGAN TERSEBUT TDK MEMBAHAYAKAN DIRINYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	DIMUKA UMUM : MENYANYIKAN LAGU-LAGU, PIDATO, MENGADAKAN GAMBAR/TULISAN YG MELANGGAR KESOPANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	NYATA MABUK/KENTARA MABUK DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	MEMAKAI BINATANG UNTUK PEKERJAAN YG TERLAMPAU BERAT, MEMAKAI BINATANG YG CACAT,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
	PINCANG, LUKA, HAMIL UTK PEKERJAAN SESUATU DGN KEADAANNYA														
46	MENJUAL, MENAWARKAN, MEMBAGIKAN, MENYERAHKAN BENDA JIMAT/PENANGKAL DENGAN DALIH BENDA TRSB ADA KESAKTIANNYA. MENGAJARKAN ILMU/KEPANDAAN SHG MENIMBULKAN KEPERCAYAAN TERHINDAR DARI BAHAYA APABILA MELAKUKAN TINDAK PIDANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	MEMBIARKAN TERNAKNYA YG BERSAYAP BERJALAN DI TANAH YG SUDAH DITABURI/DITANAMI DENGAN MELAWAN HAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	DGN TIADA BERHAK MEMBIARKAN TERNAKNYA BERJALAN DITANAH YG SUDAH DITABURI/DITANAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	MENINGGALKAN ORANG YG PERLU DITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	MEMBUKA RAHASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	PELAYARAN DAN PENERBANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	TTG KAM UMUM BG ORG.BRG DAN KES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	TTG KETERTIBAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	TTG PENGUASA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	TTG ASAL USUL DAN PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	TTG ORG YG PERLUDITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	TTG KESUSILAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	TTG TANAH/TANAMAN/PEKARANGAN	3	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	19
59	JABATAN	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
60	PELAYARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
	JUMLAH	14	48	31	0	8	18	12	2	8	18	0	2	1	162

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
	R. GANGGUAN THDP. ORANG														
1	PENEMUAN MAYAT	0	3	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	8
2	BUNUH DIRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	TEMU BAYI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEMBUNYIKAN AUDIO BERLEBIHAN/KERAS / BISING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	GANGGUAN THDP ORANG LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	4	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	9
	S. GANGGUAN THDP. BARANG														
1	KEBAKARAN	43	2	0	0	11	0	11	0	5	0	0	0	0	72
2	KEHILANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	GANGGUAN THDP BARANG LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TANAH LONGSOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	43	2	0	0	11	0	11	0	5	0	0	0	0	72
	T. GANGGUAN THDPHEWAN														
1	MEMBUNUH HEWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U. BENCANA														
1	TANAH LONGSOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ANGIN PUTING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

c. 10 Kasus tertinggi tahun 2018

NO	KASUS	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TREND
		L	S	% SELRA	L	S	% SELRA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NARKOBA	1635	1511	92 %	1582	1411	89 %	T 53 (3 %)
2	CURANMOR	972	459	47 %	466	258	55 %	T 506 (52 %)
3	CURAT	680	379	55 %	572	384	67 %	T 108 (15 %)
4	ANIRAT	437	324	74 %	296	209	70 %	T 141 (32 %)
5	CURAS	99	51	51 %	76	46	60 %	T 23 (23 %)
JUMLAH		3.283	2.724	82 %	2.992	2.308	77 %	T 291 (8 %)

d. Rekapitulasi Pelanggaran Lalu Lintas Persatwil sebagai berikut :

NO	SATWIL	TAHUN 2017				TAHUN 2018			
		TILANG	TEGURAN	JML	DENDA	TILANG	TEGURAN	JML	DENDA
1	SAMARINDA	17,185	24,733	41,918	Rp 1,957,945,000	18,565	27,478	46,043	Rp 2,175,696,000
2	BALIKPAPAN	12,682	27,190	39,872	Rp 1,408,206,000	11,638	20,361	31,999	Rp 1,450,150,000
3	KUKAR	11,074	17,167	28,241	Rp 1,338,333,000	13,037	15,626	28,663	Rp 1,152,702,000
4	KUTIM	10,398	13,981	24,379	Rp 914,689,000	15,779	23,406	39,185	Rp 1,099,303,000
5	PASER	5,176	9,769	14,945	Rp 4,550,400,000	7,046	8,556	15,602	Rp 4,910,650,000
6	BERAU	5,000	11,858	16,858	Rp 14,350,000	6,133	18,099	24,232	Rp 11,380,000
7	BONTANG	4,644	4,313	8,957	Rp 384,850,000	9,293	8,428	17,721	Rp 447,150,000
8	PPU	4,180	9,692	13,872	Rp 378,004,800	4,184	10,422	14,606	Rp 59,365,000
9	KUBAR	1,651	15,809	17,460	Rp 155,314,000	2,286	11,269	13,555	Rp 169,127,000
10	PJR DITLANTAS	5,530	3,100	8,630	Rp -	6,970	2,910	9,880	Rp 81,725,000
JUMLAH		77,520	137,612	215,132	Rp 3,887,288,870	94,931	146,555	241,486	Rp 11,557,248,000

c. Data Tindak Pidana Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2019

1) Data laporan gangguan kamtibmas Satker dan Satwil tahun 2019 sebagai berikut:

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
V. KEJAHATAN KONVENSIONAL															
01	TTHD KETERTIBAN UMUM	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61
02	MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORG/BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	SENGAJA MENIMBULKAN KEBAKARAN/ BANJIR (PEMBAKARAN)	0	0	2	0	2	0	1	2	3	2	0	0	0	12
04	KARENA ALPA MENIMBULKAN KEBAKARAN/MELETUS/BANJIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	MEMBERI SUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	SUMPAAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4
07	PEMALSUAN TTD	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
08	PEMALSUAN SURAT	6	3	2	1	0	1	0	0	0	17	0	0	0	30
09	PERJINAHAN	4	8	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	15
10	PERKOSAAN	4	0	6	0	1	3	3	1	0	0	0	0	0	18
11	PERMAINAN JUDI	19	7	6	4	4	11	3	1	6	8	0	0	0	69
12	PENGHINAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
13	PENCULIKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PERBUATAN YANG TDK. MENYENANGKAN	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	5

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
15	KEJ. THDP JIWA ORG/PEMBUNUHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PENGANIAYAAN BERAT	98	58	0	4	0	9	6	6	4	0	0	0	0	185
17	MENGAKIBATKAN ORG MATI	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
18	MENGAKIBATKAN ORANG LUKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PENCURIAN BIASA	53	50	56	17	10	2	23	11	5	11	0	1	0	239
20	PENCURIAN DG PEMBERATAN	143	117	9	19	17	26	23	2	16	6	0	3	0	381
21	PENCURIAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	PENCURIAN DGN KEKERASAN	15	22	2	5	8	3	1	2	0	2	0	0	0	60
23	PERAS/ANCAM	17	10	5	3	0	0	4	0	0	2	0	0	0	41
24	PENGGELAPAN	82	39	12	3	9	2	15	3	5	36	0	1	0	207
25	PENIPUAN/PERBUATAN CURANG	42	35	3	1	3	2	5	2	4	30	0	0	3	130
26	MENGHANCURKAN / MERUSAK BRG	3	6	6	0	0	1	1	3	0	4	0	0	0	24
27	MENERIMA SUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	PENADAHAN	0	0	1	0	0	0	1	0	2	2	0	6	0	12
156.	MEMPEKERJAKAN ANAK DIBWH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157.	KEKERASAN DLM RMH TANGGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158.	PENYALAHGUNAAN SENPI/HANDAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159.	KEJ.NARKOTIKA (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160.	KEJ. PSIKOTROPIKA (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161.	TERORISME (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162.	PERAMPOKAN/PEMBAJAKAN (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163.	PERDAGANGAN MANUSIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164.	PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165.	HKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166.	PENCUCIAN UANG/MONEY LAUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167.	KEJ. DUNIA MAYA CYBERCRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168.	KEJAHATAN PASAR MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169.	CURANMOR R2	167	100	36	16	33	14	15	2	16	10	0	0	0	409
170.	CURANMOR R4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
171.	CURAS SENPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172.	CURAS SAJAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173.	OBAT KERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174.	PEMILIKAN SENPI ILEGAL/HANDAK	0	0	1	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	7
175.	PENGEROYOKAN	42	30	0	3	7	5	5	5	1	1	0	0	0	99
176.	SAJAM	38	30	8	2	11	0	5	2	9	7	0	0	0	112
177.	UANG PALSU	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
178.	PEMBUNUHAN	4	2	0	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	12
179.	PORNOGRAFI	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
180.	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
181.	PERBANKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182.	P O A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183.	PROD & DAGANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184.	SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185.	CURWAT TLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186.	CURI KAYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187.	PEMBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMUM	DITNA RKOBA	DIT POL AIR	DITK RIMSUS	JML
188.	KENAKALAN RMJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189.	KARA KONEKSITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190.	LAKA KERJA	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3
191.	LAKA LAUT/AIR	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
192.	LAKA UDARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193.	ABORSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194.	MIRAS	0	0	24	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	27
195.	THDP NEG SHBT KEPALA SHBT & WKLNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196.	THDP KEWJBAN DAN HAK KENEGARAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197.	THDP ASAL USUL DAN PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198.	MERSK, GAR KESOPANAN/KESSLAAN DI MK UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199.	PENCURIAN DLM LINGKUNGAN KELUARGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200.	MERUGIKAN PEMIUTANG/ORG YG BERHAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201.	MENGHANCURKAN ATAU MERUSAK BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202.	PENERBITAN DAN PERCETAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203.	LAKA LANTAS (TANPA KORBAN MANUSIA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204.	LAKA LANTAS KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205.	LAKA LANTAS	109	88	103	40	71	57	27	34	43	0	0	0	0	572
206.	LAKA LAUT KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207.	LAKA UDARA KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208.	LEDAKAN BOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209.	PENEMBAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210.	KEJKONVENSIONAL LAINNYA	5	8	3	0	0	0	3	1	1	4	0	0	0	25
211.	PREMANISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212.	GUL POK ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213.	PENISTAAN AGAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
214.	CABUL	14	36	0	0	7	0	21	0	0	2	0	0	0	80
215.	TKI ILLEGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216.	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217.	UNJUK RASA AMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218.	UNJUK RASA RAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	937	651	286	119	187	140	169	83	116	152	0	13	3	2856
	W. KEJAHATAN TRANS NASIONAL														
01	NARKOTIKA	323	371	219	63	86	104	134	88	79	0	229	4	0	1700
02	TERORISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	PEROMPIKAN/PEMBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	PERDAGANGAN MANUSIA/TRAFFICKING IN PERSON	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
05	PENCUCIAN UANG / MONEY LAUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	KEJ DUNIA MAYA / CYBER CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	LUNDUP DAN PERDAGANGAN SENPI / ARM SMUGLING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	KEJ. EKONOMI LINTAS NEGARA / TRANS ECONOMY CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PSIKOTROPIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KEJ TRANS NASIONAL LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	324	371	220	63	86	104	134	88	79	0	229	4	0	1702

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RES KRI MUM	DITNA RKOBA	DIT POL AIR	DITK RIMSUS	JML
	X. KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA														
01	KORUPSI	2	1	2	0	1	0	1	1	1	0	0	0	3	12
02	ILLEGAL LOGGING	0	2	4	0	4	9	11	7	6	0	0	7	2	52
03	ILLEGAL FISHING	0	0	1	0	0	4	0	0	1	0	0	2	0	8
04	ILLEGAL MINING	7	0	5	0	0	1	0	0	1	0	0	0	9	23
05	LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
06	UU PANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

07	BBM ILLEGAL	5	4	7	0	0	10	1	1	0	0	0	0	0	28	
08	UU PERKEBUNAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	ITE	9	3	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	7	24	
10	PERBANKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	
11	P. KONSUMEN	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	
12	KARANTINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	UU PENYIARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	UU KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	PERTAMBANGAN	0	0	8	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	15	
16	UU AGRARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	PERDAGANGAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	
18	PENYELUNDUPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	HAKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	BUDIDAYA TANAMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	PEL WIL PERAIRAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	KEJAHATAN THDP.KEKAYAAN NEGARA LAINNYA	0	0	1	0	0	6	11	0	2	0	0	0	8	28	
	JUMLAH	26	10	29	0	5	31	33	10	12	0	0	10	35	201	
	Y. KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTIJENSI															
1	KONFLIK SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	SEPARATISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	THDP. KEAMANAN NEGARA/MAKAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	THDP MARTABAT KEDUDUKAN PRES/WAPRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	KONFLIK OKNUM TNI-POLRI/KONFLIK APARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	BENTROK MASSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	PEMOGOKAN BURUH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	UNJUK RASA ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	PERKELAHIAN PELAJAR/MAHASISWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	PERKELAHIAN TANDING SATU LAWAN SATU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTIJENSI LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Z. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIAN(HAM)															
01	PELANGGARAN HAM BERAT (GENOCIDE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	PEMBUNUHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	PEMUSNAHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	PENGUSIRAN ATAU PEMINDAHAN PENDUDUK SECARA PAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	PERAMPASAN KEMERDEKAAN/KEBEBASAN FISIK LAIN SECARA SEWENANG-WENANG YG MELANGGAR KETENTUAN POKOK HUKUM INTERNASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	PENYIKSAAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	PERKOSAAN,PERBUDAKAN SEKSUAL,PELACURAN SECARA PAKSA, STERILISASI SECARA PAKSA DLM. BENTUK KEKERASAN SEKSUAL YG SETARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	PENGANIYAAN THDP SUATU KELOMPOK TERTENTU YG DIDASARI PERSAMAAN PAHAM POLITIK,RAS,KEBANGSAAN,ETNIS,BU DAYA,AGAMA,JNS KELAMIN/ALASAN LAIN YG TLH DIAKUI SECARA YUNIVERSAL SBG HAL YG DILARANG MENURU HUKUM INTERNASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	KEJAHATAN APARTHEID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	TORTURE (PENGANIYAAN OLEH APARAT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RES KRI MUM	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIM SUS	JML
----	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------	--------------	-------------	--------------	-----

12	PELANGGARAN DLM HAL PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KEKERASAN DLM RUMAH TANGGA	28	31	4	2	1	0	2	0	4	7	0	0	0	79
14	PELANGGARAN HAM THDP ANAK	45	6	38	6	11	33	1	21	21	5	0	0	0	187
15	PELANGGARAN HAM LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	73	37	42	8	12	33	3	21	25	12	0	0	0	266
	Ā. PELANGGARAN HUKUM NON.PIDANA														
1	BEJLAN DI ATAS JALAN UMUM ATAU TROTOAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEMINTA-MINTA DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BANGUNAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RUMAH MAKAN/RESTORAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TEMPAT HIBURAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	AGRARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PELANGGARAN HUKUM NON PIDANA LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ā. PELANGGARAN HUKUM PIDANA														
1	MENGGANGGU KETENTRAMAN DGN. MEMBERIKAN TERIAKAN ISYARAT PALSU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MENGGANGGU RAPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MEMBUAT GADUH PERTEMUAN AGAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	TENTANG MERINTANGI JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEMBUAT GADUH DI SIDANG PENGADILAN NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MERUSAK SURAT MAKLUMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KEALPAAN HINGGA BARANG SITAAN HILANG (RUSAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	KEALPAAN YG. MENIMBULKAN RUSAKNYA MATERAI(SEGEL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PENGANIYAN THDP BINATANG SENGAJA MEMBUAT SAKIT,CACAT, MERUSAK KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	MEMBAWA HEWAN DGN PAS LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	PENGHINAAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PENGHINAAN DGN TULISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KARENA SALAHNYA ORANG MENJADI TERTAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PENGANIYAN RINGAN	10	25	37	0	11	5	13	0	5	5	0	0	0	111
15	PENCURIAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PENGGELAPAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	PENIPUAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	PENIPUAN THDP PEMBELI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PENGRUSAKAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	KARENA SALAHNYA MERUSAK PEKERJAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KENAKALAN THDP ORANG ATAU BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	MENINGGALKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MENJAGA ORANG GILA/ANAK-ANAK SEHINGGA MEMBAHAYAKAN ORANG GILA DAN ANAK TSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	MABUK DI TEMPAT UMUM SEHINGGA MENGGANGGU KETERTIBAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	DGN MELAWAN HAK MERINTANGI KEMREDEKAAN BERGERAK DI JALAN UMUM(MERINTANGI KAWANNYA UNTUK DIAJAK MOGOK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	PERBUATAN YG DPT MERUGIKAN,MENYUSAHKAN DAN MENDATANGKAN BAHAYA LALIN DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	TANPA IJIN DARI POLRI MEMASANG PERANGKAP BINATANG BUAS YANG DPT MEMBAHAYAKAN ORANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	TANPA IJIN POLRI MEMBAKAR GEDUNG ATAU RUMAH SENDIRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	MAMASANG API DI TEPI JALAN UMUM/DEKAT RUMAH YANG DPT MENDATANGKAN BAHAYA KEBAKARAN/KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	MENJUAL, MENAWARKAN MAKANAN ATAU MINUMAN YANG SUDAH RUSAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	SEHINGGA DPT MERUSAK KESEHATAN														
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RES KRI MUM	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIM SUS	JML
30	MEMBUAT RIUH/INGAR PADA WAKTU MALAM MEMBUAT TIDUR TERGANGGU, MEMBUAT RIUH WAKTU ADA IBADAH/SEDANG PENGADILAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	MINTA-MINTA DI TEMPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	GELANDANGAN / TDK MEMPUYAI MATA PENCAHARIAN MENGEMBARA KE MANA-MANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	TDK BERHAK MEMAKAI GELAR BANGSAWAN BINTANG ATAU TANDA KEHORMATAN NEGERA RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	DI TEMPAT UMUM TIDAK BERHAK MEMAKAI PAKAIAN PEGAWAI NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	TANPA IJIN POLRI(PEGAWAI NEGERI YG BERHAK), MENGADAKAN PESTA UMUM DAN PAWAI DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	TDK MENURUT PERINTAH PETUNJUK POLRI PADA WAKTU ADA PESTA/ARAK-ARAKAN DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	SEBAGAI MATA PENCAHARIAN MENJALANKAN PEKERJAAN DOKTER GIGI DENGAN TIDAK MEMPUYAI SURAT IJIN DAN DALAM KEADAAN YANG TIDAK MEMAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	LALAI TIDAK MEMBERITAHUKAN KEPADA KEPALA DESA ATAS KEPINDAHANNYA. LALAI MEMBERITAHU KPD KEPALA DESA STLH 14 HARI TINGGAL DI DAERAH TSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	LOSMEN, HOTEL PENGINAPAN YG PEMILIKNYA : (A) TDK MENGADAKAN BUKU TAMU (B) LALAI TDK MELAPORKAN/MEMPERLIHATKAN BUKU TAMU KEPADA POLRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	TDK DATANG SETELAH DIPANGGIL MENURUT UNDANG-UNDANG, UTK MENJADI SAKSI, AHLI / JURU BAHASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN YG DIMINTA KUASA HUKUM (CQ.POLRI) THDP BAHAYA BAGI KEAMANAN UMUM/BARANG / ORG SEDANG BERBUAT KEJAHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN THDP ORANG DI DLM KEADAAN BAHAYA MAUT, SEDANGKAN PERTOLONGAN TERSEBUT TDK MEMBAHAYAKAN DIRINYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	DIMUKA UMUM : MENYANYIKAN LAGU-LAGU, PIDATO, MENGADAKAN GAMBAR/TULISAN YG MELANGGAR KESOPANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	NYATA MABUK/KENTARA MABUK DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	MEMAKAI BINATANG UNTUK PEKERJAAN YG TERLAMPAU BERAT, MEMAKAI BINATANG YG CACAT, PINCANG, LUKA, HAMIL UTK PEKERJAAN SESUATU DGN KEADAANNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	MENJUAL, MENAWARKAN, MEMBAGIKAN, MENYERAHKAN BENDA JIMAT/PENANGKAL DENGAN DALIH BENDA TRSB ADA KESAKTIANNYA. MENGAJARKAN ILMU/KEPANDAIAAN SHG MENIMBULKAN KEPERCAYAAN TERHINDAR DARI BAHAYA APABILA MELAKUKAN TINDAK PIDANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

47	MEMBIARKAN TERNAKNYA YG BERSAYAP BERJALAN DI TANAH YG SUDAH DITABURI/DITANAMI DENGAN MELAWAN HAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	DGN TIADA BERHAK MEMBIARKAN TERNAKNYA BERJALAN DITANAH YG SUDAH DITABURI/DITANAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	MENINGGALKAN ORANG YG PERLU DITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	MEMBUKA RAHASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	PELAYARAN DAN PENERBANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	TTG KAM UMUM BG ORG.BRG DAN KES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	TTG KETERTIBAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	TTG PENGUASA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	TTG ASAL USUL DAN PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RES KRI MUM	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIM SUS	JML
56	TTG ORG YG PERLUDITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	TTG KESUSILAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	TTG TANAH/TANAMAN/PEKARANGAN	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	6
59	JABATAN	0	11	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	15
60	PELAYARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6
	JUMLAH	10	36	39	0	11	5	16	0	5	10	0	6	0	138
	Ö. GANGGUAN THDP. ORANG														
1	PENEMUAN MAYAT	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	5
2	BUNUH DIRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	TEMU BAYI	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEMBUNYIKAN AUDIO BERLEBIHAN/KERAS / BISING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	GANGGUAN THDP ORANG LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	5
	GANGGUAN THDP. BARANG														
1	KEBAKARAN	49	5	3	0	12	0	12	0	3	0	0	0	0	84
2	KEHILANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	GANGGUAN THDP BARANG LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TANAH LONGSOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	49	5	3	0	12	0	12	0	3	0	0	0	0	84
	AA. GANGGUAN THDPHEWAN														
1	MEMBUNUH HEWAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	JUMLAH	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	BB. BENCANA														
1	TANAH LONGSOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ANGIN PUTING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) Data penyelesaian gangguan kamtibmas Satker / Satwil tahun 2019 sebagai berikut:

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
	CC. KEJAHATAN KONVENSIONAL														
01	TTHD KETERTIBAN UMUM	59	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	61
02	MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORG/BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	SENGAJA MENIMBULKAN KEBAKARAN/ BANJIR (PEMBAKARAN)	0	0	2	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	7
04	KARENA ALPA MENIMBULKAN KEBAKARAN/MELETUS/BANJIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	MEMBERI SUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	SUMPAAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
07	PEMALSUAN TTD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
08	PEMALSUAN SURAT	4	2	2	1	0	0	0	0	0	19	0	0	1	29
09	PERJINAHAN	4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6
10	PERKOSAAN	3	0	6	0	1	3	4	0	0	0	0	0	0	17
11	PERMAINAN JUDI	19	8	6	4	4	10	3	1	7	0	0	0	0	62
12	PENGHINAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	PENCULIKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PERBUATAN YANG TDK. MENYENANGKAN	1	0	0	0	0	1	3	0	0	3	0	0	0	8
15	KEJ. THDP Jiwa Org/PMBUNUHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PENGANIAYAAN BERAT	66	34	0	3	0	8	4	11	4	0	0	0	0	130
17	MENGAKIBATKAN ORG MATI	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
18	MENGAKIBATKAN ORANG LUKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PENCURIAN BIASA	57	104	56	17	10	1	27	10	5	5	0	1	0	292
20	PENCURIAN DG PEMBERATAN	135	82	8	19	17	28	22	5	17	9	0	3	0	345
21	PENCURIAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	PENCURIAN DGN KEKERASAN	10	12	2	5	8	2	1	2	0	2	0	0	0	44
23	PERAS/ANCAM	15	6	5	3	0	1	4	0	0	1	0	0	0	35
24	PENGHELAPAN	43	28	11	3	9	1	13	4	7	20	0	1	0	140
25	PENIPUAN/PERBUATAN CURANG	27	21	3	1	2	4	1	1	3	48	0	0	1	112
26	MENGHANCURKAN / MERUSAK BRG	0	1	5	0	0	3	1	2	3	3	0	0	0	18
27	MENERIMA SUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	PENADAHAN	10	4	1	0	0	0	3	0	2	0	0	6	0	26
92.	MEMPEKERJAKAN ANAK DIBWH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93.	KEKERASAN DLM RMH TANGGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94.	PENYALAHGUNAAN SENPI/HANDAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95.	KEJ.NARKOTIKA (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96.	KEJ. PSIKOTROPIKA (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97.	TERORISME (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98.	PERAMPOKAN/PEMBAJAKAN (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99.	PERDAGANGAN MANUSIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.	PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.	HKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102.	PENCUCIAN UANG/MONEY LAUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103.	KEJ. DUNIA MAYA CYBERCRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.	KEJAHATAN PASAR MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105.	CURANMOR R2	123	25	36	11	25	9	13	2	18	10	0	0	0	272
106.	CURANMOR R4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
107.	CURAS SENPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108.	CURAS SAJAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109.	OBAT KERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110.	PEMILIKAN SENPI ILEGAL/HANDAK	0	0	1	1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	8
111.	PENGEROYOKAN	27	18	0	3	7	5	2	3	1	0	0	0	0	66
112.	SAJAM	38	21	8	2	11	1	5	2	3	5	0	0	0	96
113.	UANG PALSU	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
114.	PEMBUNUHAN	2	2	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	9
115.	PORNOGRAFI		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
116.	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117.	PERBANKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118.	P O A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119.	PROD & DAGANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120.	SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121.	CURWAT TLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122.	CURI KAYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123.	PEMBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
124.	KENAKALAN RMJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125.	KARA KONEKSITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126.	LAKA KERJA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
127.	LAKA LAUT/AIR	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
128.	LAKA UDARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129.	ABORSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130.	MIRAS	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	26
131.	THDP NEG SHBT KEPALA SHBT & WKLNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132.	THDP KEWJBAN DAN HAK KENEGARAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133.	THDP ASAL USUL DAN PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.	MERSK, GAR KESOPANAN/KESLAAN DI MK UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135.	PENCURIAN DLM LINGKUNGAN KELUARGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136.	MERUGIKAN PEMIUTANG/ORG YG BERHAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137.	MENGHANCURKAN ATAU MERUSAK BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138.	PENERBITAN DAN PERCETAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139.	LAKA LANTAS (TANPA KORBAN MANUSIA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140.	LAKA LANTAS KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141.	LAKA LANTAS	127	91	95	40	64	66	27	39	44	0	0	0	0	593
142.	LAKA LAUT KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143.	LAKA UDARA KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144.	LEDAKAN BOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145.	PENEMBAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146.	KEJKONVENSIONAL LAINNYA	2	5	3	0	0	0	3	0	1	4	0	0	0	18
147.	PREMANISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148.	GUL POK ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149.	PENISTAAN AGAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
150.	CABUL	16	12	0	0	6	0	17	0	0	1	0	0	0	52
151.	TKI ILLEGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152.	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153.	UNJUK RASA AMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154.	UNJUK RASA RAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	794	478	275	113	170	149	160	84	116	133	0	13	2	2487
	DD. KEJAHATAN TRANS NASIONAL														
01	NARKOTIKA	327	290	219	63	86	94	100	81	66	0	183	4	0	1513
02	TERORISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	PEROMPAKAN/PEMBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	PERDAGANGAN MANUSIA/TRAFFICKING IN PERSON	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
05	PENCUCIAN UANG / MONEY LOUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
06	KEJ DUNIA MAYA / CYBER CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	LUNDUP DAN PERDAGANGAN SENPI / ARM SMUGLING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	KEJ. EKONOMI LINTAS NEGARA / TRANS ECONOMY CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PSIKOTROPIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KEJ TRANS NASIONAL LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	328	290	220	63	86	94	100	81	66	0	183	4	3	1518
	EE.KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA														
01	KORUPSI	3	1	2	0	1	2	1	1	1	0	0	0	4	16
02	ILLEGAL LOGGING	0	0	4	0	4	10	10	6	6	0	0	7	1	47
03	ILLEGAL FISHING	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	4
04	ILLEGAL MINING	2	0	5	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	10
05	LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
06	UU PANGAN	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
07	BBM ILLEGAL	2	3	7	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	19
08	JU PERKEBUNAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	ITE	3	4	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	6	16
10	PERBANKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML	
11	P. KONSUMEN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
12	KARANTINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	UU PENYIARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	UU KESEHATAN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
15	PERTAMBANGAN	0	0	5	0	0	0	3	0	0	0	0	0	5	13	
16	UU AGRARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	PERDAGANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
18	PENYELUNDUPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	HAKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	BUDIDAYA TANAMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	PEL WIL PERAIRAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	KEJAHATAN THDP.KEKAYAAN NEGARA LAINNYA	0	0	1	0	0	5	1	0	0	0	0	0	6	13	
	JUMLAH	10	8	26	0	5	29	15	9	10	0	0	10	29	151	
	FF. KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTIJENSI															
1	KONFLIK SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	SEPARATISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	THDP. KEAMANAN NEGARA/MAKAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	THDP MARTABAT KEDUDUKAN PRES/WAPRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	KONFLIK OKNUM TNI-POLRI/KONFLIK APARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	BENTROK MASSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	PEMOGOKAN BURUH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	UNJUK RASA ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	PERKELAHIAN PELAJAR/MAHASISWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	PERKELAHIAN TANDING SATU LAWAN SATU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTINJENSI LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	GG. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIAN(HAM)															
01	PELANGGARAN HAM BERAT (GENOCIDE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	PEMBUNUHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	PEMUSNAHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	PENGUSIRAN ATAU PEMINDAHAN PENDUDUK SECARA PAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	PERAMPASAN KEMERDEKAAN/KEBEBASAN FISIK LAIN SECARA SEWENANG-WENANG YG MELANGGAR KETENTUAN POKOK HUKUM INTERNASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	PENYIKSAAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	PERKOSAAN,PERBUDAKAN SEKSUAL,PELACURAN SECARA PAKSA, STERILISASI SECARA PAKSA DLM. BENTUK KEKERASAN SEKSUAL YG SETARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	PENGANIYAHAN THDP SUATU KELOMPOK TERTENTU YG DIDASARI PERSAMAAN PAHAM POLITIK,RAS,KEBANGSAAN,ETNIS,BU DAYA,AGAMA,JNS KELAMIN/ALASAN LAIN YG TLH DIAKUI SECARA YUNIVERSAL SBG HAL YG DILARANG MENURU HUKUM INTERNASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	KEJAHATAN APARTHEID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	TORTURE (PENGANIYAHAN OLEH APARAT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	PELANGGARAN DLM HAL PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	KEKERASAN DLM RUMAH TANGGA	30	9	4	2	1	1	2	0	4	2	0	0	0	55	
14	PELANGGARAN HAM THDP ANAK	39	1	38	5	11	32	4	13	20	2	0	0	0	165	
15	PELANGGARAN HAM LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	JUMLAH	69	10	42	7	12	33	6	13	24	4	0	0	0	220	

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
HH. PELANGGARAN HUKUM NON.PIDANA															
1	BEJLAN DI ATAS JALAN UMUM ATAU TROTOAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEMINTA-MINTA DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BANGUNAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RUMAH MAKAN/RESTORAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TEMPAT HIBURAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	AGRARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PELANGGARAN HUKUM NON PIDANA LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. PELANGGARAN HUKUM PIDANA															
1	MENGGANGGU KETENTRAMAN DGN. MEMBERIKAN TERIAKAN ISYARAT PALSU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MENGGANGGU RAPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MEMBUAT GADUH PERTEMUAN AGAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	TENTANG MERINTANGI JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEMBUAT GADUH DI SIDANG PENGADILAN NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MERUSAK SURAT MAKLUMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KEALPAAN HINGGA BARANG SITAAN HILANG (RUSAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	KEALPAAN YG MENIMBULKAN RUSAKNYA MATERAI(SEGEL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PENGANIYAN THDP BINATANG SENGAJA MEMBUAT SAKIT,CACAT, MERUSAK KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	MEMBAWA HEWAN DGN PAS LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	PENGHINAAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PENGHINAAN DGN TULISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KARENA SALAHNYA ORANG MENJADI TERTAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PENGANIYAN RINGAN	8	15	37	0	11	7	13	0	7	1	0	0	0	99
15	PENCURIAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PENGGELAPAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	PENIPUAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	PENIPUAN THDP PEMBELI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PENGRUSAKAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	KARENA SALAHNYA MERUSAK PEKERJAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KENAKALAN THDP ORANG ATAU BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	MENINGGALKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MENJAGA ORANG GILA/ANAK-ANAK SEHINGGA MEMBAHAYAKAN ORANG GILA DAN ANAK TSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	MABUK DI TEMPAT UMUM SEHINGGA MENGGANGGU KETERTIBAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	DGN MELAWAN HAK MERINTANGI KEMREDEKAAN BERGERAK DI JALAN UMUM(MERINTANGI KAWANNYA UNTUK DIAJAK MOGOK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	PERBUATAN YG DPT MERUGIKAN,MENYUSAHKAN DAN MENDATANGKAN BAHAYA LALIN DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	TANPA IJIN DARI POLRI MEMASANG PERANGKAP BINATANG BUAS YANG DPT MEMBAHAYAKAN ORANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	TANPA IJIN POLRI MEMBAKAR GEDUNG ATAU RUMAH SENDIRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	MAMASANG API DI TEPI JALAN UMUM/DEKAT RUMAH YANG DPT MENDATANGKAN BAHAYA KEBAKARAN/KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	MENJUAL, MENAWARKAN MAKANAN ATAU MINUMAN YANG SUDAH RUSAK SEHINGGA DPT MERUSAK KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	MEMBUAT RIUH/INGAR PADA WAKTU MALAM MEMBUAT TIDUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
	TERGANGGU, MEMBUAT RIUH WAKTU ADA IBADAH/SEDANG PENGADILAN														
31	MINTA-MINTA DI TEMPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	GELANDANGAN / TDK MEMPUNYAI MATA PENCAHARIAN MENGEMBARA KE MANA-MANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	TDK BERHAK MEMAKAI GELAR BANGSAWAN BINTANG ATAU TANDA KEHORMATAN NEGERA RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	DI TEMPAT UMUM TIDAK BERHAK MEMAKAI PAKAIAN PEGAWAI NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	TANPA IJIN POLRI(PEGAWAI NEGERI YG BERHAK), MENGADAKAN PESTA UMUM DAN PAWAI DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	TDK MENURUT PERINTAH PETUNJUK POLRI PADA WAKTU ADA PESTA/ARAK-ARAKAN DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	SEBAGAI MATA PENCAHARIAN MENJALANKAN PEKERJAAN DOKTER GIGI DENGAN TIDAK MEMPUNYAI SURAT IJIN DAN DALAM KEADAAN YANG TIDAK MEMAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	LALAI TIDAK MEMBERITAHUKAN KEPADA KEPALA DESA ATAS KEPINDAHANNYA. LALAI MEMBERITAHU KPD KEPALA DESA STLH 14 HARI TINGGAL DI DAERAH TSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	LOSMEN, HOTEL PENGINAPAN YG PEMILIKNYA : (A) TDK MENGADAKAN BUKU TAMU (B) LALAI TDK MELAPORKAN/MEMPERLIHATKAN BUKU TAMU KEPADA POLRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	TDK DATANG SETELAH DIPANGGIL MENURUT UNDANG-UNDANG, UTK MENJADI SAKSI, AHLI / JURU BAHASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN YG DIMINTA KUASA HUKUM (CQ.POLRI) THDP BAHAYA BAGI KEAMANAN UMUM/BARANG / ORG SEDANG BERBUAT KEJAHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN THDP ORANG DI DLM KEADAAN BAHAYA MAUT, SEDANGKAN PERTOLONGAN TERSEBUT TDK MEMBAHAYAKAN DIRINYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	DIMUKA UMUM : MENYANYIKAN LAGU-LAGU, PIDATO, MENGADAKAN GAMBAR/TULISAN YG MELANGGAR KESOPANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	NYATA MABUK/KENTARA MABUK DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	MEMAKAI BINATANG UNTUK PEKERJAAN YG TERLAMPAU BERAT, MEMAKAI BINATANG YG CACAT, PINCANG, LUKA, HAMIL UTK PEKERJAAN SESUATU DGN KEADAANNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	MENJUAL, MENAWARKAN, MEMBAGIKAN, MENYERAHKAN BENDA JIMAT/PENANGKAL DENGAN DALIH BENDA TRSB ADA KESAKTIANNYA. MENGAJARKAN ILMU/KEPANDAIAAN SHG MENIMBULKAN KEPERCAYAAN TERHINDAR DARI BAHAYA APABILA MELAKUKAN TINDAK PIDANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	MEMBIARKAN TERNAKNYA YG BERSAYAP BERJALAN DI TANAH YG SUDAH DITABURI/DITANAMI DENGAN MELAWAN HAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	DGN TIADA BERHAK MEMBIARKAN TERNAKNYA BERJALAN DITANAH YG SUDAH DITABURI/DITANAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	MENINGGALKAN ORANG YG PERLU DITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	MEMBUKA RAHASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	PELAYARAN DAN PENERBANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
52	TTG KAM UMUM BG ORG.BRG DAN KES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	TTG KETERTIBAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	TTG PENGUASA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	TTG ASAL USUL DAN PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	TTG ORG YG PERLUDITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	TTG KESUSILAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	TTG TANAH/TANAMAN/PEKARANGAN	0	0	2	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	7
59	JABATAN	0	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	16
60	PELAYARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
	JUMLAH	8	30	39	0	11	7	15	0	7	5	0	6	0	128

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
	JJ. GANGGUAN THDP. ORANG														
1	PENEMUAN MAYAT	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
2	BUNUH DIRI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
3	TEMU BAYI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEMBUNYIKAN AUDIO BERLEBIHAN/KERAS / BISING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	GANGGUAN THDP ORANG LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3
	KK. GANGGUAN THDP. BARANG														
1	KEBAKARAN	49	0	1	0	12	0	11	0	3	0	0	0	0	76
2	KEHILANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	GANGGUAN THDP BARANG LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TANAH LONGSOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	49	0	1	0	12	0	11	0	3	0	0	0	0	76
	LL. GANGGUAN THDPHEWAN														
1	MEMBUNUH HEWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MM.BENCANA														
1	TANAH LONGSOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ANGIN PUTING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) 5 Kasus tertinggi tahun 2019

NO	KASUS	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TREND
		L	S	% SELRA	L	S	% SELRA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NARKOBA	1582	1411	89 %	1700	1513	89 %	N 118 (7 %)
2	CURAT	572	384	67 %	381	345	90 %	T 191 (33 %)
3	CURANMOR	466	258	55 %	414	276	66 %	T 52 (11 %)
4	ANIRAT	296	209	70 %	185	130	70 %	T 111 (37 %)
5	CURAS	76	46	60 %	60	44	73 %	T 16 (21 %)
6	CURBIS	76	276	363 %	239	292	122 %	N 163 (214 %)
7	ANIRING	148	122	82 %	111	99	89 %	T 37 (25 %)
8	PENGGELAPAN	331	220	66 %	207	140	67 %	T 124 (37 %)
9	PENIPUAN	298	186	62 %	130	112	86 %	T 168 (56 %)
10	JUDI	97	105	108 %	69	62	89 %	T 28 (28 %)
	JUMLAH	3.942	3.217	81 %	3.496	3.013	86 %	T 446 (11.3 %)

d. Data Tindak Pidana Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2020

1) Data laporan gangguan kamtibmas Satker dan Satwil tahun 2020 sebagai berikut:

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
	NN. KEJAHATAN KONVENSIONAL														
01	TTHD KETERTIBAN UMUM	44	4	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	70
02	MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORG/BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	SEGAJA MENIMBULKAN KEBAKARAN/ BANJIR (PEMBAKARAN)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
04	KARENA ALPA MENIMBULKAN KEBAKARAN/MELETUS/BANJIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	MEMBERI SUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	SUMPAAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
07	PEMALSUAN TTD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	PEMALSUAN SURAT	4	2	3	0	0	0	2	1	0	12	0	0	0	24
09	PERJINAHAN	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	5
10	PERKOSAAN	0	0	1	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	41
11	PERMAINAN JUDI	5	5	0	1	1	8	3	0	7	13	0	0	0	43
12	PENGHINAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	PENCULIKAN	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
14	PERBUATAN YANG TDK. MENYENANGKAN	1	1	1	0	0	2	2	1	1	1	0	0	0	10
15	KEJ. THDP JIWA ORG/PMBUNUHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PENGANIAYAAN BERAT	37	46	8	9	0	16	7	8	1	0	0	0	0	132
17	MENGAKIBATKAN ORG MATI	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
18	MENGAKIBATKAN ORANG LUKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PENCURIAN BIASA	48	54	19	7	7	2	20	16	6	6	0	6	0	191
20	PENCURIAN DG PEMBERATAN	80	106	21	47	19	58	13	9	17	2	0	10	0	382
21	PENCURIAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3
22	PENCURIAN DGN KEKERASAN	14	17	4	9	0	1	2	1	0	0	0	0	0	48
23	PERAS/ANCAM	4	8	8	4	2	3	4	5	5	2	0	0	0	45
24	PENGGELAPAN	82	36	19	14	10	8	21	10	6	16	0	0	0	222
25	PENIPUAN/PERBUATAN CURANG	27	20	4	14	4	2	6	2	1	25	0	0	0	105
26	MENGHANCURKAN / MERUSAK BRG	2	4	4	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	15
27	MENERIMA SUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	PENADAHAN	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3
219.	MEMPEKERJAKAN ANAK DIBWH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220.	KEKERASAN DLM RMH TANGGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221.	PENYALAHGUNAAN SENPI/HANDAK	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	4
222.	KEJ.NARKOTIKA (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223.	KEJ. PSIKOTROPIKA (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224.	TERORISME (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225.	PERAMPOKAN/PEMBAJAKAN (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226.	PERDAGANGAN MANUSIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227.	PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228.	HKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229.	PENCUCIAN UANG/MONEY LAUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230.	KEJ. DUNIA MAYA CYBERCRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231.	KEJAHATAN PASAR MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232.	CURANMOR R2	85	81	18	4	31	24	7	2	5	12	0	0	0	269
233.	CURANMOR R4	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
234.	CURAS SENPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235.	CURAS SAJAM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
236.	OBAT KERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237.	PEMILIKAN SENPI ILEGAL/HANDAK	0	0	1	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	7
238.	PENGEROYOKAN	20	28	4	5	3	0	6	1	2	0	0	0	0	69

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
239.	SAJAM	37	24	4	4	10	0	4	6	3	4	0	0	0	96
240.	UANG PALSU	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
241.	PEMBUNUHAN	2	2	2	1	0	2	2	1	0	0	0	0	0	12
242.	PORNOGRAFI	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
243.	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244.	PERBANKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245.	P O A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246.	PROD & DAGANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247.	SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248.	CURWAT TLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249.	CURI KAYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250.	PEMBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251.	KENAKALAN RMJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252.	KARA KONEKSITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253.	LAKA KERJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254.	LAKA LAUT/AIR	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
255.	LAKA UDARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256.	ABORSI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
257.	MIRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258.	THDP NEG SHBT KEPALA SHBT & WKLNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259.	THDP KEWJBAN DAN HAK KENEGARAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260.	THDP ASAL USUL DAN PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261.	MERSK, GAR KESOPANAN/KESLAAN DI MK UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262.	PENCURIAN DLM LINGKUNGAN KELUARGA	5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7
263.	MERUGIKAN PEMIUTANG/ORG YG BERHAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264.	MENGHANCURKAN ATAU MERUSAK BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265.	PENERBITAN DAN PERCETAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266.	LAKA LANTAS (TANPA KORBAN MANUSIA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267.	LAKA LANTAS KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268.	LAKA LANTAS	96	47	77	56	41	55	23	22	31	0	0	0	0	448
269.	LAKA LAUT KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270.	LAKA UDARA KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271.	LEDAKAN BOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272.	PENEMBAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273.	KEJKONVENSIONAL LAINNYA	5	8	1	2	4	0	9	1	0	5	0	0	0	35
274.	PREMANISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275.	GUL POK ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276.	PENISTAAN AGAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277.	CABUL	21	23	0	0	2	0	36	0	0	6	0	0	0	88
278.	TKI ILLEGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279.	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280.	UNJUK RASA AMAN	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
281.	UNJUK RASA RAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
	JUMLAH	625	522	203	179	142	251	173	91	85	107	0	19	0	2397
	OO. KEJAHATAN TRANS NASIONAL														
01	NARKOTIKA	197	233	175	71	109	90	147	76	83	0	234	4	0	1419
02	TERORISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	PEROMPAKAN/PEMBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	PERDAGANGAN MANUSIA/TRAFFICKING IN PERSON	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
05	PENCUCIAN UANG / MONEY LOUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
06	KEJ. DUNIA MAYA / CYBER CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	LUNDUP DAN PERDAGANGAN SENPI / ARM SMUGLING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	KEJ. EKONOMI LINTAS NEGARA / TRANS ECONOMY CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PSIKOTROPIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KEJ TRANS NASIONAL LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	198	234	178	71	109	90	147	76	83	0	234	4	6	1430

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RES KRI MUM	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
	PP. KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA														
01	KORUPSI	0	0	2	0	2	2	1	2	0	0	0	0	2	11
02	ILLEGAL LOGGING	1	0	0	0	2	5	8	5	1	0	0	6	7	35
03	ILLEGAL FISHING	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
04	ILLEGAL MINING	0	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	5	11
05	LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
06	UU PANGAN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
07	BBM ILLEGAL	0	2	3	0	1	19	2	4	0	0	0	3	0	34
08	UU PERKEBUNAN	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	4
09	ITE	1	4	2	0	0	0	2	3	1	0	0	0	13	26
10	PERBANKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
11	P. KONSUMEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
12	KARANTINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	UU PENYIARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	UU KESEHATAN	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	4
15	PERTAMBANGAN	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	10	14
16	UU AGRARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	PERDAGANGAN	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
18	PENYELUNDUPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	HAKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	BUDIDAYA TANAMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	PEL WIL PERAIRAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KEJAHATAN THDP. KEKAYAAN NEGARA LAINNYA	0	1	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	2	11
	JUMLAH	4	8	13	0	5	32	22	15	5	0	0	10	55	169
	QQ. KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTIJENSI														
1	KONFLIK SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SEPARATISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	THDP. KEAMANAN NEGARA/MAKAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	THDP. MARTABAT KEDUDUKAN PRES/WAPRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KONFLIK OKNUM TNI-POLRI/KONFLIK APARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BENTROK MASSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PEMOGOKAN BURUH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	UNJUK RASA ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PERKELAHIAN PELAJAR/MAHASISWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PERKELAHIAN TANDING SATU LAWAN SATU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTIJENSI LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RR. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)														
01	PELANGGARAN HAM BERAT (GENOCIDE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	PEMBUNUHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

03	PEMUSNAHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	PENGUSIRAN ATAU PEMINDAHAN PENDUDUK SECARA PAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	PERAMPASAN KEMERDEKAAN/KEBEBASAN FISIK LAIN SECARA SEWENANG-WENANG YG MELANGGAR KETENTUAN POKOK HUKUM INTERNASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	PENYIKSAAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	PERKOSAAN,PERBUDAKAN SEKSUAL,PELACURAN SECARA PAKSA, STERILISASI SECARA PAKSA DLM. BENTUK KEKERASAN SEKSUAL YG SETARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	PENGANIYAAAN THDP SUATU KELOMPOK TERTENTU YG DIDASARI PERSAMAAN PAHAM POLITIK,RAS,KEBANGSAAN,ETNIS,BUD AYA,AGAMA,JNS KELAMIN/ALASAN LAIN YG TLH DIAKUI SECARA YUNIVERSAL SBG HAL YG DILARANG MENURU HUKUM INTERNASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KEJAHATAN APARTHEID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	TORTURE (PENGANIYAAAN OLEH APARAT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RES KRI MUM	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIM SUS	JML
12	PELANGGARAN DLM HAL PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KEKERASAN DLM RUMAH TANGGA	14	5	7	9	4	4	3	4	3	8	0	0	0	61
14	PELANGGARAN HAM THDP ANAK	21	2	36	22	14	1	3	23	14	2	0	0	0	138
15	PELANGGARAN HAM LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	35	7	43	31	18	5	6	27	17	10	0	0	0	199
	SS. PELANGGARAN HUKUM NON.PIDANA														
1	BEJALAN DI ATAS JALAN UMUM ATAU TROTOAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEMINTA-MINTA DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BANGUNAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RUMAH MAKAN/RESTORAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TEMPAT HIBURAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	AGRARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PELANGGARAN HUKUM NON PIDANA LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TT.PELANGGARAN HUKUM PIDANA														
1	MENGGANGGU KETENTRAMAN DGN. MEMBERIKAN TERIAKAN ISYARAT PALSU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MENGGANGGU RAPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MEMBUAT GADUH PERTEMUAN AGAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	TENTANG MERINTANGI JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEMBUAT GADUH DI SIDANG PENGADILAN NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MERUSAK SURAT MAKLUMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KEALPAAN HINGGA BARANG SITAAN HILANG (RUSAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	KEALPAAN YG MENIMBULKAN RUSAKNYA MATERAI(SEGEL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PENGANIYAN THDP BINATANG SENGAJA MEMBUAT SAKIT,CACAT, MERUSAK KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	MEMBAWA HEWAN DGN PAS LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	PENGHINAAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PENGHINAAN DGN TULISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KARENA SALAHNYA ORANG MENJADI TERTAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PENGANIYAN RINGAN	17	6	14	9	16	0	16	2	1	1	0	0	0	82
15	PENCURIAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PENGELAPAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	PENIPUAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	PENIPUAN THDP PEMBELI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PENGRUSAKAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	KARENA SALAHNYA MERUSAK PEKERJAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KENAKALAN THDP ORANG ATAU BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	MENINGGALKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MENJAGA ORANG GILA/ANAK-ANAK SEHINGGA MEMBAHAYAKAN ORANG GILA DAN ANAK TSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	MABUK DI TEMPAT UMUM SEHINGGA MENGGANGGU KETERTIBAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	DGN MELAWAN HAK MERINTANGI KEMREDEKAAN BERGERAK DI JALAN UMUM(MERINTANGI KAWANNYA UNTUK DIAJAK MOGOK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	PERBUATAN YG DPT MERUGIKAN,MENYUSAHKAN DAN MENDATANGKAN BAHAYA LALIN DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	TANPA IJIN DARI POLRI MEMASANG PERANGKAP BINATANG BUAS YANG DPT MEMBAHAYAKAN ORANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	TANPA IJIN POLRI MEMBAKAR GEDUNG ATAU RUMAH SENDIRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	MAMASANG API DI TEPI JALAN UMUM/DEKAT RUMAH YANG DPT MENDATANGKAN BAHAYA KEBAKARAN/KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29	MENJUAL, MENAWARKAN MAKANAN ATAU MINUMAN YANG SUDAH RUSAK SEHINGGA DPT MERUSAK KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RES KRI MUM	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIM SUS	JML
30	MEMBUAT RIUH/INGAR PADA WAKTU MALAM MEMBUAT TIDUR TERGANGGU, MEMBUAT RIUH WAKTU ADA IBADAH/SEDANG PENGADILAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	MINTA-MINTA DI TEMPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	GELANDANGAN / TDK MEMPUNYAI MATA PENCAHARIAN MENGEMBARA KE MANA-MANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	TDK BERHAK MEMAKAI GELAR BANGSAWAN BINTANG ATAU TANDA KEHORMATAN NEGERA RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	DI TEMPAT UMUM TIDAK BERHAK MEMAKAI PAKAIAN PEGAWAI NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	TANPA IJIN POLRI(PEGAWAI NEGERI YG BERHAK), MENGADAKAN PESTA UMUM DAN PAWAI DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	TDK MENURUT PERINTAH PETUNJUK POLRI PADA WAKTU ADA PESTA/ARAK-ARAKAN DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	SEBAGAI MATA PENCAHARIAN MENJALANKAN PEKERJAAN DOKTER GIGI DENGAN TIDAK MEMPUNYAI SURAT IJIN DAN DALAM KEADAAN YANG TIDAK MEMAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	LALAI TIDAK MEMBERITAHUKAN KEPADA KEPALA DESA ATAS KEPINDAHANNYA. LALAI MEMBERITAHU KPD KEPALA DESA STLH 14 HARI TINGGAL DI DAERAH TSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	LOSMEN, HOTEL PENGINAPAN YG PEMILIKNYA : (A) TDK MENGADAKAN BUKU TAMU (B) LALAI TDK MELAPORKAN/MEMPERLIHATKAN BUKU TAMU KEPADA POLRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	TDK DATANG SETELAH DIPANGGIL MENURUT UNDANG-UNDANG, UTK MENJADI SAKSI, AHLI / JURU BAHASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN YG DIMINTA KUASA HUKUM (CQ.POLRI) THDP BAHAYA BAGI KEAMANAN UMUM/BARANG / ORG SEDANG BERBUAT KEJAHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN THDP ORANG DI DLM KEADAAN BAHAYA MAUT, SEDANGKAN PERTOLONGAN TERSEBUT TDK MEMBAHAYAKAN DIRINYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	DIMUKA UMUM : MENYANYIKAN LAGU-LAGU, PIDATO, MENGADAKAN GAMBAR/TULISAN YG MELANGGAR KESOPANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	NYATA MABUK/KENTARA MABUK DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	MEMAKAI BINATANG UNTUK PEKERJAAN YG TERLAMPAU BERAT, MEMAKAI BINATANG YG CACAT, PINCANG, LUKA, HAMIL UTK PEKERJAAN SESUATU DGN KEADAANNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	MENJUAL, MENAWARKAN, MEMBAGIKAN, MENYERAHKAN BENDA JIMAT/PENANGKAL DENGAN DALIH BENDA TRSB ADA KESAKTIANNYA. MENGAJARKAN ILMU/KEPANDAAN SHG MENIMBULKAN KEPERCAYAAN TERHINDAR DARI BAHAYA APABILA MELAKUKAN TINDAK PIDANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	MEMBIARKAN TERNAKNYA YG BERSAYAP BERJALAN DI TANAH YG SUDAH DITABURI/DITANAMI DENGAN MELAWAN HAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

48	DGN TIADA BERHAK MEMBIARKAN TERNAKNYA BERJALAN DITANAH YG SUDAH DITABURI/DITANAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	MENINGGALKAN ORANG YG PERLU DITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	MEMBUKA RAHASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	PELAYARAN DAN PENERBANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	TTG KAM UMUM BG ORG.BRG DAN KES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	TTG KETERTIBAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	TTG PENGUSAHA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	TTG ASAL USUL DAN PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RES KRI MUM	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIM SUS	JML	
56	TTG ORG YG PERLUDITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	TTG KESUSILAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
58	TTG TANAH/TANAMAN/PEKARANGAN	2	0	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	8	
59	JABATAN	2	9	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	15	
60	PELAYARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	
	JUMLAH	22	15	21	9	16	0	16	2	1	4	0	12	0	118	
	UU. GANGGUAN THDP. ORANG															
1	PENEMUAN MAYAT	0	0	0	0	8	0	0	0	0	1	0	0	0	9	
2	BUNUH DIRI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
3	TEMU BAYI	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
4	KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	MEMBUNYIKAN AUDIO BERLEBIHAN/KERAS / BISING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	GANGGUAN THDP ORANG LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	JUMLAH	0	3	0	0	10	0	0	0	0	1	0	0	0	14	
	GANGGUAN THDP. BARANG															
1	KEBAKARAN	27	2	2	1	4	1	4	0	0	0	0	0	0	41	
2	KEHILANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	GANGGUAN THDP BARANG LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	TANAH LONGSOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	JUMLAH	27	2	2	1	4	1	4	0	0	0	0	0	0	41	
	VV. GANGGUAN THDPHEWAN															
1	MEMBUNUH HEWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	WW. BENCANA															
1	TANAH LONGSOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	ANGIN PUTING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2) Data penyelesaian gangguan kamtibmas Satker / Satwil tahun 2020 sebagai berikut:

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIM SUS	JML	
	XX. KEJAHATAN KONVENSIONAL															
01	TTGD KETERTIBAN UMUM	42	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	55	
02	MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORG/BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	SENGAJA MENIMBULKAN KEBAKARAN/ BANJIR (PEMBAKARAN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	KARENA ALPA MENIMBULKAN KEBAKARAN/MELETUS/BANJIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	MEMBERI SUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	SUMPAN PALSU DAN KETERANGAN PALSU	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
07	PEMALSUAN TTD	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
08	PEMALSUAN SURAT	1	1	2	0	0	1	0	0	0	13	0	0	0	18	
09	PERJINAHAN	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	3	
10	PERKOSAAN	0	0	1	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	39	
11	PERMAINAN JUDI	4	4		1	1	6	3	0	7	5	0	0	0	31	

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
12	PENGHINAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
13	PENCULIKAN	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
14	PERBUATAN YANG TDK. MENYENANGKAN	0	1	0	0	0	4	2	0	0	1	0	0	0	8
15	KEJ. THDP JIWA ORG/PMBUNUHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PENGANIAYAAN BERAT	33	33	8	5	0	14	3	6	0	0	0	0	0	102
17	MENGAKIBATKAN ORG MATI	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
18	MENGAKIBATKAN ORANG LUKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PENCURIAN BIASA	44	81	19	7	7	2	25	16	6	6	0	6	0	219
20	PENCURIAN DG PEMBERATAN	91	98	21	43	16	44	7	5	18	2	0	3	0	348
21	PENCURIAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3
22	PENCURIAN DGN KEKERASAN	12	11	4	6		1	1	1	0	0	0	0	0	36
23	PERAS/ANCAM	6	6	8	3	2	1	4	3	4	3	0	0	0	40
24	PENGGELAPAN	71	30	19	10	10	9	11	8	3	19	0	0	0	190
25	PENIPUAN/PERBUATAN CURANG	16	17	3	6	4	0	5	2	1	22	0	0	0	76
26	MENGHANCURKAN / MERUSAK BRG	2	4	3	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	13
27	MENERIMA SUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	PENADAHAN	6	9	0	0	1	0	4	0	0	0	0	1	0	21
155.	MEMPEKERJAKAN ANAK DIBWH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156.	KEKERASAN DLM RMH TANGGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157.	PENYALAHGUNAAN SENPI/HANDAK	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	2	0	5
158.	KEJ.NARKOTIKA (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159.	KEJ. PSIKOTROPIKA (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160.	TERORISME (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161.	PERAMPOKAN/PEMBAJAKAN (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162.	PERDAGANGAN MANUSIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163.	PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164.	HKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165.	PENCUCIAN UANG/MONEY LAUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166.	KEJ. DUNIA MAYA CYBERCRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167.	KEJAHATAN PASAR MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168.	CURANMOR R2	69	83	18	4	14	15	5	3	3	15	0	0	0	229
169.	CURANMOR R4	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
170.	CURAS SENPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171.	CURAS SAJAM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
172.	OBAT KERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173.	PEMILIKAN SENPI ILEGAL/HANDAK	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	5
174.	PENGEROYOKAN	18	14	3	4	2	0	9	1	4	0	0	0	0	55
175.	SAJAM	26	19	4	4	10	0	2	4	10	2	0	0	0	81
176.	UANG PALSU	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
177.	PEMBUNUHAN	2	6	2	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	15
178.	PORNOGRAFI	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
179.	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
180.	PERBANKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181.	P O A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182.	PROD & DAGANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183.	SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184.	CURWAT TLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185.	CURI KAYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186.	PEMBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187.	KENAKALAN RMJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188.	KARA KONEKSITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
189.	LAKA KERJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190.	LAKA LAUT/AIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191.	LAKA UDARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192.	ABORSI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
193.	MIRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194.	THDP NEG SHBT KEPALA SHBT & WKLNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195.	THDP KEWJBAN DAN HAK KENEGARAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196.	THDP ASAL USUL DAN PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197.	MERSK, GAR KESOPANAN/KESSLAAN DI MK UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198.	PENCURIAN DLM LINGKUNGAN KELUARGA	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6
199.	MERUGIKAN PEMIUTANG/ORG YG BERHAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200.	MENGHANCURKAN ATAU MERUSAK BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201.	PENERBITAN DAN PERCETAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202.	LAKA LANTAS (TANPA KORBAN MANUSIA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203.	LAKA LANTAS KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204.	LAKA LANTAS	114	56	86	39	31	34	22	20	29	0	0	0	0	431
205.	LAKA LAUT KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206.	LAKA UDARA KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207.	LEDAKAN BOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208.	PENEMBAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209.	KEJKONVENSIONAL LAINNYA	5	3	1	0	4	0	5	2	1	1	0	0	0	22
210.	PREMANISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211.	GUL POK ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212.	PENISTAAN AGAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213.	CABUL	19	8	1	0	2	0	30	0	0	4	0	0	0	64
214.	TKI ILLEGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215.	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216.	UNJUK RASA AMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217.	UNJUK RASA RAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	592	488	208	134	107	189	143	78	86	99	0	12	0	2136
	YY. KEJAHATAN TRANS NASIONAL														
01	NARKOTIKA	214	226	175	71	109	62	105	72	68	0	169	4	0	1275
02	TERORISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	PEROMPIKAN/PEMBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	PERDAGANGAN MANUSIA/TRAFFICKING IN PERSON	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
05	PENCUCIAN UANG / MONEY LOUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
06	KEJ DUNIA MAYA / CYBER CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	LUNDUP DAN PERDAGANGAN SENPI / ARM SMUGLING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	KEJ. EKONOMI LINTAS NEGARA / TRANS ECONOMY CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PSIKOTROPIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KEJ TRANS NASIONAL LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	215	226	178	71	109	62	105	72	68	0	169	4	1	1280
	ZZ.KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA														
01	KORUPSI	0	0	0	0	2	1	2	1	0	0	0	0	6	12
02	ILLEGAL LOGGING	1	0	0	0	2	4	10	7	1	0	0	6	7	38
03	ILLEGAL FISHING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
04	ILLEGAL MINING	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	5	11
05	LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
06	UU PANGAN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
07	BBM ILLEGAL	0	0	3	0	1	18	3	3	0	0	0	3	0	31
08	UU PERKEBUNAN	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
09	ITE	2	0	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	13	21
10	PERBANKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
11	P. KONSUMEN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5
12	KARANTINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	UU PENYIARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	UU KESEHATAN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
15	PERTAMBANGAN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8
16	UU AGRARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
17	PERDAGANGAN	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
18	PENYELUNDUPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	HAKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	BUDIDAYA TANAMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	PEL WIL PERAIRAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KEJAHATAN THDP.KEKAYAAN NEGARA LAINNYA	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	JUMLAH	4	3	7	0	5	27	16	15	7	0	0	10	45	139
	ÄÄ. KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTIJENSI														
1	KONFLIK SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SEPARATISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	THDP. KEAMANAN NEGARA/MAKAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	THDP MARTABAT KEDUDUKAN PRES/WAPRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KONFLIK OKNUM TNI-POLRI/KONFLIK APARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BENTROK MASSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PEMOGOKAN BURUH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	UNJUK RASA ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PERKELAHIAN PELAJAR/MAHASISWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PERKELAHIAN TANDING SATU LAWAN SATU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTINJENSI LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÄÄ. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIAN(HAM)														
01	PELANGGARAN HAM BERAT (GENOCIDE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	PEMBUNUHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	PEMUSNAHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	PENGUSIRAN ATAU PEMINDAHAN PENDUDUK SECARA PAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	PERAMPASAN KEMERDEKAAN/KEBEBASAN FISIK LAIN SECARA SEWENANG-WENANG YG MELANGGAR KETENTUAN POKOK HUKUM INTERNASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	PENYIKSAAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	PERKOSAAN,PERBUDAKAN SEKSUAL,PELACURAN SECARA PAKSA, STERILISASI SECARA PAKSA DLM. BENTUK KEKERASAN SEKSUAL YG SETARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	PENGANIYAAN THDP SUATU KELOMPOK TERTENTU YG DIDASARI PERSAMAAN PAHAM POLITIK,RAS,KEBANGSAAN,ETNIS,BU DAYA,AGAMA,JNS KELAMIN/ALASAN LAIN YG TLH DIAKUI SECARA YUNIVERSAL SBG HAL YG DILARANG MENURU HUKUM INTERNASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KEJAHATAN APARTHEID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	TORTURE (PENGANIYAAN OLEH APARAT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PELANGGARAN DLM HAL PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KEKERASAN DLM RUMAH TANGGA	12	0	7	6	4	2	2	1	0	4	0	0	0	38
14	PELANGGARAN HAM THDP ANAK	18	1	36	17	12	1	2	23	0	0	0	0	0	110
15	PELANGGARAN HAM LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	30	1	43	23	16	3	4	24	0	4	0	0	0	148

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
	ÖÖ. PELANGGARAN HUKUM NON.PIDANA														
1	BEJALAN DI ATAS JALAN UMUM ATAU TROTOAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEMINTA-MINTA DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BANGUNAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RUMAH MAKAN/RESTORAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TEMPAT HIBURAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	AGRARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PELANGGARAN HUKUM NON PIDANA LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AAA. PELANGGARAN HUKUM PIDANA														
1	MENGGANGGU KETENTRAMAN DGN. MEMBERIKAN TERIAKAN ISYARAT PALSU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MENGGANGGU RAPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MEMBUAT GADUH PERTEMUAN AGAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	TENTANG MERINTANGI JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEMBUAT GADUH DI SIDANG PENGADILAN NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MERUSAK SURAT MAKLUMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KEALPAAN HINGGA BARANG SITAAN HILANG (RUSAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	KEALPAAN YG. MENIMBULKAN RUSAKNYA MATERAI(SEGEL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PENGANIYAAAN THDP BINATANG SENGAJA MEMBUAT SAKIT,CACAT, MERUSAK KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	MEMBAWA HEWAN DGN PAS LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	PENGHINAAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PENGHINAAN DGN TULISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KARENA SALAHNYA ORANG MENJADI TERTAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PENGANIYAAAN RINGAN	15	1	14	1	15	0	16	2	0	0	0	0	0	64
15	PENCURIAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PENGGELAPAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	PENIPUAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	PENIPUAN THDP PEMBELI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PENGRUSAKAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
20	KARENA SALAHNYA MERUSAK PEKERJAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KENAKALAN THDP ORANG ATAU BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	MENINGGALKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MENJAGA ORANG GILA/ANAK-ANAK SEHINGGA MEMBAHAYAKAN ORANG GILA DAN ANAK TSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	MABUK DI TEMPAT UMUM SEHINGGA MENGGANGGU KETERTIBAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	DGN MELAWAN HAK MERINTANGI KEMREDEKAAN BERGERAK DI JALAN UMUM(MERINTANGI KAWANNYA UNTUK DIAJAK MOGOK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	PERBUATAN YG DPT MERUGIKAN,MENYUSAHKAN DAN MENDATANGKAN BAHAYA LALIN DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	TANPA IJIN DARI POLRI MEMASANG PERANGKAP BINATANG BUAS YANG DPT MEMBAHAYAKAN ORANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	TANPA IJIN POLRI MEMBAKAR GEDUNG ATAU RUMAH SENDIRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	MAMASANG API DI TEPI JALAN UMUM/DEKAT RUMAH YANG DPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
	MENDATANGKAN BAHAYA KEBAKARAN/KECELAKAAN														
29	MENJUAL, MENAWARKAN MAKANAN ATAU MINUMAN YANG SUDAH RUSAK SEHINGGA DPT MERUSAK KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	MEMBUAT RIUH/INGAR PADA WAKTU MALAM MEMBUAT TIDUR TERGANGGU, MEMBUAT RIUH WAKTU ADA IBADAH/SEDANG PENGADILAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	MINTA-MINTA DI TEMPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	GELANDANGAN / TDK MEMPUNYAI MATA PENCAHARIAN MENGEMBARA KE MANA-MANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	TDK BERHAK MEMAKAI GELAR BANGSAWAN BINTANG ATAU TANDA KEHORMATAN NEGERA RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	DI TEMPAT UMUM TIDAK BERHAK MEMAKAI PAKAIAN PEGAWAI NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	TANPA IJIN POLRI/(PEGAWAI NEGERI YG BERHAK), MENGADAKAN PESTA UMUM DAN PAWAI DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	TDK MENURUT PERINTAH PETUNJUK POLRI PADA WAKTU ADA PESTA/ARAK-ARAKAN DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	SEBAGAI MATA PENCAHARIAN MENJALANKAN PEKERJAAN DOKTER GIGI DENGAN TIDAK MEMPUNYAI SURAT IJIN DAN DALAM KEADAAN YANG TIDAK MEMAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	LALAI TIDAK MEMBERITAHUKAN KEPADA KEPALA DESA ATAS KEPINDAHANNYA. LALAI MEMBERITAHU KPD KEPALA DESA STLH 14 HARI TINGGAL DI DAERAH TSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	LOSMEN, HOTEL PENGINAPAN YG PEMILIKNYA : (A) TDK MENGADAKAN BUKU TAMU (B) LALAI TDK MELAPORKAN/MEMPERLIHATKAN BUKU TAMU KEPADA POLRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	TDK DATANG SETELAH DIPANGGIL MENURUT UNDANG-UNDANG, UTK MENJADI SAKSI, AHLI / JURU BAHASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN YG DIMINTA KUASA HUKUM (CQ.POLRI) THDP BAHAYA BAGI KEAMANAN UMUM/BARANG / ORG SEDANG BERBUAT KEJAHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN THDP ORANG DI DLM KEADAAN BAHAYA MAUT, SEDANGKAN PERTOLONGAN TERSEBUT TDK MEMBAHAYAKAN DIRINYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	DIMUKA UMUM : MENYANYIKAN LAGU-LAGU, PIDATO, MENGADAKAN GAMBAR/TULISAN YG MELANGGAR KESOPANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	NYATA MABUK/KENTARA MABUK DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	MEMAKAI BINATANG UNTUK PEKERJAAN YG TERLAMPAU BERAT, MEMAKAI BINATANG YG CACAT, PINCANG, LUKA, HAMIL UTK PEKERJAAN SESUATU DGN KEADAANNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	MENJUAL, MENAWARKAN, MEMBAGIKAN, MENYERAHKAN BENDA JIMAT/PENANGKAL DENGAN DALIH BENDA TRSB ADA KESAKTIANNYA. MENGAJARKAN ILMU/KEPANDAIAAN SHG MENIMBULKAN KEPERCAYAAN TERHINDAR DARI BAHAYA APABILA MELAKUKAN TINDAK PIDANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	MEMBIARKAN TERNAKNYA YG BERSAYAP BERJALAN DI TANAH YG SUDAH DITABURI/DITANAMI DENGAN MELAWAN HAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
48	DGN TIADA BERHAK MEMBIARKAN TERNAKNYA BERJALAN DITANAH YG SUDAH DITABURI/DITANAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	MENINGGALKAN ORANG YG PERLU DITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	MEMBUKA RAHASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	PELAYARAN DAN PENERBANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	TTG KAM UMUM BG ORG.BRG DAN KES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	TTG KETERTIBAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	TTG PENGUASA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	TTG ASAL USUL DAN PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	TTG ORG YG PERLUDITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	TTG KESUSILAAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
58	TTG TANAH/TANAMAN/PEKARANGAN	1	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	9
59	JABATAN	1	8	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	13
60	PELAYARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	18	9	21	1	15	0	16	2	0	6	0	0	0	88

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
	BBB. GANGGUAN THDP. ORANG														
1	PENEMUAN MAYAT	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7
2	BUNUH DIRI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	TEMU BAYI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEMBUNYIKAN AUDIO BERLEBIHAN/KERAS / BISING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	GANGGUAN THDP ORANG LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8
	CCC. GANGGUAN THDP. BARANG														
1	KEBAKARAN	27	0	1	0	4	0	5	0	0	0	0	0	0	37
2	KEHILANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	GANGGUAN THDP BARANG LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TANAH LONGSOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	27	0	1	0	4	0	5	0	0	0	0	0	0	37
	DDD. GANGGUAN THDPHEWAN														
1	MEMBUNUH HEWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EEE. BENCANA														
1	TANAH LONGSOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ANGIN PUTING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

c. 5 Kasus tertinggi tahun 2020

NO	KASUS	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TREND
		L	S	% SELRA	L	S	% SELRA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NARKOBA	1700	1513	89 %	1419	1275	89 %	T 281 (16 %)
2	CURANMOR	414	276	66 %	274	234	85 %	T 140 (33 %)
3	CURAT	381	345	90 %	382	348	91 %	N 1 (0.2 %)
4	ANIRAT	185	130	70 %	132	102	77 %	T 53 (28 %)
5	CURAS	60	44	73 %	48	36	75 %	T 12 (20 %)
	JUMLAH	2.740	2.308	84 %	2.255	1995	88 %	T 485 (17 %)

e. Data Tindak Pidana Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2021

1) Data lapor gangguan kamtibmas Satker dan Satwil tahun 2021 sebagai berikut:

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
	FFF. KEJAHATAN KONVENSIONAL														
01	TTHD KETERTIBAN UMUM	44	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	54
02	MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORG/BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	SENGAJA MENIMBULKAN KEBAKARAN/ BANJIR (PEMBAKARAN)	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	4
04	KARENA ALPA MENIMBULKAN KEBAKARAN/MELETUS/BANJIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	MEMBERI SUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	PEMALSUAN TTD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
08	PEMALSUAN SURAT	7	4	0	3	0	2	6	2	0	8	0	0	0	32
09	PERJINAHAN	0	1	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	5
10	PERKOSAAN	0	1	4	0	0	30	6	1	0	0	0	0	0	42
11	PERMAINAN JUDI	9	1	1	3	5	8	17	1	3	12	0	0	0	60
12	PENGHINAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	PENCULIKAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14	PERBUATAN YANG TDK. MENYENANGKAN	0	0	2	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	6
15	KEJ. THDP JIWA ORG/PMBUNUHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PENGANIAYAAN BERAT	36	34	0	0	0	9	4	10	3	1	0	0	0	97
17	MENGAKIBATKAN ORG MATI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18	MENGAKIBATKAN ORANG LUKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PENCURIAN BIASA	37	15	17	4	5	9	40	14	10	2	0	2	0	155
20	PENCURIAN DG PEMBERATAN	86	123	25	28	18	42	5	7	23	13	0	2	0	372
21	PENCURIAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3
22	PENCURIAN DGN KEKERASAN	12	14	9	2	3	0	0	0	0	1	0	0	0	41
23	PERAS/ANCAM	4	6	7	4	1	0	4	0	0	5	0	1	0	32
24	PENGGELAPAN	35	17	11	12	3	11	14	8	3	7	0	0	0	121
25	PENIPUAN/PERBUATAN CURANG	26	33	2	7	4	6	4	2	0	17	0	0	0	101
26	MENGHANCURKAN / MERUSAK BRG	3	1	5	0	1	1	1	2	0	1	0	0	0	15
27	MENERIMA SUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	PENADAHAN	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	5
282.	MEMPEKERJAKAN ANAK DIBWH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283.	KEKERASAN DLM RMH TANGGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284.	PENYALAHGUNAAN SENPI/HANDAK	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
285.	KEJ.NARKOTIKA (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286.	KEJ. PSIKOTROPIKA (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287.	TERORISME (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288.	PERAMPOKAN/PEMBAJAKAN (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289.	PERDAGANGAN MANUSIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290.	PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291.	HKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292.	PENCUCIAN UANG/MONEY LAUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293.	KEJ. DUNIA MAYA CYBERCRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294.	KEJAHATAN PASAR MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295.	CURANMOR R2	149	69	17	16	47	22	12	2	10	7	0	0	0	351
296.	CURANMOR R4	0	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	6
297.	CURAS SENPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298.	CURAS SAJAM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
299.	OBAT KERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300.	PEMILIKAN SENPI ILEGAL/HANDAK	0	0	4	0	1	4	3	0	1	0	0	0	0	13
301.	PENGEROYOKAN	20	15	1	5	7	0	8	4	3	0	0	0	0	63
302.	SAJAM	20	10	5	3	1	0	10	1	2	18	0	0	0	70

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
303.	UANG PALSU	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
304.	PEMBUNUHAN	4		3	3	8	1	3	2	0	0	0	0	0	24
305.	PORNOGRAFI	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
306.	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307.	PERBANKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308.	P O A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309.	PROD & DAGANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310.	SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311.	CURWAT TLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312.	CURI KAYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313.	PEMBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314.	KENAKALAN RMJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315.	KARA KONEKSITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316.	LAKA KERJA	2	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6
317.	LAKA LAUT/AIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318.	LAKA UDARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319.	ABORSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320.	MIRAS	0	0	14	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	18
321.	THDP NEG SHBT KEPALA SHBT & WKLNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322.	THDP KEWJBAN DAN HAK KENEGARAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323.	THDP ASAL USUL DAN PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324.	MERSK, GAR KESOPANAN/KESLAAN DI MK UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325.	PENCURIAN DLM LINGKUNGAN KELUARGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326.	MERUGIKAN PEMIUTANG/ORG YG BERHAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327.	MENGHANCURKAN ATAU MERUSAK BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
328.	PENERBITAN DAN PERCETAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329.	LAKA LANTAS (TANPA KORBAN MANUSIA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330.	LAKA LANTAS KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331.	LAKA LANTAS	97	71	89	39	67	25	22	34	52	0	0	0	0	496
332.	LAKA LAUT KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333.	LAKA UDARA KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334.	LEDAKAN BOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335.	PENEMBAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336.	KEJKONVENSIONAL LAINNYA	7	8	1	25	2	0	2	0	0	5	0	0	0	50
337.	PREMANISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338.	GUL POK ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339.	PENISTAAN AGAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340.	CABUL	24	20	1	4	12	0	31	0	0	1	0	0	0	93
341.	TKI ILLEGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342.	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
343.	UNJUK RASA AMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
344.	UNJUK RASA RAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
	JUMLAH	631	449	221	162	187	183	196	98	110	106	0	8	0	2351
	GGG. KEJAHATAN TRANS NASIONAL														
01	NARKOTIKA	219	190	224	57	93	81	253	86	76	0	64	4	0	1347
02	TERORISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	PEROMPAKAN/PEMBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	PERDAGANGAN MANUSIA/TRAFFICKING IN PERSON	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
05	PENCUCIAN UANG / MONEY LOUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
06	KEJ. DUNIA MAYA / CYBER CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	LUNDUP DAN PERDAGANGAN SENPI / ARM SMUGLING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	KEJ. EKONOMI LINTAS NEGARA / TRANS ECONOMY CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PSIKOTROPIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KEJ TRANS NASIONAL LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	223	191	224	57	93	81	253	86	76	0	64	4	9	1361

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RES KRI MUM	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIM SUS	JML
	HHH. KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA														
01	KORUPSI	1	1	2	1	0	1	1	2	1	0	0	0	7	17
02	ILLEGAL LOGGING	2	0	3	2	0	6	6	3	3	0	0	0	0	25
03	ILLEGAL FISHING	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	2	0	7
04	ILLEGAL MINING	1	1	8	0	0	3	0	0	0	0	0	4	4	21
05	LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
06	UU PANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	BBM ILLEGAL	0	2	0	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	8
08	UU PERKEBUNAN	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	17
09	ITE	4	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	11	19
10	PERBANKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
11	P. KONSUMEN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12	KARANTINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	UU PENYIARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	UU KESEHATAN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
15	PERTAMBANGAN	0	0	3	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	9
16	UU AGRARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	PERDAGANGAN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
18	PENYELUNDUPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	HAKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	BUDIDAYA TANAMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	PEL WIL PERAIRAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	KEJAHATAN THDP.KEKAYAAN NEGARA LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17	19
	JUMLAH	9	5	16	7	0	18	12	8	24	0	0	8	40	147
	III. KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTIJENSI														
1	KONFLIK SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SEPARATISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	THDP. KEAMANAN NEGARA/MAKAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	THDP MARTABAT KEDUDUKAN PRES/WAPRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KONFLIK OKNUM TNI-POLRI/KONFLIK APARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BENTROK MASSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PEMOGOKAN BURUH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	UNJUK RASA ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PERKELAHIAN PELAJAR/MAHASISWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PERKELAHIAN TANDING SATU LAWAN SATU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTIJENSI LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JJJ. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIAN(HAM)														
01	PELANGGARAN HAM BERAT (GENOCIDE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

02	PEMBUNYAHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	PEMUSNAHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	PENGUSIRAN ATAU PEMINDAHAN PENDUDUK SECARA PAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	PERAMPASAN KEMERDEKAAN/KEBEBASAN FISIK LAIN SECARA SEWENANG-WENANG YG MELANGGAR KETENTUAN POKOK HUKUM INTERNASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	PENYIKSAAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	PERKOSAAN,PERBUDAKAN SEKSUAL,PELACURAN SECARA PAKSA, STERILISASI SECARA PAKSA DLM. BENTUK KEKERASAN SEKSUAL YG SETARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	PENGANIYAAAN THDP SUATU KELOMPOK TERTENTU YG DIDASARI PERSAMAAN PAHAM POLITIK,RAS,KEBANGSAAN,ETNIS,BU DAYA,AGAMA,JNS KELAMIN/ALASAN LAIN YG TLH DIAKUI SECARA YUNIVERSAL SBG HAL YG DILARANG MENURU HUKUM INTERNASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KEJAHATAN APARTEID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	TORTURE (PENGANIYAAAN OLEH APARAT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RES KRI MUM	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIM SUS	JML
12	PELANGGARAN DLM HAL PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KEKERASAN DLM RUMAH TANGGA	17	0	4	2	4	0	3	0	0	2	0	0	0	32
14	PELANGGARAN HAM THDP ANAK	18	2	24	3	8	0	3	13	18	7	0	0	0	96
15	PELANGGARAN HAM LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	35	2	28	5	12	0	6	13	18	9	0	0	0	128
	KKK. PELANGGARAN HUKUM NON.PIDANA														
1	BEJLAN DI ATAS JALAN UMUM ATAU TROTOAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEMINTA-MINTA DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BANGUNAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RUMAH MAKAN/RESTORAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TEMPAT HIBURAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	AGRARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PELANGGARAN HUKUM NON PIDANA LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	LLL. PELANGGARAN HUKUM PIDANA														
1	MENGGANGGU KETENTRAMAN DGN. MEMBERIKAN TERIAKAN ISYARAT PALSU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MENGGANGGU RAPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MEMBUAT GADUH PERTEMUAN AGAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	TENTANG MERINTANGI JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEMBUAT GADUH DI SIDANG PENGADILAN NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MERUSAK SURAT MAKLUMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KEALPAAN HINGGA BARANG SITAAN HILANG (RUSAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	KEALPAAN YG. MENIMBULKAN RUSAKNYA MATERAI(SEGEL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PENGANIYAAAN THDP BINATANG SENGAJA MEMBUAT SAKIT,CACAT, MERUSAK KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	MEMBAWA HEWAN DGN PAS LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	PENGHINAAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PENGHINAAN DGN TULISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13	KARENA SALAHNYA ORANG MENJADI TERTAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PENGANIYAAAN RINGAN	23	4	22	14	21	0	3	1	2	1	0	0	0	91
15	PENCURIAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PENGGELAPAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	PENIPUAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	PENIPUAN THDP PEMBELI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PENGRUSAKAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	KARENA SALAHNYA MERUSAK PEKERJAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KENAKALAN THDP ORANG ATAU BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	MENINGGALKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MENJAGA ORANG GILA/ANAK-ANAK SEHINGGA MEMBAHAYAKAN ORANG GILA DAN ANAK TSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	MABUK DI TEMPAT UMUM SEHINGGA MENGGANGGU KETERTIBAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	DGN MELAWAN HAK MERINTANGI KEMREDEKAAN BERGERAK DI JALAN UMUM(MERINTANGI KAWANNYA UNTUK DIAJAK MOGOK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	PERBUATAN YG DPT MERUGIKAN,MENYUSAHKAN DAN MENDATANGKAN BAHAYA LALIN DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	TANPA IJIN DARI POLRI MEMASANG PERANGKAP BINATANG BUAS YANG DPT MEMBAHAYAKAN ORANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	TANPA IJIN POLRI MEMBAKAR GEDUNG ATAU RUMAH SENDIRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	MAMASANG API DI TEPI JALAN UMUM/DEKAT RUMAH YANG DPT MENDATANGKAN BAHAYA KEBAKARAN/KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	MENJUAL, MENAWARKAN MAKANAN ATAU MINUMAN YANG SUDAH RUSAK SEHINGGA DPT MERUSAK KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RES KRI MUM	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIM SUS	JML
30	MEMBUAT RIUH/INGAR PADA WAKTU MALAM MEMBUAT TIDUR TERGANGGU, MEMBUAT RIUH WAKTU ADA IBADAH/SEDANG PENGADILAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	MINTA-MINTA DI TEMPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	GELANDANGAN / TDK MEMPUNYAI MATA PENCAHARIAN MENGEMBARA KE MANA-MANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	TDK BERHAK MEMAKAI GELAR BANGSAWAN BINTANG ATAU TANDA KEHORMATAN NEGERA RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	DI TEMPAT UMUM TIDAK BERHAK MEMAKAI PAKAIAN PEGAWAI NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	TANPA IJIN POLRI/(PEGAWAI NEGERI YG BERHAK), MENGADAKAN PESTA UMUM DAN PAWAI DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	TDK MENURUT PERINTAH PETUNJUK POLRI PADA WAKTU ADA PESTA/ARAK-ARAKAN DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	SEBAGAI MATA PENCAHARIAN MENJALANKAN PEKERJAAN DOKTER GIGI DENGAN TIDAK MEMPUNYAI SURAT IJIN DAN DALAM KEADAAN YANG TIDAK MEMAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	LALAI TIDAK MEMBERITAHUKAN KEPADA KEPALA DESA ATAS KEPINDAHANNYA. LALAI MEMBERITAHU KPD KEPALA DESA STLH 14 HARI TINGGAL DI DAERAH TSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	LOSMEN, HOTEL PENGINAPAN YG PEMILIKNYA : (A) TDK MENGADAKAN BUKU TAMU (B) LALAI TDK MELAPORKAN/MEMPERLIHATKAN BUKU TAMU KEPADA POLRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

40	TDK DATANG SETELAH DIPANGGIL MENURUT UNDANG-UNDANG, UTK MENJADI SAKSI, AHLI / JURU BAHASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN YG DIMINTA KUASA HUKUM (CQ.POLRI) THDP BAHAYA BAGI KEAMANAN UMUM/BARANG / ORG SEDANG BERBUAT KEJAHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN THDP ORANG DI DLM KEADAAN BAHAYA MAUT, SEDANGKAN PERTOLONGAN TERSEBUT TDK MEMBAHAYAKAN DIRINYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	DIMUKA UMUM : MENYANYIKAN LAGU-LAGU, PIDATO, MENGADAKAN GAMBAR/TULISAN YG MELANGGAR KESOPANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	NYATA MABUK/KENTARA MABUK DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	MEMAKAI BINATANG UNTUK PEKERJAAN YG TERLAMPAU BERAT, MEMAKAI BINATANG YG CACAT, PINCANG, LUKA, HAMIL UTK PEKERJAAN SESUATU DGN KEADAANNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	MENJUAL, MENAWARKAN, MEMBAGIKAN, MENYERAHKAN BENDA JIMAT/PENANGKAL DENGAN DALIH BENDA TRSB ADA KESAKTIANNYA. MENGAJARKAN ILMU/KEPANDAIAAN SHG MENIMBULKAN KEPERCAYAAN TERHINDAR DARI BAHAYA APABILA MELAKUKAN TINDAK PIDANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	MEMBIARKAN TERNAKNYA YG BERSAYAP BERJALAN DI TANAH YG SUDAH DITABURI/DITANAMI DENGAN MELAWAN HAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	DGN TIADA BERHAK MEMBIARKAN TERNAKNYA BERJALAN DITANAH YG SUDAH DITABURI/DITANAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	MENINGGALKAN ORANG YG PERLU DITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	MEMBUKA RAHASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	PELAYARAN DAN PENERBANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	TTG KAM UMUM BG ORG.BRG DAN KES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	TTG KETERTIBAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	TTG PENGUASA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	TTG ASAL USUL DAN PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RES KRI MUM	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIM SUS	JML
56	TTG ORG YG PERLUDITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	TTG KESUSILAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	TTG TANAH/TANAMAN/PEKARANGAN	3	2	0	1	0	0	3	0	1	5	0	0	0	15
59	JABATAN	12	9	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	26
60	PELAYARAN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13	2	16
	JUMLAH	38	15	23	15	21	0	9	1	3	10	0	13	2	150
	MMM. GANGGUAN THDP. ORANG														
1	PENEMUAN MAYAT	0	1	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	5
2	BUNUH DIRI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	TEMU BAYI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEMBUNYIKAN AUDIO BERLEBIHAN/KERAS / BISING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	GANGGUAN THDP ORANG LAINNYA	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	JUMLAH	0	1	1	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	8
	GANGGUAN THDP. BARANG														
1	KEBAKARAN	18	1	1	0	13	0	6	0	0	0	0	0	0	39
2	KEHILANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	GANGGUAN THDP BARANG LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TANAH LONGSOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	18	1	1	0	13	0	6	0	0	0	0	0	0	39
	NNN. GANGGUAN THDPHEWAN														

1	MEMBUNUH HEWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	000. BENCANA															
1	TANAH LONGSOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ANGIN PUTING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) Data penyelesaian gangguan kamtibmas Satker / Satwil tahun 2021 sebagai berikut :

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
	PPP. KEJAHATAN KONVENSIONAL														
01	TTHD KETERTIBAN UMUM	43	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	55
02	MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORG/BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	SEGAJA MENIMBULKAN KEBAKARAN/ BANJIR (PEMBAKARAN)	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3
04	KARENA ALPA MENIMBULKAN KEBAKARAN/MELETUS/BANJIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	MEMBERI SUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	PEMALSUAN TTD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	PEMALSUAN SURAT	4	5	0	3	0	1	3	1	0	6	0	0	0	23
09	PERJINAHAN	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3
10	PERKOSAAN	0	0	4	1	0	23	4	1	0	0	0	0	0	33
11	PERMAINAN JUDI	9	1	1	3	5	11	17	1	5	13	0	0	0	66
12	PENGHINAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	PENCULIKAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14	PERBUATAN YANG TDK. MENYENANGKAN	0	0	2	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0	8
15	KEJ. THDP JIWA ORG/PMBUNUHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PENGANIAYAAN BERAT	33	22	0	0	0	9	17	6	1	1	0	0	0	89
17	MENGAKIBATKAN ORG MATI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18	MENGAKIBATKAN ORANG LUKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PENCURIAN BIASA	35	54	16	4	3	8	35	13	10	1	0	2	0	181
20	PENCURIAN DG PEMBERATAN	83	74	22	28	11	50	2	5	24	8	0	1	0	308
21	PENCURIAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	PENCURIAN DGN KEKERASAN	12	12	8	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	36
23	PERAS/ANCAM	6	5	7	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	23
24	PENGGELAPAN	33	12	10	16	3	12	15	9	2	3	0	0	0	115
25	PENIPUAN/PERBUATAN CURANG	14	18	2	7	4	6	4	1	0	10	0	0	0	66
26	MENGHANCURKAN / MERUSAK BRG	3	1	4	0	1	2	1	3	0	0	0	0	0	15
27	MENERIMA SUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	PENADAHAN	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	5
218.	MEMPEKERJAKAN ANAK DIBWH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219.	KEKERASAN DLM RMH TANGGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220.	PENYALAHGUNAAN SENPI/HANDAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
221.	KEJ.NARKOTIKA (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222.	KEJ. PSIKOTROPIKA (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223.	TERORISME (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224.	PERAMPOKAN/PEMBAJAKAN (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225.	PERDAGANGAN MANUSIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226.	PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227.	HKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228.	PENCUCIAN UANG/MONEY LAUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229.	KEJ. DUNIA MAYA CYBERCRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230.	KEJAHATAN PASAR MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
231.	CURANMOR R2	120	17	17	16	16	15	6	0	9	6	0	0	0	222
232.	CURANMOR R4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
233.	CURAS SENPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234.	CURAS SAJAM	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4
235.	OBAT KERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236.	PEMILIKAN SENPI ILEGAL/HANDAK	0	0	4	0	1	4	2	0	1	0	0	0	0	12
237.	PENGEROYOKAN	13	15	1	4	6	0	3	7	3	0	0	0	0	52
238.	SAJAM	20	5	5	3	1	0	7	2	2	2	0	0	0	47
239.	UANG PALSU	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
240.	PEMBUNUHAN	4	1	3	3	0	2	2	2	0	0	0	0	0	17
241.	PORNOGRAFI	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
242.	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243.	PERBANKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244.	P O A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245.	PROD & DAGANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246.	SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247.	CURWAT TLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248.	CURI KAYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249.	PEMBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250.	KENAKALAN RMJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251.	KARA KONEKSITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252.	LAKA KERJA	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
253.	LAKA LAUT/AIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254.	LAKA UDARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255.	ABORSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256.	MIRAS	0	0	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
257.	THDP NEG SHBT KEPALA SHBT & WKLNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258.	THDP KEWJBAN DAN HAK KENEGARAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259.	THDP ASAL USUL DAN PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260.	MERSK, GAR KESOPANAN/KESSLAAN DI MK UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261.	PENCURIAN DLM LINGKUNGAN KELUARGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262.	MERUGIKAN PEMIUTANG/ORG YG BERHAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263.	MENGHANCURKAN ATAU MERUSAK BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264.	PENERBITAN DAN PERCETAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265.	LAKA LANTAS (TANPA KORBAN MANUSIA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266.	LAKA LANTAS KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267.	LAKA LANTAS	94	71	85	49	64	20	18	33	51	0	0	0	0	485
268.	LAKA LAUT KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269.	LAKA UDARA KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270.	LEDAKAN BOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271.	PENEMBAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272.	KEJKONVENSIONAL LAINNYA	6	7	1	24	1	0	7	0	0	3	0	0	0	49
273.	PREMANISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274.	GUL POK ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275.	PENISTAAN AGAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276.	CABUL	22	7	1	2	6	0	18	0	0	0	0	0	0	56
277.	TKI ILEGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278.	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279.	UNJUK RASA AMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
280.	UNJUK RASA RAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	565	332	209	168	127	178	166	89	109	54	0	6	0	2003
	QQQ. KEJAHATAN TRANS NASIONAL														
01	NARKOTIKA	227	179	224	57	93	70	119	88	66	0	81	4	0	1208
02	TERORISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	PEROMPIKAN/PEMBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	PERDAGANGAN MANUSIA/TRAFFICKING IN PERSON	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
05	PENCUCIAN UANG / MONEY LOUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
06	KEJ DUNIA MAYA / CYBER CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	LUNDUP DAN PERDAGANGAN SENPI / ARM SMUGLING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	KEJ. EKONOMI LINTAS NEGARA / TRANS ECONOMY CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PSIKOTROPIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KEJ TRANS NASIONAL LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	231	180	224	57	93	70	119	88	66	0	81	4	4	1217
	RRR. KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA														
01	KORUPSI	1	0	2	0	0	2	2	2	0	0	0	0	5	14
02	ILLEGAL LOGGING	2	0	3	2	0	7	1	2	3	0	0	0	1	21
03	ILLEGAL FISHING	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	6
04	ILLEGAL MINING	1	0	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10
05	LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
06	UU PANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	BBM ILLEGAL	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	5
08	UU PERKEBUNAN	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
09	ITE	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10	15
10	PERBANKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
11	P. KONSUMEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	KARANTINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	UU PENYIARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	UU KESEHATAN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
15	PERTAMBANGAN	0	0	3	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	7
16	UU AGRARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	PERDAGANGAN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
18	PENYELUNDUPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	HAKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	BUDIDAYA TANAMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	PEL WIL PERAIRAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	KEJAHATAN THDP.KEKAYAAN NEGARA LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	9
	JUMLAH	8	0	16	5	0	18	8	4	13	0	0	3	28	103
	SSS. KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTIJENSI														
1	KONFLIK SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SEPARATISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	THDP. KEAMANAN NEGARA/MAKAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	THDP MARTABAT KEDUDUKAN PRES/WAPRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KONFLIK OKNUM TNI-POLRI/KONFLIK APARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BENTROK MASSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PEMOGOKAN BURUH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	UNJUK RASA ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PERKELAHIAN PELAJAR/MAHASISWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PERKELAHIAN TANDING SATU LAWAN SATU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTIJENSI LAINNYA	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	JUMLAH	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	TTT. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIAN(HAM)														
01	PELANGGARAN HAM BERAT (GENOCIDE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	PEMBUNUHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	PEMUSNAHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	PENGUSIRAN ATAU PEMINDAHAN PENDUDUK SECARA PAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
05	PERAMPASAN KEMERDEKAAN/KEBEBASAN FISIK LAIN SECARA SEWENANG-WENANG YG MELANGGAR KETENTUAN POKOK HUKUM INTERNASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	PENYIKSAAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	PERKOSAAN,PERBUDAKAN SEKSUAL,PELACURAN SECARA PAKSA, STERILISASI SECARA PAKSA DLM. BENTUK KEKERASAN SEKSUAL YG SETARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	PENGANIYAAAN THDP SUATU KELOMPOK TERTENTU YG DIDASARI PERSAMAAN PAHAM POLITIK,RAS,KEBANGSAAN,ETNIS,BU DAYA,AGAMA,JNS KELAMIN/ALASAN LAIN YG TLH DIAKUI SECARA YUNIVERSAL SBG HAL YG DILARANG MENURU HUKUM INTERNASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KEJAHATAN APARTHEID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	TORTURE (PENGANIYAAAN OLEH APARAT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PELANGGARAN DLM HAL PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KEKERASAN DLM RUMAH TANGGA	16	1	4	2	3	1	2	1	2	1	0	0	0	33
14	PELANGGARAN HAM THDP ANAK	14	0	24	5	9	0	3	13	13	1	0	0	0	82
15	PELANGGARAN HAM LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	30	1	28	7	12	1	5	14	15	2	0	0	0	115

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
	UUU. PELANGGARAN HUKUM NON.PIDANA														
1	BEJALAN DI ATAS JALAN UMUM ATAU TROTOAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEMINTA-MINTA DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BANGUNAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RUMAH MAKAN/RESTORAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TEMPAT HIBURAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	AGRARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PELANGGARAN HUKUM NON PIDANA LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VVV. PELANGGARAN HUKUM PIDANA														
1	MENGGANGGU KETENTRAMAN DGN. MEMBERIKAN TERIAKAN ISYARAT PALSU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MENGGANGGU RAPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MEMBUAT GADUH PERTEMUAN AGAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	TENTANG MERINTANGI JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEMBUAT GADUH DI SIDANG PENGADILAN NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MERUSAK SURAT MAKLUMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KEALPAAN HINGGA BARANG SITAAN HILANG (RUSAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	KEALPAAN YG. MENIMBULKAN RUSAKNYA MATERAI(SEGEL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PENGANIYAAAN THDP BINATANG SENGAJA MEMBUAT SAKIT,CACAT, MERUSAK KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	MEMBAWA HEWAN DGN PAS LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	PENGHINAAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PENGHINAAN DGN TULISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KARENA SALAHNYA ORANG MENJADI TERTAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PENGANIYAAAN RINGAN	13	3	21	14	13	0	0	1	2	1	0	0	0	68
15	PENCURIAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
16	PENGGELAPAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	PENIPUAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	PENIPUAN THDP PEMBELI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PENGRUSAKAN RINGAN														
20	KARENA SALAHNYA MERUSAK PEKERJAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KENAKALAN THDP ORANG ATAU BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	MENINGGALKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MENJAGA ORANG GILA/ANAK-ANAK SEHINGGA MEMBAHAYAKAN ORANG GILA DAN ANAK TSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	MABUK DI TEMPAT UMUM SEHINGGA MENGGANGGU KETERTIBAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	DGN MELAWAN HAK MERINTANGI KEMREDEKAAN BERGERAK DI JALAN UMUM(MERINTANGI KAWANNYA UNTUK DIAJAK MOGOK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	PERBUATAN YG DPT MERUGIKAN,MENYUSAHKAN DAN MENDATANGKAN BAHAYA LALIN DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	TANPA IJIN DARI POLRI MEMASANG PERANGKAP BINATANG BUAS YANG DPT MEMBAHAYAKAN ORANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	TANPA IJIN POLRI MEMBAKAR GEDUNG ATAU RUMAH SENDIRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	MAMASANG API DI TEPI JALAN UMUM/DEKAT RUMAH YANG DPT MENDATANGKAN BAHAYA KEBAKARAN/KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	MENJUAL, MENAWARKAN MAKANAN ATAU MINUMAN YANG SUDAH RUSAK SEHINGGA DPT MERUSAK KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	MEMBUAT RIUH/INGAR PADA WAKTU MALAM MEMBUAT TIDUR TERGANGGU, MEMBUAT RIUH WAKTU ADA IBADAH/SEDANG PENGADILAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	MINTA-MINTA DI TEMPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	GELANDANGAN / TDK MEMPUNYAI MATA PENCAHARIAN MENGEMBARA KE MANA-MANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	TDK BERHAK MEMAKAI GELAR BANGSAWAN BINTANG ATAU TANDA KEHORMATAN NEGERA RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	DI TEMPAT UMUM TIDAK BERHAK MEMAKAI PAKAIAN PEGAWAI NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	TANPA IJIN POLRI(PEGAWAI NEGERI YG BERHAK), MENGADAKAN PESTA UMUM DAN PAWAI DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	TDK MENURUT PERINTAH PETUNJUK POLRI PADA WAKTU ADA PESTA/ARAK-ARAKAN DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	SEBAGAI MATA PENCAHARIAN MENJALANKAN PEKERJAAN DOKTER GIGI DENGAN TIDAK MEMPUNYAI SURAT IJIN DAN DALAM KEADAAN YANG TIDAK MEMAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	LALAI TIDAK MEMBERITAHUKAN KEPADA KEPALA DESA ATAS KEPINDAHANNYA. LALAI MEMBERITAHU KPD KEPALA DESA STLH 14 HARI TINGGAL DI DAERAH TSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	LOSMEN, HOTEL PENGINAPAN YG PEMILIKNYA : (A) TDK MENGADAKAN BUKU TAMU (B) LALAI TDK MELAPORKAN/MEMPERLIHATKAN BUKU TAMU KEPADA POLRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	TDK DATANG SETELAH DIPANGGIL MENURUT UNDANG-UNDANG, UTK MENJADI SAKSI, AHLI / JURU BAHASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN YG DIMINTA KUASA HUKUM (CQ.POLRI) THDP BAHAYA BAGI KEAMANAN UMUM/BARANG / ORG SEDANG BERBUAT KEJAHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN THDP ORANG DI DLM KEADAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
	BAHAYA MAUT, SEDANGKAN PERTOLONGAN TERSEBUT TDK MEMBAHAYAKAN DIRINYA														
43	DIMUKA UMUM : MENYANYIKAN LAGU-LAGU, PIDATO, MENGADAKAN GAMBAR/TULISAN YG MELANGGAR KESOPANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	NYATA MABUK/KENTARA MABUK DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	MEMAKAI BINATANG UNTUK PEKERJAAN YG TERLAMPAU BERAT, MEMAKAI BINATANG YG CACAT, PINCANG, LUKA, HAMIL UTK PEKERJAAN SESUATU DGN KEADAANNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	MENJUAL, MENAWARKAN, MEMBAGIKAN, MENYERAHKAN BENDA JIMAT/PENANGKAL DENGAN DALIH BENDA TRSB ADA KESAKTIANNYA. MENGAJARKAN ILMU/KEPANDAAN SHG MENIMBULKAN KEPERCAYAAN TERHINDAR DARI BAHAYA APABILA MELAKUKAN TINDAK PIDANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	MEMBIARKAN TERNAKNYA YG BERSAYAP BERJALAN DI TANAH YG SUDAH DITABURI/DITANAMI DENGAN MELAWAN HAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	DGN TIADA BERHAK MEMBIARKAN TERNAKNYA BERJALAN DITANAH YG SUDAH DITABURI/DITANAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	MENINGGALKAN ORANG YG PERLU DITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	MEMBUKA RAHASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	PELAYARAN DAN PENERBANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	TTG KAM UMUM BG ORG.BRG DAN KES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	TTG KETERTIBAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	TTG PENGUSAHA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	TTG ASAL USUL DAN PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
56	TTG ORG YG PERLUDITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	TTG KESUSILAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	TTG TANAH/TANAMAN/PEKARANGAN	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	6
59	JABATAN	9	8	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	19
60	PELAYARAN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	JUMLAH	23	11	22	14	13	0	1	1	3	7	0	0	0	95

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESK RIMU M	DITNA RKO BA	DIT POL AIR	DITK RIMS US	JML
	WWW. GANGGUAN THDP. ORANG														
1	PENEMUAN MAYAT	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3
2	BUNUH DIRI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	TEMU BAYI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEMBUNYIKAN AUDIO BERLEBIHAN/KERAS / BISING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	GANGGUAN THDP ORANG LAINNYA	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	JUMLAH	0	0	1	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	6
	XXX. GANGGUAN THDP. BARANG														
1	KEBAKARAN	18	0	1	0	13	0	4	0	0	0	0	0	0	36
2	KEHILANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	GANGGUAN THDP BARANG LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TANAH LONGSOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	18	0	1	0	13	0	4	0	0	0	0	0	0	36
	YYY. GANGGUAN THDPHEWAN														
1	MEMBUNUH HEWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ZZZ. BENCANA															
1	TANAH LONGSOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ANGIN PUTING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) 5 Kasus tertinggi tahun 2021

NO	KASUS	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TREND
		L	S	% SELRA	L	S	% SELRA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NARKOBA	1419	1275	89 %	1347	1208	89 %	T 72 (5 %)
2	CURANMOR	274	234	85 %	357	223	62 %	N 83 (30 %)
3	CURAT	382	348	91 %	372	308	82 %	T 10 (2.6 %)
4	ANIRAT	132	102	77 %	97	89	91 %	T 35 (26 %)
5	CURAS	48	36	75 %	41	36	87 %	T 7 (14 %)
JUMLAH		2.255	1995	88 %	2.214	1.864	84 %	T 41 (1.8 %)

3. Pengaruh perpindahan IKN terhadap potensi peningkatan tindak pidana di Kalimantan Timur

Kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat. Berbagai faktor dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan seperti faktor ekonomi, lingkungan, keluarga maupun faktor kepribadian individu. Kejahatan seringkali juga ditengarai sebagai akibat buruk pembangunan yang tidak merata, timpang dan terjadi baik di kota maupun desa.³² Kejahatan yang terjadi dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak mengenal usia, profesi, status sosial, maupun gender. Setiap orang dapat berpotensi melakukan protensi.

Menurut Bemmelen kejahatan merupakan suatu tindakan yang anti sosial menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat yang menimbulkan kegelisahan. Kriminalitas atau tindak kejahatan menurut ahli kriminologi merupakan suatu perbuatan sengaja yang melanggar hukum, dilakukan bukan untuk pembelaan diri atau pembenaran dan ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan serius (*felony*) atau kejahatan ringan (*misdemeanor*).³³

³² Ristiasih Retno Utami and Martha Kurnia Asih, "Faktor-Faktor Determinasi Perilaku Kejahatan (*Determination Factors of Criminal Behaviour*)," *Jurnal Psibernetika* 14, no. 1 (2021), hlm. 11

³³ Van Bemmelen dalam *Ibid.*,

Kejahatan dapat berbentuk ucapan atau perbuatan yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila serta menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang).³⁴

Era perkembangan globalisasi, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat saat ini, mengakibatkan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat juga semakin cepat terjadi. Gaya hidup masyarakat pun juga cenderung ikut berubah, misalnya saja masyarakat lebih ke materialisme, hedonisme, dan lain sebagainya. Tentu tidak hanya perubahan gaya hidup, tetapi perubahan perilaku masyarakat pun dapat terjadi, ada yang berubah ke arah yang positif dan ada pula perilaku yang berubah ke arah negatif. Perilaku yang berubah ke arah negatif inilah yang cenderung dapat mengakibatkan potensi kriminalitas di tengah-tengah masyarakat.

Kejahatan tentu menjadi salah satu ancaman terbesar terhadap rasa aman tengah-tengah di kehidupan masyarakat, mengingat rasa aman itu sendiri sangatlah mahal harganya, dalam artian rasa aman itu tentu tidak dapat dinominalkan dengan materi, karena berkaitan perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Rasa aman merupakan bagian dari hak asasi manusia, karena dengan rasa aman kita sebagai masyarakat dapat melakukan segala aktivitas kita dengan penuh kedamaian, akan berbeda kalau kita merasa takut setiap harinya dan tidak merasa aman, sudah dipastikan kita tidak dapat melakukan aktivitas kita dengan tenang.³⁵

Pada dasarnya setiap individu akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal dapat meliputi faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, faktor ketenagakerjaan (pengangguran atau memiliki pekerjaan), serta faktor kesejahteraan. Adapun faktor eksternal dapat berupa faktor pendidikan, faktor pergaulan atau faktor lingkungan.³⁶

³⁴ Ibid.,

³⁵ Dwi Putra, Andrian, et al., *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Indonesia Tahun 2018*, Indonesian Journal of Applied Statistics 3, no. 2 (2020), hlm. 124.

³⁶ Ibid., hlm. 124-125.

Begitupun halnya dengan adanya perpindahan IKN di Kalimantan Timur, tidak dapat ditampikkan bahwa tentu terdapat pengaruh terhadap potensi tindak pidana, mengingat bahwa dalam proses pembangunan menghadirkan jumlah orang yang sangat banyak, baik itu pekerja atau karyawan. Selain itu karena komunitas semakin heterogen, adanya saling beririsan kebutuhan, sehingga potensi kriminalitas pasti ada, misalnya rental mobil ada yang tidak bayar, maka dapat menimbulkan kriminalitas. Seiring dengan perkembangan ekonomi, maka dapat juga semakin meningkat potensi kriminalitas, tentu tidak ditampikkan pasti ada potensi terkait dengan adanya peningkatan tindak pidana (kejahatan). Apalagi berdasarkan data tindak pidana tahun 2017-2021 di atas, maka dapat dilihat bahwa narkoba menempati urutan pertama dari tindak pidana lainnya. Hal ini menandakan bahwa sebelum adanya perpindahan IKN ini, tindak pidana narkoba memang menempati posisi teratas, bukan tidak mungkin dengan adanya perpindahan IKN juga akan semakin menambah bertambahnya tindak pidana tersebut.

Tidak hanya tindak pidana narkoba, tindak pidana lain pun data berpotensi bermunculan, seperti halnya korupsi. Mengingat proyek pembangunan IKN tentu melibatkan berbagai pihak dan kepentingan-kepentingan lainnya. Selain itu, dapat juga kita lihat yang dapat berpotensi adalah adanya mafia-mafia tanah yang dapat bermunculan, dikarenakan IKN saat ini terutama di daerah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, tengah menjadi incaran banyak orang untuk mencari tanah demi mendapatkan harga yang tinggi nantinya.

B. Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Masa Transisi Ibu Kota Nusantara

1. Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana

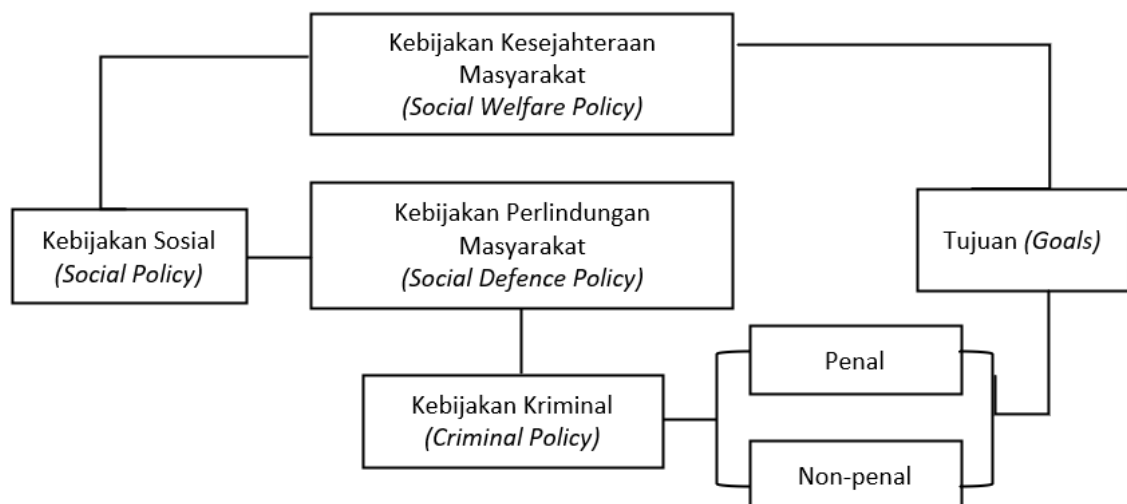
Masalah penanggulangan tindak pidana di masyarakat tentu tidak dapat dipisahkan lepas dari konteks kebijakan kriminal. Mengingat kebijakan kriminal (criminal policy) merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement) yang mencakup kebijakan di bidang hukum pidana, hukum perdata, serta hukum administratif, yang secara keseluruhan merupakan bagian dari politik sosial (social policy). Kebijakan kriminal merupakan usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Usaha penanggulangan kejahatan ini pun dapat bersifat penal maupun non-penal atau dengan kata lain, pada penerapannya (practical criminal policy) secara umum, kebijakan kriminal mendayagunakan sistem peradilan pidana (penal approach) dan keberadaan "criminal legislation", dalam kerangka kodifikasi termasuk didalamnya, di samping sistem pencegahan tindak pidana tanpa menggunakan pidana (prevention without punishment) dan pendayagunaan media massa untuk mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pidana secara positif.

Usaha penanggulangan secara penal (penal approach) dilakukan melalui langkah-langka perumusan norma-norma hukum pidana yang didalamnya tentu memuat nilai-nilai substantif, struktural, serta kultural dimana norma-norma hukum pidana tersebut diterapkan. Seperti yang disebutkan di atas bahwasannya usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal dioperasionalkan melalui suatu sistem, yaitu yang kita kenal dengan sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan untuk mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana, yaitu berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).

Adapun usaha penanggulangan secara non-penal merupakan usaha penanggulangan kejahatan yang berkaitan dengan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana dengan tujuan untuk menangani dan menghapus faktor-faktor kondusif yang dapat menyebabkan adanya suatu tindak pidana. Faktor-faktor kondusif tersebut seperti halnya masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan adanya tindak pidana.

Bagan 2.1

Skema Penanggulangan Tindak Pidana



Berdasarkan skema di atas terlihat upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

- a. Adanya keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial;

b. Adanya keterpaduan antara penanggulangan kejahatan menggunakan sarana penal dan non-penal;

c. Ada keterpaduan antara "treatment of offenders" (dengan pidana/tindakan) dan "treatment of society". Treatment kepada pelaku dapat melalui sarana penal dan non-penal. Adapun treatment kepada masyarakat, dapat melalui pendekatan secara sosiologis, pendekatan agama, pendekatan secara moral pendekatan dari aparat penegak hukum, serta melalui penguatan mental masyarakat;

d. Ada keterpaduan antara "penyembuhan/pengobatan simptomatik" dan "pengobatan kausatif". Penyembuhan secara simptomatik dapat dilakukan dengan menjerat pelaku tindak pidana dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Adapun secara kausatif dapat dilakukan dengan pencegahan terhadap kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana;

e. Ada keterpaduan "treatment of offenders" dengan "treatment of the victim". Treatment dari korban dapat melalui ganti rugi. Sedangkan treatment dari pelaku seperti yang telah dijelaskan sebelumnya;

f. Terdapat keterpaduan antara "individual/personal responsibility" dengan "structural/functional responsibility", yang berarti harus ada keterpaduan antara tanggung jawab diri pribadi dengan tanggung jawab dari pemerintah;

g. Terdapat keterpaduan antara sarana formal dengan sarana informal/tradisional atau dengan kata lain antara "legal system" dan "extra legal system".

Tujuan akhir dari kebijakan kriminal, yakni perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. sebagaimana juga dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah untuk perlindungan masyarakat, dan untuk mencapai tujuan utamanya sering disebut:

a. Kebahagiaan masyarakat (happiness of citizens).

- b. Kehidupan luhur yang sehat dan menyegarkan (a wholesome and cultural living).
- c. Kesejahteraan masyarakat (social welfare.)
- d. Atau untuk mencapai keseimbangan (equality).

Penanggulangan kejahatan tidak melulu harus dikenakan sanksi pidana penjara, atau dengan kata lain bahwa tidak ada suatu keharusan penanggulangan kejahatan menggunakan sarana hukum pidana (penal). Mengingat penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal berupa penjatuhan pidana dapat memberikan dampak buruk, bahkan Herman Bianchi mengemukakan bahwa lembaga penjara dan pidana penjara harus dihapuskan untuk selama-lamanya dan secara menyeluruh. Tidak sedikitpun (bekas) yang patut diambil dari sisi gelap di dalam sejarah kemanusiaan ini. Menghilangkan pidana secara keseluruhan tentu juga tidak memungkinkan, karena sebenarnya sarana penal juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap suatu delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkal (deterrent effect). Tidak hanya hal tersebut, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat (social dislike) atau penceaan/kebencian sosial (social disapproval social abhorrence) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (social defence).

Begitupun halnya jika kita melihat masa transisi pemindahan Ibu Kota Negara (untuk selanjutnya disebut IKN) di Kalimantan Timur saat ini. Pemindahan IKN ke wilayah Kalimantan Timur tentu tidak dapat dipungkiri bahwasannya terdapat risiko-risiko yang harus diantisipasi selama masa transisi pemindahan IKN ini, karena tentu tidak dapat ditampikkan bahwa pemindahan IKN dapat berdampak terhadap kejahatan-kejahatan yang dapat bermunculan, seperti halnya kejahatan yang berhubungan dari sisi ekonomi. Mengingat pemindahan IKN tentu membutuhkan biaya yang sangat besar, apalagi yang berkaitan dengan pembangunan

infrastruktur di wilayah IKN ini. Risiko gagal, molor, mangkrak, serta penyimpangan dana tentu dapat saja terjadi. Tidak hanya terkait dengan penyimpangan dana, tetapi kecemburuan sosial, serta potensi konflik dengan warga pendatang serta patologi psikologis (stres, ketakutan akan ancaman kriminalitas) akibat berdatangnya masyarakat luar Kalimantan Timur ke zona inti maupun bufferzone IKN. Belum lagi dampak-dampak negatif lain yang dipastikan akan mengganggu stabilitas gatra di area Kalimantan Timur secara holistik.

Wilian J. Chambliss mengemukakan bahwa kejahatan merupakan suatu gejala hukum, politik, ekonomi, dan sosial yang benar-benar kompleks yang harus dipelajari sistematis dari banyak aspek. Kejahatan berasal dari perkembangan sosial yang timbul bersamaan dengan perkembangan ekonomi masyarakat. Perkembangan sosial yang demikian mengakibatkan dinamika dalam struktur masyarakat serta dapat menimbulkan masalah-masalah baru pula. Kenyataan menunjukkan bahwa adanya kenaikan kejahatan dalam negara-negara proses perkembangan sosial yang timbul bersamaan dengan perkembangan ekonomi.

Begitupun jika kita melihat aspek dari pemindahan IKN ke wilayah Kalimantan Timur ini, tentunya kebijakan kriminal harus terintegrasi dengan kebijakan sosial. Mengingat pemindahan IKN ini merupakan sesuatu yang sangat kompleks, yang harus ditangani dengan treatment yang tepat. Potensi-potensi kejahatan yang dapat bermunculan dalam masa transisi saat ini harus benar-benar dikaji dari aspek kebijakan kriminalnya. Haruslah menggunakan skema penanggulangan kejahatan, seperti yang Penulis paparkan sebelumnya.

Kebijakan kriminal dalam hal penanggulangan tindak pidana pada masa transisi IKN ini, hendaknya harus memadukan antara kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Saat masa transisi ini, potensi kejahatan tentu semakin rawan bermunculan. Baik itu, kejahatan dari segi horizontal, maupun secara vertikal.

Adapun dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan;

- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach). Pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam symposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain sebagai berikut:

“Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat”.

Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak kriminal, maka perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:

- a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.

c. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyatanya tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.

d. Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Pendekatan kebijakan tersebut diatas jelas merupakan pendekatan yang rasional karena karakteristik dari suatu politik kriminal yang rasional tidak lain daripada penerapan metode yang rasional (a rational total of the responses to crime), dan suatu kebijakan yang rasional merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai yang senantiasa berlaku dan atau berkembang di masyarakat sehingga produk dari kebijakan tersebut mampu menggambarkan suasana ruh masyarakatnya.

Menurut "Modern Criminal Science" terdapat tiga variable yang sangat erat dan saling berhubungan satu sama lain yaitu, "Criminology", "Criminal Law" dan "Penal Policy". Kebijakan hukum pidana (Penal Policy) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan, Marc Ancel menjelaskan bahwa:

"Di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis disatu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, di mana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerjasama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, humanis dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat".

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak mungkin hanya menanggulangi suatu kejahatan (tindak pidana) hanya menggunakan sarana penal saja, melainkan juga harus

menggunakan sarana non-penal didalamnya. Apalagi dalam masa transisi IKN saat ini, menurut Penulis menjadi hal penting sarana non-penal untuk menanggulangi kejahatan. Usaha-usaha tersebut antara lain mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas (prevention without punishment) yang disebut Muladi sebagai kebijakan kriminal non-sistem peradilan pidana dapat dibedakan pada tipologi tindakan pencegahan, yaitu primary prevention, secondary prevention, dan tertiary prevention”.

Pertama penggunaan media massa, di era perkembangan teknologi saat ini, tentu penggunaan media massa apalagi media online memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Media massa merupakan suatu jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim melewati media cetak atau elektronik, sehingga pesan informasi yang sama itu dapat diterima secara serentak dan sesaat. Secara umum, media massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Hal ini seperti dirumuskan dalam Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu Fungsi Pers Nasional adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial, serta dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Setiap harinya kita tidak dapat lepas dari media online yang memang menjadi media komunikasi di seluruh penjuru dunia. Bahkan semua kalangan mengakses media tersebut, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Dengan demikian, akan sangat disayangkan jika kita tidak menggunakan media massa ini sebagai bagian dari penanggulangan kejahatan. Media massa atau pers mempunyai fungsi yang cukup strategis dalam politik kriminal, seperti dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels bahwa media massa atau mass media ini sebagai salah satu unsur dari politik kriminal (criminal policy). Fungsi media massa dalam kerangka politik kriminal menurut Hoefnagels ditujukan untuk mempengaruhi pandangan-pandangan masyarakat tentang tindak pidana dan ppidanaan atau influencing view of society on crime and punishment. Peranan media massa dalam kerangka politik kriminal ini menurut

Hoefnagels disejajarkan dengan upaya-upaya politik kriminal yang lain yaitu Criminal Law Application (Practical Criminology) yaitu penanggulangan tindak pidana dengan sarana hukum pidana dan Prevention Without Punishment yaitu penanggulangan tindak pidana melalui sarana di luar hukum pidana.

Fungsi kontrol sosial dari pers tersebut selanjutnya dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang antara lain dinyatakan, pers yang mana juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi kolusi, nepotisme, maupun akan penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Berdasarkan perumusan fungsi pers atau media massa dalam Undang-Undang Pers di atas dapat diketahui bahwa fungsi dari pers atau media massa adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Dalam kaitan hubungannya dengan pemanfaatan media massa dalam penanggulangan kejahatan, maka fungsi media massa di sini terutama sebagai media informasi dan kontrol sosial.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam pemanfaatan media massa baik cetak maupun elektronik, kaitannya untuk penanggulangan tindak pidana korupsi antara lain berupa: Informasi atau berita-berita aktual dari berbagai isu yang berkaitan dengan praktik-praktik korupsi; Pengungkapan dan peliputan kasus-kasus korupsi dan modus operandi dari praktik-praktik korupsi; Mengangkat berbagai berita korupsi di berbagai level pemerintahan dan lembaga penegak hukum secara objektif; Pemberitaan penanganan akan tindak pidana korupsi oleh penegak hukum sejak penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemasyarakatan.

Fungsi kontrol sosial media massa terkait dengan penanggulangan tindak pidana korupsi disini antara lain dapat berupa pemantauan terhadap pengungkapan kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum yang dimulai sejak penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemasyarakatan. Sehubungan dengan pendapat Hoefnagels bahwa fungsi media massa adalah untuk mempengaruhi pandangan-pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pembedaan maka apabila dihubungkan dengan fungsinya dalam hal penanggulangan tindak

pidana korupsi, media massa di sini diharapkan dapat untuk berpengaruh terhadap pandangan masyarakat tentang pengetahuan, perasaan atau keyakinan dan perilaku partisipatif masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.

Efek atas adanya pemberitaan akan penanganan tindak pidana korupsi yang disampaikan oleh aparat sistem peradilan pidana ini yaitu dengan adanya efek kognitif, afektif, dan konatif. Efek kognitif meliputi peningkatan akan kesadaran, belajar, dan tambahan pengetahuan. Efek afektif itu berhubungan dengan emosi, perasaan, dan attitude atau sikap. Sedangkan efek konatif berhubungan dengan perilaku dan niat untuk dapat melakukan sesuatu menurut cara tertentu.

Dari beberapa uraian tersebut di atas diketahui bahwa media massa mempunyai peranserta yang vital dan strategis dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, karena media massa dapat mengungkap kasus korupsi melalui pemberitaan dan melakukan kontrol atau pengawasan terhadap berjalannya pengungkapan kasus korupsi oleh penegak hukum.

Kedua, yang harus diperhatikan dari segi non penal adalah memperhatikan kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana atau dengan kata lain harus dilihat dari segi kausatif, tidak hanya simtomatiknya saja. Mengingat bahwa seseorang tentu tidak serta melakukan kejahatan, melainkan terdapat suatu keadaan atau latar belakang tertentu yang mengakibatkan seseorang tersebut melakukan tindak pidana, dapat dipengaruhi karena faktor demografis (pertambahan penduduk), faktor ekologi (penyebaran ruang pemukiman), faktor geografik (temperature, kelembaban, pertukaran iklim), faktor ekonomi (kemiskinan, pengangguran) dan faktor sosial (ekonomi, keluarga, pendidikan, politik, dan agama). Dengan demikian, faktor-faktor yang demikian harus diatasi agar tidak menimbulkan kejahatan, seperti halnya tindak pidana narkoba. Pada masa transisi IKN saat ini, menurut Penulis tindak pidana narkoba merupakan salah satu tindak pidana yang potensinya dapat meningkat. Hal demikian, dikarenakan banyaknya orang yang berdatangan ke wilayah IKN baru ini. Dengan menggunakan kebijakan kriminal dari sisi non-penal yang menitikberatkan

pada kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan semakin meningkatnya tindak pidana tersebut harus segera diatasi. Salah satu hal yang dapat dilakukan misalnya mengadakan penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan tindak pidana narkotika, khususnya di wilayah yang menjadi titik sentris pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Hal demikian tentu penting untuk dilakukan, agar masyarakat paham akan bahaya dari penyalahgunaan narkotika, terlebih anak-anak remaja yang sangat mudah terpengaruh. Penyuluhan yang demikian dapat dilakukan di lingkungan sekolah, kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten. Penyuluhan tersebut dilaksanakan dengan sasaran para pelajar, remaja, dan masyarakat umum secara luas maupun masyarakat yang berada di sekitar wilayah tempat terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Tingkat kejahatan narkotika yang ada saat ini semakin hari semakin berkembang dengan bertambahnya kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Para anak-anak dan remaja harus lebih teliti dalam memilih teman. Jangan asal bergaul dengan teman yang tidak baik karena lingkungan pergaulan sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Kemudian orang tua juga harus waspada terhadap lingkungan pergaulan anak, memberikan nasihat dan arahan kepada anak-anaknya agar tidak terjerumus ke dalam lingkungan pergaulan negatif karena peran orang tua sangat penting bagi perkembangan kepribadian anak. Selain itu, menghimbau kepada masyarakat agar melaporkan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi di sekitar lingkungannya agar penegakan hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan lancar, sehingga tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat segera diatasi oleh pihak kepolisian.

Tujuan utama dilaksanakannya kegiatan penyuluhan mengenai bahaya tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut adalah untuk mencegah peredaran narkotika di masa transisi IKN yang semakin lama semakin bertambah. Selain itu, agar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan bahaya dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang mana

dapat merusak fisik dan mental bahkan menyebabkan kematian. Maka kegiatan penyuluhan tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Upaya persuasif merupakan suatu tindakan penanggulangan kejahatan dengan cara mengajak, membimbing, menasihati agar bertindak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Upaya persuasif ini dilakukan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan cara mendatangi mantan pelaku yang sudah selesai menjalani sanksi pidana untuk memberikan nasihat dan dorongan agar tidak mengulangi kembali perbuatannya serta mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh mantan pelaku tersebut setelah bebas dari masa hukuman agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya. Selain itu dalam melakukan upaya persuasif ini juga melibatkan tokoh agama dan masyarakat di lingkungan sekitar tempat terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk memberikan himbauan kepada warga agar melaporkan kepada kepolisian jika ada kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sehingga pihak kepolisian dapat segera melakukan tindakan kepada pelaku. Peran tokoh agama dan masyarakat tersebut sangat diperlukan agar masyarakat sekitar tidak terpengaruh dan terjerumus ke dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Penegakan hukum kejahatan narkoba dan psikotropika, dilakukan dengan sangat gencar, tetapi organisasi mafianya juga tersusun dengan rapi, yang memungkinkan terlibatnya penegak hukum atau mantan penegak hukum. Sehingga, sangat sulit dilakukan pemberantasannya. Jumlah narkoba dan psikotropika, semakin banyak, dan para pemakainnya juga terus bertambah. Tidak hanya dari kalangan keluarga yang tidak bahagia, tetapi juga telah menjalar pada masyarakat ekonomi menengah dan kalangan yang berbahagia. Masuk jalur narkoba dan psikotropika di kenal melalui segi tiga emas (golden triangle), yang terletak antara Thailand, Myanmar, dan Laos. Di Indonesia, peredaran narkoba dilakukan dengan berbagai cara, dan cara-cara tersebut sudah mendekati cara mafia internasional.

Hal ini tentu menjadi perhatian, mengingat berdasarkan data kriminalitas di Kalimantan Timur, 4 (empat) tahun terakhir ini, narkoba tetap menempati posisi paling tinggi dari semua tindak pidana. Dengan demikian, menandakan bahwa tindak pidana yang satu ini memang dibutuhkan suatu penanggulangan-penanggulangan yang efektif untuk menanggulangnya, apalagi saat masa transisi IKN ini, bukan tidak mungkin tentu juga akan berdampak dikarenakan banyak nantinya pekerja atau karyawan yang berdatangan dari luar wilayah Kalimantan Timur.

2. Arah Kebijakan Nasional dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Masa Transisi IKN

Pada masa transisi IKN saat ini, tentu dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang efektif dalam hal penanggulangan tindak pidana. Dimana saat ini IKN tengah menjadi sorotan baik di tingkat nasional maupun internasional. Perlu dipersiapkan dengan sedemikian rupa terkait dengan kebijakan nasional dalam hal penanggulangan tindak pidananya. Seperti pada pembahasan sebelumnya, bahwa kebijakan kriminal harus diintegrasikan kedalam kebijakan sosial, mengingat muara akhir dari kebijakan kriminal dan kebijakan sosial tersebut adalah untuk kesejahteraan masyarakat (social welfare).

Sebelumnya juga telah dipaparkan bahwa saat ini dalam hal penanggulangan tindak pidana tidak cukup hanya menggunakan sarana hukum pidana saja, melainkan harus dibantu dengan sarana-sarana lainnya di luar hukum pidana. Mengingat hukum pidana yang sifatnya ultimum remidium, bukanlah sebagai primum remedium. Penanggulangan tindak pidana (kejahatan) di era modernisasi saat ini haruslah di modifikasi sesuai dengan perkembangan zaman, dalam artian bahwa penanggulangan tindak pidana dengan cara-cara yang konvensional setidaknya sudah seharusnya bergeser ke arah yang modern juga, yang mungkin dulunya mindset yang terbangun adalah saat ada kejahatan, maka harus dimasukkan ke penjara. Pemikiran yang demikian tentunya harus diubah, dimana sudah saatnya kita mencari solusi bahwa bagaimana kejahatan itu dapat diantisipasi sebelum terjadi.

Karakteristik kota modern (modern city) adalah adanya masyarakat modern di suatu kota yang memiliki tujuan masa depan bersama yang berpikir jauh ke depan (forward thinking), yang ditindak lanjuti dengan upaya-upaya inovatif melalui pemanfaatan teknologi dalam perencanaan dan pengelolaan kota, perancangan dan penataan bangunan, serta dalam mengatasi permasalahan sosial perkotaan. Kota modern juga memiliki karakteristik sebagai kota yang terencana, yang terukur dalam setiap tahap pengembangan dan target pencapaiannya.

Era digitalisasi saat ini, teknologi semakin canggih, dengan demikian, memanfaatkan teknologi atau dengan kata lain techno crime prevention dapat digunakan. Arah kebijakan nasional dalam hal penanggulangan tindak pidana haruslah juga mengikuti era digitalisasi saat ini. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan menciptakan (to create), mengakses (to access), mengolah (to process), dan memanfaatkan (to utilize) informasi secara tepat dan akurat. Informasi merupakan suatu komoditi yang sangat berharga di era globalisasi untuk dikuasai dalam rangka meningkatkan daya saing suatu organisasi secara berkelanjutan. Seperti yang Penulis paparkan bahwa dalam hal penanggulangan tindak pidana dapat menggunakan sarana mass media untuk mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan (tindak pidana). Apalagi hampir semua kalangan dan usia saat ini sudah bersentuhan dengan mass media, terutama media online, sehingga hal demikian dapat dimanfaatkan sebagai sarana penanggulangan tindak pidana.

Hadirnya pemindahan IKN ini tentu menjadi proyek bersama, tidak hanya soal proyek pembangunan, tetapi juga soal penanggulangan tindak pidana. Kondisi-kondisi yang dapat menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana haruslah diantisipasi segera. Pemindahan IKN tentu juga akan berdampak pada warga sekitar, misalnya saja ada warga yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencahariannya. Kondisi yang demikian tentu berpotensi untuk menimbulkan kriminalitas (tindak pidana) di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, banyaknya pekerja atau karyawan yang berdatangan ke lokasi IKN juga berpotensi menimbulkan berbagai

kejahatan (tindak pidana). Hal-hal demikian dibutuhkan arah kebijakan nasional yang jelas, dengan memperhatikan penanggulangan pidana serta kesejahteraan masyarakat yang berpotensi terpinggirkan dengan hadirnya IKN ini. Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara disebutkan bahwa salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah tingkat inklusivitas, dalam hal ini adalah pengikutsertaan peran masyarakat setempat sebagai pelaku utama pembangunan. Dengan demikian hal ini menjadi penting bahwa masyarakat setempat harus dilibatkan sebagai aktor utama pada proses pembangunan IKN ini.

Mengingat membangun dan menata kembali Ibu Kota Negara tentunya memerlukan konsep yang matang dan didasari pada visi jangka panjang suatu bangsa. Pengembangan ibu kota baru biasanya dikaitkan dengan perkembangan isu-isu pembangunan kota dan kebutuhan bangsa yang mendasari pertimbangan pemindahan ibu kota tersebut. Paradigma perencanaan dan pengembangan kota baru selanjutnya hadir sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengembangan ibu kota negara di lokasi yang baru.

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam rangka penanggulangan kejahatan pada umumnya di Indonesia menggunakan teori yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa "*criminal policy is the rational organization of social reactions to crime.*" Teori ini merupakan perumusan kembali dari teori yang dikemukakan oleh Marc Ancel yang menyatakan bahwa "*criminal policy is the rational organization of the control of crime by society*" (kebijakan kriminal merupakan upaya rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan). Kemudian G.P. Hoefnagels dalam bukunya yang berjudul *The Other Side of Criminology* merumuskannya secara lebih terperinci, sebagai berikut:

- 1) Criminal policy as a science of responses
- 2) Criminal policy is the science of crime prevention;
- 3) Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime; dan
- 4) Criminal policy is rational total of the responses to crime.

G.P. Hoefnagels menyatakan bahwa kebijakan kriminal (criminal policy) merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (social policy). Hal tersebut tampak dalam pernyataan "criminal policy as a science of policy is part of larger policy: the law enforcement policy The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy." Dengan demikian, kebijakan kriminal (criminal policy) merupakan subsistem dari sistem penegakan hukum (law enforcement policy), yang merupakan subsistem dari kebijakan sosial (social policy). Upaya penanggulangan kejahatan sebagaimana diuraikan di atas harus diperhatikan dalam konteks kebijakan sosial yang menyeluruh yang bertujuan memberikan perlindungan masyarakat dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Pembangunan IKN dirancang agar menjadi kota berkelanjutan di dunia, simbol identitas nasional dan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Bambang Susantono, Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara dalam pernyataan pers menyatakan bahwa, "Membangun kota tidak hanya membangun fisiknya, tetapi terutama adalah bagaimana kerekatan sosialnya, interaksi antarwarganya, bagaimana kota tersebut menjadi kota yang layak huni, humanis, dan liveable. "Guna mencapai kondisi tersebut, pembangunan IKN setidaknya harus meliputi lima norma sebagai berikut (1) pemerintah yang efektif dan efisien; (2) kota layak huni; (3) infrastruktur dan konektivitas cerdas; (4) sektor-sektor prioritas untuk masa depan; dan (5) kolaborasi tiga kota, yaitu Samarinda, Balikpapan, dan IKN.

Senada dengan apa yang disampaikan Bambang Susantono, bahwa untuk membangun sebuah kota diperlukan kerekatan sosial, interaksi antarwarga, hingga kota layak huni tentu hal ini berkesinambungan dengan sebuah kebijakan yang akan diterapkan. Pada masa transisi IKN ini banyak isu-isu yang muncul terutama dengan potensi korupsi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. IKN yang ditargetkan sebagai pusat pemerintahan memerlukan penciptaan pemerintah yang efektif dan efisien. Pemerintahan ideal bagi IKN mencerminkan pelayanan berkelas internasional dan berorientasi smart governance yang bercirikan proses birokrasi yang sederhana, kinerja yang efektif dan efisien, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam sebuah proses pembangunan tentu tidak berjalan secara mudah, tentu ada hambatan-hambatan yang berupa tantangan untuk dihadapi guna mencapai suatu keberhasilan. Salah satunya ialah potensi munculnya korupsi. Pembangunan IKN memicu untuk sebuah oknum melakukan tindak pidana korupsi, dikarenakan adanya celah untuk melakukannya yaitu dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya. Berangkat dari hal tersebut, tentu harus ada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi problematika ini. Upaya yang dilakukan dapat berbentuk kebijakan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan IKN yang bersih. Salah satunya dengan memanfaatkan lembaga negara yang memiliki kewenangan mengenai problematika tersebut.

1) Pembentukan Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi

Tindak pidana khusus seperti korupsi tentu harus ditangani oleh sebuah lembaga yang khusus pula bersesuaian dengan korupsi yang termasuk sebagai kejahatan luar biasa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir dari amanat Undang-Undang 31 Tahun 1999 dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, yang diberikan amanat untuk melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK hadir sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien . Dalam menjalankan tugas tersebut, KPK dapat membentuk satgas untuk meningkatkan pencegahan terjadinya korupsi yang marak terjadi. Tugas satgas pencegahan tindak pidana korupsi yaitu meningkatkan fokus pencegahan pada 8 titik layanan publik yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran APBN, Pengadaan Barang dan jasa, Perizinan, APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa.

Sehubungan dengan penyelenggaraan pembangunan IKN, KPK membentuk Satgas untuk mendampingi hal tersebut. Satgas diyakini dapat meminimalisir potensi penyimpangan sebagai upaya pencegahan korupsi guna mendukung pembangunan IKN yang transparan dan akuntabel. Adapun KPK dalam pelaksanaan tugas pencegahan akan mengawal proses persiapan dan pembangunan IKN Nusantara sesuai mandat undang-undang melalui kegiatan kajian sebagai pelaksanaan tugas monitor atas penyelenggaraan pemerintahan negara.

Program-program pembangunan IKN dapat menimbulkan celah untuk melakukan korupsi diantaranya di sektor anggaran pembangunan dan pengadaan barang dan jasa yang kerap kali dijadikan motif pintu masuk tindak pidana korupsi. KPK melansir bahwa 80% kasus korupsi yang mereka tangani adalah terkait jenis korupsi ini. Sehingga dapat dikatakan arah kebijakan yang dilakukan lembaga KPK dalam masa transisi IKN berupa membentuk sebuah Satgas sebagai langkah awal pengawasan terhadap program pembangunan IKN guna terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas korupsi.

2) KPBU melalui Creative Financing

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa tentunya tidak mudah dalam melaksanakan pemberantasan. Berbagai upaya telah dilakukan KPK untuk meminimalisir terjadinya korupsi di negara kita. Hal tersebut tentunya bisa terealisasi jika semua Lembaga terkoordinir dengan baik, salah satunya dengan terbosan pemerintah dalam strategi pembangunan IKN. Pemerintah telah merumuskan dan menetapkan beberapa kebijakan yang diharapkan dapat memaksimalkan partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur di IKN melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ("UU IKN") dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara ("PP Pendanaan IKN"). Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain: 1) Penguatan kewenangan Otorita IKN, 2) Perluasan sumber pendanaan

IKN, serta 3) Pemberian dukungan Pemerintah atas penyediaan infrastruktur melalui pembiayaan kreatif (creative financing) untuk menarik investasi swasta di IKN.

Melalui hal tersebut, motif korupsi yang telah dijelaskan adalah selalu mengenai pengadaan biaya anggaran dan barang dan jasa, namun dengan kerja samanya dengan KPBU diharapkan untuk menjaga kualitas anggaran pemerintah pusat ataupun daerah melalui beberapa cara termasuk dengan mengurangi tekanan pada APBN dan APBD, menciptakan kaitan yang erat antara penganggaran dan indikator kinerja serta mendorong inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat. Penyediaan infrastruktur melalui pembiayaan kreatif (creative financing) menjadi terobosan baru pemerintah bahasan yang akan diungkap lebih lanjut untuk mempercepat pembangunan IKN. KPBU sendiri memiliki tujuan yaitu :

- a. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;
- b. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;
- c. Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;
- d. Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; dan/atau
- e. Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.

Sehubungan dengan hal tersebut, Skema pembiayaan kreatif (creative financing) termasuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan IKN dengan mekanisme melakukan optimalisasi berbagai sumber pendanaan termasuk pembiayaan kreatif (creative

financing) sebagaimana dimaksud dalam sumber pendanaan pada tabel di atas. Selain itu, Pemerintah Pusat juga memberikan dukungan yang sangat kuat atas implementasi berbagai sumber pendanaan tersebut melalui skema dukungan fiskal dari Pemerintah yang berupa fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi untuk KPBU IKN, Dukungan Kelayakan, insentif perpajakan, penjaminan Pemerintah, hingga pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN). Dalam menjalankan skema pembiayaan kreatif ini, yaitu pemerintah dapat memberikan dukungan-dukungan sebagai berikut ;

Pertama, Kombinasi Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) dan Pengguna Membayar/Skema Lain. Sebagaimana diketahui bahwa dalam Perpres 38 tahun 2015 disebutkan bahwa Pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana atas Penyediaan Infrastruktur bersumber dari: a. pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif; b. Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment); dan/atau bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun dalam pelaksanaannya ketentuan ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena pembatasan pengaturan di dalam peraturan turunannya. Sebagai contoh, PMK Nomor 260 Tahun 2016 mengatur bahwa pembayaran Availability Payment digunakan pada proyek KPBU yang pengembalian investasinya tidak bersumber dari pembayaran oleh pengguna atas tarif layanan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah. Namun untuk mendorong percepatan dalam pemindahan IKN ini, pelaksanaan skema pengembalian investasi akan disesuaikan dengan ketentuannya bahwa dapat merupakan kombinasi dari pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif (user payment), Availability Payment; dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, skema pengembalian investasi itu kini juga dapat diberikan untuk proyek KPBU yang diprakarsai oleh Badan Usaha (Unsolicited).

Kedua, Penjaminan KPBU dan Penjaminan Pembiayaan Kreatif. Penjaminan merupakan tools Pemerintah untuk dapat memastikan bankability proyek sehingga menarik minat investasi pihak swasta. Pihak swasta akan merasa nyaman untuk berinvestasi karena adanya alokasi

risiko yang dijamin oleh Pemerintah. Khusus untuk percepatan pemindahan IKN ini, penjaminan Pemerintah tidak hanya untuk proyek KPBU, namun dapat juga diberikan untuk skema-skema pembiayaan kreatif lainnya.

Ketiga, Penugasan standby lender untuk mempercepat pemenuhan pembiayaan. Dengan kebijakan ini, Badan Usaha Pelaksana dalam Proyek KPBU dapat menggunakan sumber pembiayaan yang berasal dari perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur dan/atau lembaga yang bergerak di bidang pengelolaan investasi Pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Standby lender ini sifatnya akan berdasarkan penugasan dari Menteri Keuangan. Standby lender diharapkan dapat berkontribusi untuk memastikan proyek bankable selain peran dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Dengan menjadi Standby lender, diharapkan lender mempunyai akses informasi terhadap proyek sehingga dapat memberikan masukan-masukan sejak tahap persiapan proyek. Lebih lanjut, dengan adanya standby lender ini diharapkan dapat mempercepat proses financial close dari yang semula ditargetkan 12 bulan dan dapat diperpanjang dari waktu ke waktu menjadi hanya 4 bulan dan dapat diperpanjang 2 bulan.

Keempat, Kebijakan Viability Gap Fund (VGF) khusus IKN. Sebelumnya, dukungan pemerintah berupa VGF ini hanya dapat diberikan untuk proyek KPBU dengan skema pengembalian investasi berupa pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif. Namun sekarang, demi percepatan pembangunan IKN, Pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa VGF juga dapat diberikan kepada proyek KPBU dengan skema pengembalian investasi pembayaran ketersediaan layanan (Availability Payment). Hal ini bertujuan untuk memastikan kelayakan proyek sehingga meningkatkan minat investasi swasta.

Kelima, Partisipasi INA dalam penyediaan pembiayaan infrastruktur. Dalam rangka mempercepat penyediaan Infrastruktur di IKN, Pemerintah menetapkan kebijakan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur dan lembaga yang bergerak di bidang pengelolaan investasi Pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan dapat bertindak sebagai penyedia pembiayaan infrastruktur. Dalam kebijakan tersebut, Pemerintah memungkinkan Indonesia Investment Authority (INA) untuk menjadi penyedia pembiayaan. INA sendiri merupakan sovereign wealth fund Indonesia. INA mengelola dana investasi untuk membangun kekayaan untuk generasi mendatang dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Dengan terobosan-terobosan tersebut, dapat kita lihat bahwa Pemerintah sedang mencoba keluar dari 'zona nyaman'nya. Artinya bahwa dengan adanya kebutuhan yang begitu besar untuk pemindahan IKN ini, Pemerintah telah mencoba untuk lebih fleksibel sehingga dapat menarik lebih banyak dana dari pihak swasta. Hal tersebut selaras dengan pesan Presiden RI dalam sambutan pada acara Financial Closing PINA tahun 2017 bahwa Pemerintah perlu keluar dari zona nyaman dengan menjalankan terobosan-terobosan dalam mekanisme pembiayaan untuk proyek infrastruktur.

Dengan demikian kerja sama dari berbagai lembaga salah satunya KPBU seperti halnya skema tersebut tentunya dapat mengurangi dan menekan terjadinya korupsi karena dengan hal tersebut menjadi bentuk pengawas sekaligus memperlancar pembangunan IKN yang transparansi, efektif dan efisien serta bersih dengan catatan lembaga yang diberikan kewenangan memberikan konsistensi sesuai dengan tujuan dan visi dibentuknya lembaga tersebut.

3) Dibentuknya Peraturan LKPP Pengadaan Barang/Jasa

Urgensi hadirnya Undang-Undang tidak lain tidak bukan ialah sebagai pengendali atas batasan-batasan yang dilarang oleh negara sebagai bentuk perlindungan hukum. Keberhasilan suatu undang-undang dilihat bagaimana pengimplementasiannya kepada masyarakat. Perpindahan Ibu Kota Negara tentu menjalani proses yang tidak mudah butuh suatu konsistensi terhadap tujuan akan pembangunan IKN ini.

Pembangunan IKN malah memunculkan sebuah problematika atas hadirnya potensi korupsi dalam pengadaan anggaran maupun barang dan jasa oleh karenanya dibutuhkan suatu kebijakan berupa kepastian hukum agar hal seperti ini tidak terjadi.

Dilansir dari menurut data bahwa korupsi sering dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa. Oleh karenanya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus sigap memonitoring pembangunan IKN. Dikeluarkannya kebijakan mengenai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyediaan Infrastruktur Dan Pengadaan Barang/Jasa Yang Lainnya Dengan Kekhususan Dalam Rangka Kegiatan Persiapan, Pembangunan, Dan Pemindahan Ibu Kota Negara, Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya korupsi.

Bersesuaian dengan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara Pasal 24 ayat (2) maka lahirlah penetapan Peraturan LKPP tersebut. Selain hal itu, dibentuknya Peraturan LKPP ini menjadi bukti bahwa pembangunan IKN Nusantara bukan semata-mata soal pemindahan fisik ibukota, tetapi yang jauh lebih penting: transformasi paradigma tentang Indonesia Maju yang inklusif. Jika kita memaknainya hal tersebut telah dijelaskan bahwa LKPP ingin menciptakan pemerataan ekonomi dan momentum Indonesia dapat bangkit dari keterpurukan ekonomi ditengah pandemi covid-19.

Peraturan LKPP ini juga sebagai bentuk upaya pencegahan yang dilakukan oleh lembaga agar dapat meminimalisir tindak pidana korupsi. Hadirnya Peraturan baru ini dapat mengurangi kekuasaan sewenang-wenang apalagi aturan ini juga secara khusus mengatur untuk pembangunan IKN sehingga berujung untuk menegakkan keadilan merata dan mewujudkan efisiensi melalui prosedur standar yang jelas sehingga segala bentuk penyimpangan yang terjadi dapat mudah diketahui.

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah selama masa transisi IKN harus selalu dimonitoring agar mencapai tujuan dari pembangunann IKN. Arah dari ketiga kebijakan tersebut menyasar kepada penanggulan tindak pidana korupsi pada pembangunan IKN.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan dua hal, yakni:

1. Perpindahan IKN ke wilayah Kalimantan Timur dapat berpengaruh terhadap potensi adanya tindak pidana yang bermunculan pada masa transisi saat ini, banyaknya orang-orang yang berdatangan baik itu pekerja ataupun orang-orang yang berkunjung akan semakin membuka peluang terhadap berbagai tindak pidana lainnya.
2. Kebijakan kriminal dalam hal penanggulangan tindak pidana pada masa transisi IKN ini, hendaknya harus memadukan antara kebijakan penal dan kebijakan non-penal serta arah kebijakan nasional dalam penanggulangan tindak pidana di masa transisi IKN dapat dilakukan dengan mendukung penyelenggaraan pembangunan IKN yang bersih dari tindak pidana korupsi dengan memanfaatkan lembaga negara yang menganani problematika tersebut.

B. Saran

Saran yang dapat Penulis berikan dalam hal ini adalah terkait dengan kebijakan penanggulangan tindak pidana dalam hal menyongsong masa transisi IKN ini hendaknya dilakukan upaya-upaya preventif. Hal-hal yang seandainya dapat menimbulkan potensi tindak pidana haruslah diatasi segera dengan mengintegrasikan kebijakan-kebijakan sosial lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, Sistem Pidana Dan Pemidanaa Di Indonesia (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010),

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,(Bandung: PT.Citra Aditya, 2002)

Burhan, Ashshofa. Metode Penelitian Hukum, Cetakan Keempat. (Jakarta: Rineka Cipta,2004)

Dwi Putra, Andrian, et al., Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Indonesia Tahun 2018, Indonesian Journal of Applied Statistics 3, no. 2 (2020), hlm. 124.

Fitriyanti, Azizah. (2019). Dari Almaty ke Nur-Sultan, ibu kota baru Kazakhstan yang jadi legasi. <https://www.antaraneews.com/berita/987420/dari-almaty-ke-nur-sultan-ibu-kota-baru-kazakhstan-yang-jadi-legasi>

G.Peter Hoefnagels, The Other Slide of Criminology An Invebdion of the concept of crime, (Holland: Kluwer Deventer, 1969)

Hakim, Lukmanul. Ali Maksum. (2021). Capital Relocation from the Perspective of Transnational Organized Crime (TOC) Security at the Indonesia-Malaysia Border. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. <http://ijmmu.com> editor@ijmmu.com Volume 9, Issue 11 November, 2022 Pages: 214-224

Iqbal, Hasan. (2002). Pokok-Pokok Mater Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia. h.11

Karta Raharja, Ucu. (2021). Presiden Kazakhstan: Rakyat Bebas Mengkritik Pemerintah. <https://www.republika.co.id/berita/qos28u282/presiden-kazakhstan-rakyat-bebas-mengkritik-pemerintah>

Kompas. 'Keppres Pemindahan Ibu Kota Dari Jakarta Ke IKN Akan Diterbitkan Pada 2024'. <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/06/21134681/keppres-pemindahan-ibu-kota-dari-jakarta-ke-ikn-akan-diterbitkan-pada-2024>

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

Monavia, Ayu Rizaty. (2022). 10 Kota dengan Tingkat Kriminalitas Tertinggi di Asia Tenggara, Jakarta Urutan 8. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/10/10-kota-dengan-tingkat-kriminalitas-tertinggi-di-asia-tenggara-jakarta-urutan-8>

Putra Kurnia, Mahendra. Rika Erawaty, Grizelda.(2022). Implikasi Pemindahan Ibu Kota Negara Dari Perspektif Hukum Internasional. <https://repository.unmul.ac.id>

Ristiasih Retno Utami and Martha Kurnia Asih, "Faktor-Faktor Determinasi Perilaku Kejahatan (Determination Factors of Criminal Behaviour)," Jurnal Psibernetika 14, no. 1 (2021), hlm. 11

Rossmann, Vadim. (2016). Capital Cities: Varieties and Patterns of Development and Relocation. London: Routledge

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1981)

Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar. (Yogyakarta: Liberty, 2007)

Suharso Monoarfa, "Ibu kota negara (ikn)," Bappenas, May 2017, 2020, 159 <[https://ikn.go.id/en%0Ahttps://ikn.go.id/%0Ahttps://jdih.bappenas.go.id/data/sitelur-detail/Naskah+Akademik+RUU+IKN+20+Maret+2020_reduce_compressed_\(1\).pdf](https://ikn.go.id/en%0Ahttps://ikn.go.id/%0Ahttps://jdih.bappenas.go.id/data/sitelur-detail/Naskah+Akademik+RUU+IKN+20+Maret+2020_reduce_compressed_(1).pdf)>.

Sulistyowati, Irianto dan Shidarta. Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi.(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009)

Waluyo Erwanti, Fanisa Luthfia Putri, Catatan Kritis Pembentukan Undang- Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum, Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional |, 1.1 (2022).

Yahya, H. M. (2018). Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera. 14(01), 21–30. <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.kemerdekaan>

Yoanda, Paul. Mellani Eka Mahayana.(2022). Putrajaya Sepi Tapi Aman, Bisa Ditiru IKN Nusantara. <https://rm.id/baca-berita/internasional/131310/liputan-rakyat-merdeka-dari-malaysia-putrajaya-sepi-tapi-aman-bisa-ditiru-ikn-nusantara/4>